



KATA PENGANTAR

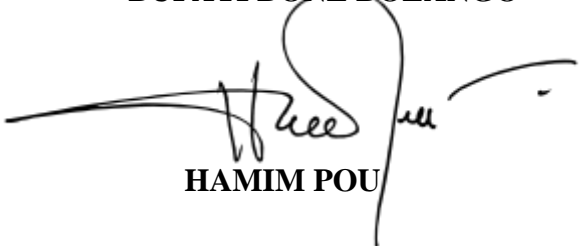
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya beupa nikmat kesehatan serta kesempatan untuk merampungkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016, disadari bahwa masih belum memenuhi harapan sebagaimana yang diinginkan oleh kita bersama, hal ini tentunya tidak lepas dari kodrat kita sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan dan disamping itu pula dengan adanya perubahan-perubahan aturan yang terjadi, sehingga mengakibatkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan, dengan harapan kiranya hasil evaluasi kinerja ini akan memberikan masukan bagi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan nanti khususnya untuk membangun Kabupaten Bone Bolango tercinta ini dan semoga beroleh berkat dan Ridha Allah SWT, Amin,,,,,

Bone Bolango, Maret 2016

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ 2016) dihadapan paripurna DPRD. Berpedoman kepada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2017 Bupati Bone Bolango Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Tahun 2016 Bupati Bone Bolango merupakan instrument pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi pencapaian target RPJMD 2016-2021 yang memuat capaian kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan selama Tahun 2016.



2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa jabatan Tahun 2016 Bupati Bone Bolango adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ Masa Jabatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumber daya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

3. Landasan Penyusunan

Di samping itu, penyusunan LKPJ ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban 2016 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia.
 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan



1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016
3. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan tugas pembantuan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

BAB VII PENUTUP

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

Gambar: 1
Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

❖ Batas Wilayah

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk



merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkaran dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

Tabel 1.1
Gambaran Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Bone Bolango

BATAS WILAYAH	BERBATASAN
Sebelah Utara	Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kec. Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo
Sebelah Barat	Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo Kecamatan Kota Utara, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

❖ Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km² yang tersebar pada 18 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Menurut Kecamatan

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1. Tapa	64,41	3,26
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02

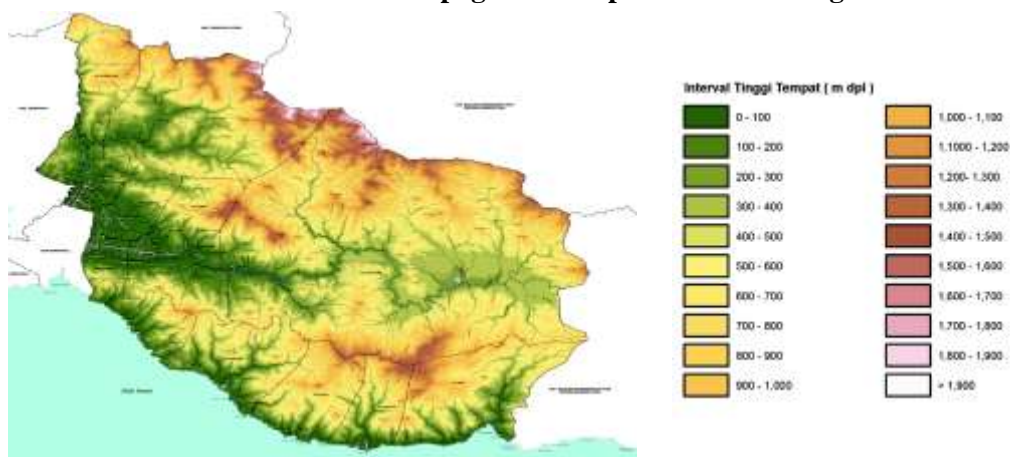
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur	47,11	2,37
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
18. Pinogu	406,78	20,50
JUMLAH	1984,58	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

❖ Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan).

Gambar: 2
Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.

c. Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada Gambar 3. Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

Gambar : 3
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah ± 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

❖ **Pola Penggunaan Lahan**

Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.4.

Gambar: 4
Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango, 2011

Tabel 1.4
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	LUAS (Ha)
		2014
1.	Hutan	
	1. Taman Nasional	104.740
	2. Hutan Lindung	15.930
	3. Hutan produksi tetap	824
	4. Hutan produksi terbatas	18.824
2.	Hutan Basah	
	1. Sawah yang diolah	2.044
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	74
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4
3.	Lahan Kering	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang/huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	Bangunan dan lain-lain	
	1. Pekarangan/tanah untuk bangunan	487
	2. Taman Nasional	7.355
	3. Hutan Lindung	9376
	Total	198.431

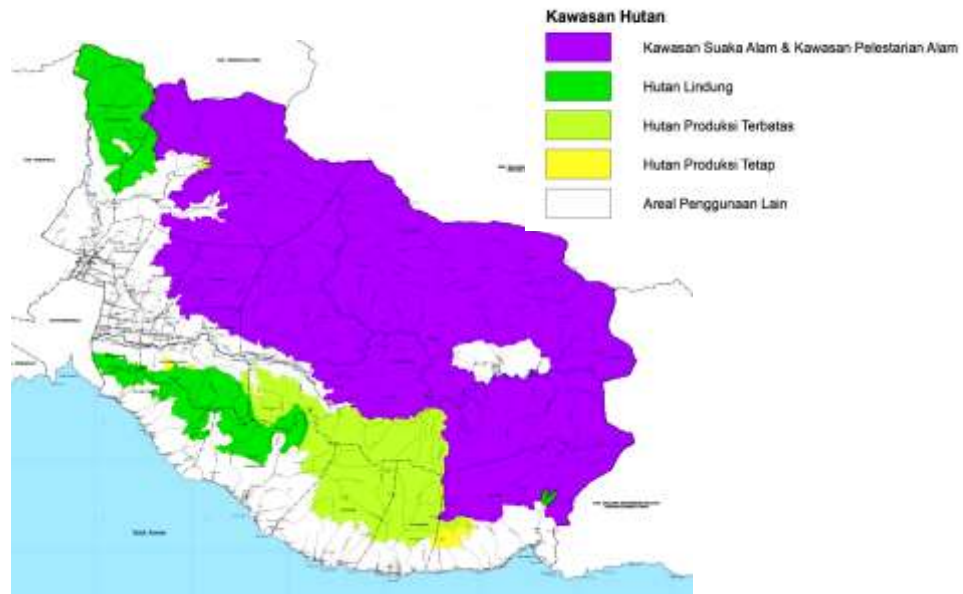
Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

(*) Data masih sementara dalam pengolahan dan perampungan

❖ Potensi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Gambar: 5
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain.

Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5
Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2016

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)
		2014
1	Hutan Lindung	15.718,25
2	Hutan Produksi Terbatas	18.803,29
3	Hutan Produksi Tetap	836,45
4	Hutan Produksi Konversi	-
5	Hutan Taman Nasional	104.740,15

Sumber Data : BPKH Wil XVI Gorontalo, (SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)

❖ Potensi Pertambangan dan Energi

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan dimana masih seringnya terjadi penggunaan bahan-bahan radioaktif yang tidak direkomendasikan dalam usaha pertambangan rakyat. Untuk itu diperlukan kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan pemberian izin pengolahan hasil pertambangan dengan mempertimbangkan nilai hayati serta potensi yang tersedia.

Gambar: 6
Peta Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011



Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7, .8 dan 1.9 berikut ini:

Tabel 1.6
Potensi Pertambangan Non Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Tambang	Potensi Pertambangan Non Logam
1.	Granit (Ton)	-
2.	Andesit (Ton)	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	24.600.880

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Tabel 1.7
Potensi Pertambangan Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
1.	Emas	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3.2
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Tulabolo	119.310
		Kecamatan Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Kayubulan	119.310
2.	Tembaga	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	232,200
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Dumbaya Bulan	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	1891,500
		Kecamatan Bonepantai Cabang Kiri	1891,500

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Sedangkan perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.8



Tabel 1.8
Sumber Energi Listrik
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Sumber Daya Energi	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Jumlah Sumber Daya Energi (unit)
1.	PLTA	Suwawa Timur	-
2.	PLTU	Kecamatan Kabila Bone	
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Selatan - Desa Molintogupo - Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kecamatan Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kecamatan Tilongkabila - Desa Tunggulo Kecamatan Bone Pantai - Desa Pelita Hijau	100 Unit 145 Unit 450 Unit 71 Unit 1 Unit 45 Unit 71 Unit 50 Unit 50 Unit 48 Unit -
6.	PLTMH	Kecamatan Bulango Ulu - Desa Owata Kecamatan Bulango Timur - Desa Kopi Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit 1 Unit 15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

❖ **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi wisata berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Selain itu sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang tersendiri untuk



pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Tabel 1.9
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata				Jumlah Sanggar Seni dan Budaya
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah	
2014	1	1	4	4	8
2015	1	1	4	4	8
2016	1	1	4	4	8

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Kawasan Strategis Wisata Alam

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman dalam perspektif ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penentuan kawasan ini di Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan dalam dua tipe yaitu :

- (1). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata bahari yaitu Pantai Olele
- (2). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata daratan yaitu :
 - Kawasan Air Panas Lombongo, di perbukitan Lombongo, Desa Lombongo, Kec. Suwawa Tengah
 - Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kec. Suwawa Selatan ;
 - Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kec. Bone ;
 - Kawasan Danau Perintis, Kec. Suwawa ;
 - Kawasan Taman Laut Olele ,Desa Olele,Kecamatan Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Botutonuo, Desa Botutonuo, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Molotabu, Desa Molotabu, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Bulawa, Kec. Bulawa
 - Kawasan Wisata Alam Meranti, Desa Langge, Kec. Tapa

Kawasan wisata telah banyak menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah. Oleh karena kawasan wisata alam di Kabupaten Bone Bolango harus mendapat perhatian serius karena memiliki nilai potensi dikembangkan. Kawasan



ini bisa menjadi sumber utama PDRB Hijau. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas ekologis;
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui *management of coloboration*;
- Pembangunan infrastruktur penunjang;
- Pengendalian dampak antropogenis;
- Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha wisata;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan;
- Pembuatan payung hukum;

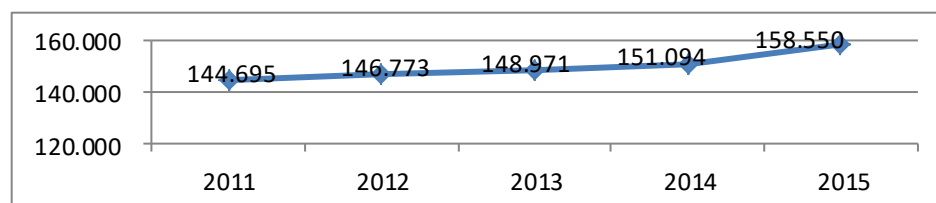
2. Gambaran Umum Demografis

❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun sampai dengan 2015 sebanyak 158.550 jiwa terdiri dari 79.589 jiwa laki-laki dan 78.961 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 80 jiwa tiap Km², dengan sebaran penduduk tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Kabila (14,91%) dan dan Kecamatan Tilongkabila (11,51%)

Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Bone Bolango, 109.914 jiwa berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor Pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor industry pengolahan yakni 5,19 %.

Grafik 1
Perkembangan Penduduk di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015



Sumber Data : BPS Bone Bolango Tahun 2016

❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk disetiap kecamatan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 (Data BPS) dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.10
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 – 2016

No	Kecamatan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Tapa	8.235	7.956	7.956
2.	Bulango Utara	8.011	7.825	7.825
3.	Bulango Selatan	11.141	10.429	10.429
4.	Bulango Timur	5.873	5.549	5.549
5.	Bulango Ulu	4.168	3.918	3.918
6.	Kabila	24.435	23.634	23.634
7.	Botupingge	6.644	6.448	6.448
8.	Tilongkabila	18.613	18.242	18.242
9.	Suwawa	13.030	12.572	12.572
10.	Suwawa Selatan	5.587	5.200	5.200
11.	Suwawa Timur	5.651	5.245	5.245
12.	Suwawa Tengah	6.602	6.221	6.221
13.	Pinogu	2.224	2.006	2.006
14.	Bonepantai	11.430	10.867	10.867
15.	Kabila Bone	11.730	11.281	11.281
16.	Bone Raya	7.135	6.648	6.648
17.	Bone	10.213	9.372	9.372
18.	Bulawa	5.513	5.137	5.137
Jumlah Total		166.235*	157.624	158.550

Sumber Data : BPS Bone Bolango Tahun 2016
Data Tahun 2013 data Capil

Rata-rata luas wilayah dan penduduk per desa dan per Km² berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Rata-rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		KM ²	%	2015	%	
1.	Tapa	64,41	3,17	7.956	5,02	124
2.	Bulango Utara	176,10	8,68	7.825	4,94	45
3.	Bulango Selatan	9,87	0,49	10.429	6,58	1057
4.	Bulango Timur	10,82	0,53	5.549	3,50	513
5.	Bulango Ulu	78,41	3,86	3.918	2,47	50
6.	Kabila	193,45	9,53	23.634	14,91	123
7.	Botupingge	47,11	2,32	6.448	4,07	137
8.	Tilongkabila	79,74	3,93	18.242	11,51	229
9.	Suwawa	33,51	1,65	12.572	7,93	376

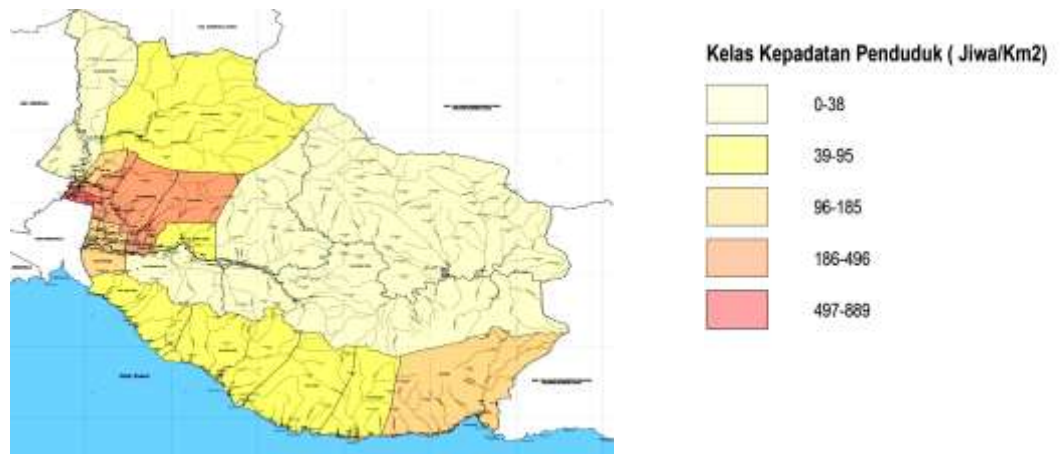


10.	Suwawa Selatan	184,09	9,07	5.200	3,28	29
11.	Suwawa Timur	127,80	6,30	5.245	3,31	42
12.	Suwawa Tengah	64,70	3,19	6.221	3,92	97
13.	Pinogu	406,78	20,04	2.006	1,27	6
14.	Bonepantai	161,82	7,97	11.730	6,85	68
15.	Kabila Bone	143,51	7,07	11.430	7,12	79
16.	Bone Raya	64,12	3,16,	5.513	4,19	104
17.	Bone	72,71	3,58	7.135	5,91	129
18.	Bulawa	111,01	5,47	10.213	3,24	47
Jumlah Total		1.984,58	100	157.624	100,00	80

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Gambar: 7

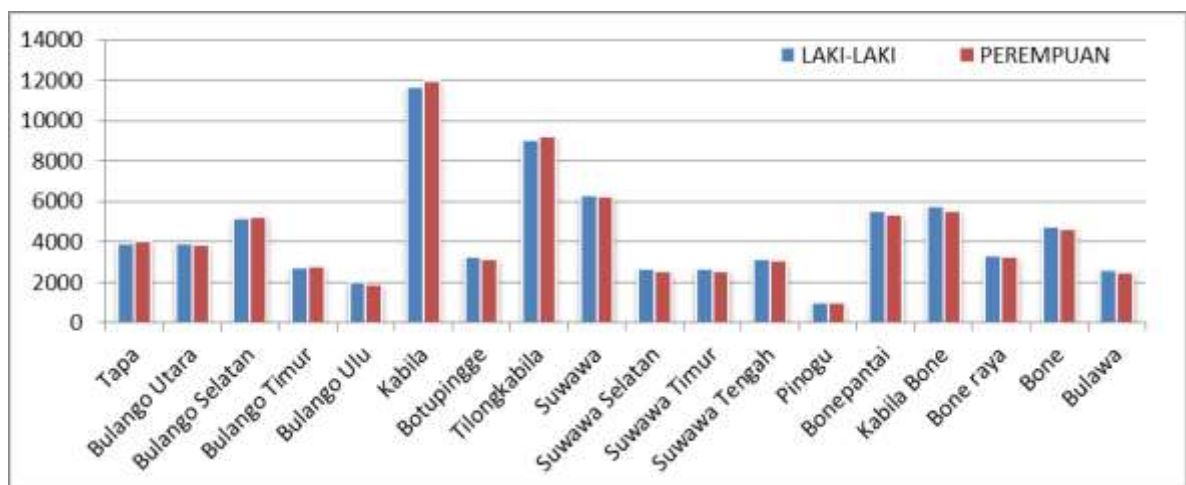
Peta Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

Tabel 1.11

Banyaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin
Kabupaten bone bolango tahun 2015





Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, 2015

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	45 888	24 910	70 798
Bekerja	44 067	21 948	66 015
Pengangguran Terbuka	1 821	2 962	4 783
Bukan Angkatan Kerja	8 888	30 544	39 432
Sekolah	5 721	6 729	12 450
Mengurus Rumah Tangga	1 493	22 654	24 147
Lainnya	1 674	1 161	2 835
Jumlah	54 776	55 454	110 230
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83.77	44.92	64.23
Tingkat Pengangguran	3.97	11.89	6.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kondisi Sosial Masyarakat

Kinerja makro ekonomi daerah Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan regional. Berbagai langkah strategis yang di lakukan dalam rangka penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat difokuskan pada kebijakan alokasi dan distribusi fiskal daerah serta mendorong tumbuhnya investasi daerah disamping merekomendasikan strategi kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, membangun basis-basis ekonomi daerah, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder dan tersier.

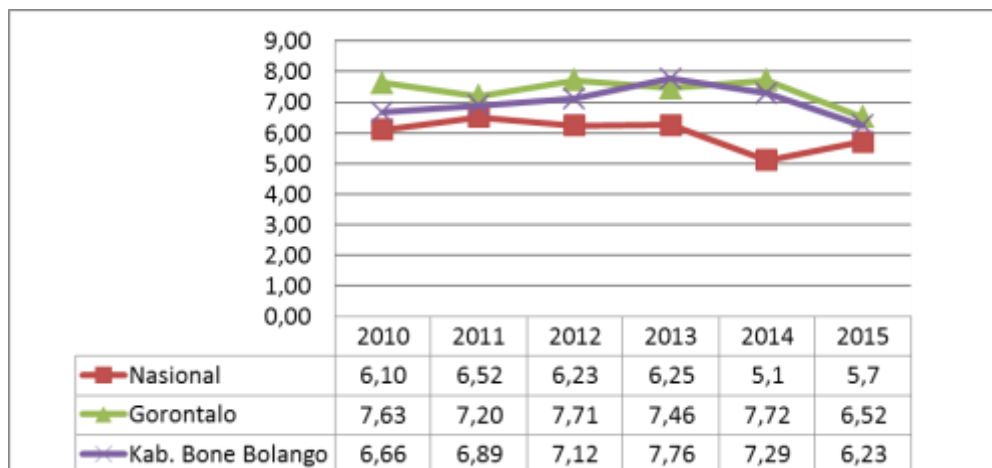
Secara agregat, perekonomian kabupaten Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik walaupun diakui bahwa pertumbuhan tersebut dibawah tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi



Gorontalo. Dalam selang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango mencapai 7,46% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai 7,72,%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 turun sebesar 1,2% atau mencapai 6,52%, tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Gorontalo 7,63% pada tahun 2013 dan 7,76% pada tahun 2014, dan 7,29 tahun 2015 6,23%. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabuptaen Bone Bolango berada diatas rata-rata provinsi dan nasional.

Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 6,76% dibandingkan tahun 2014 4,84%. Kenaikan angka pengangguran bukan hanya dialami oleh Kabupaten Bone Bolango namun secara keseluruhan kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan trend yang kurang baik.

Grafik 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Gorontalo
Kab. Bolango Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : BPS RI

Grafik 1.3
Perkembangan Angka Pengangguran Kab. Bone Bolango Tahun 2011 – 2015

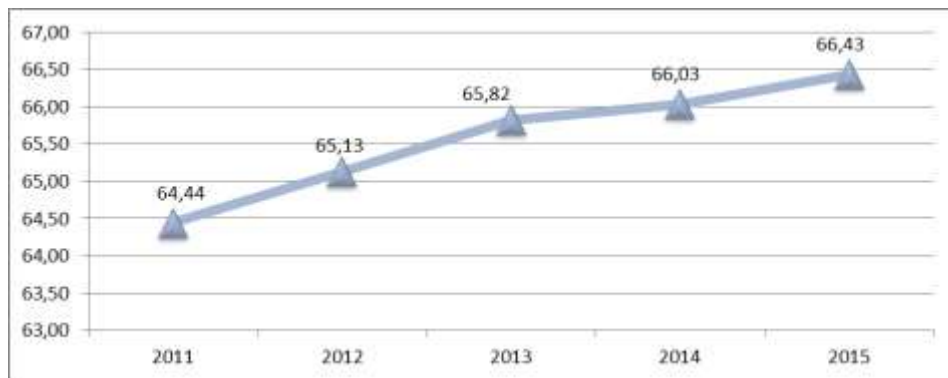


Sumber Data : BPS Bone Bolango



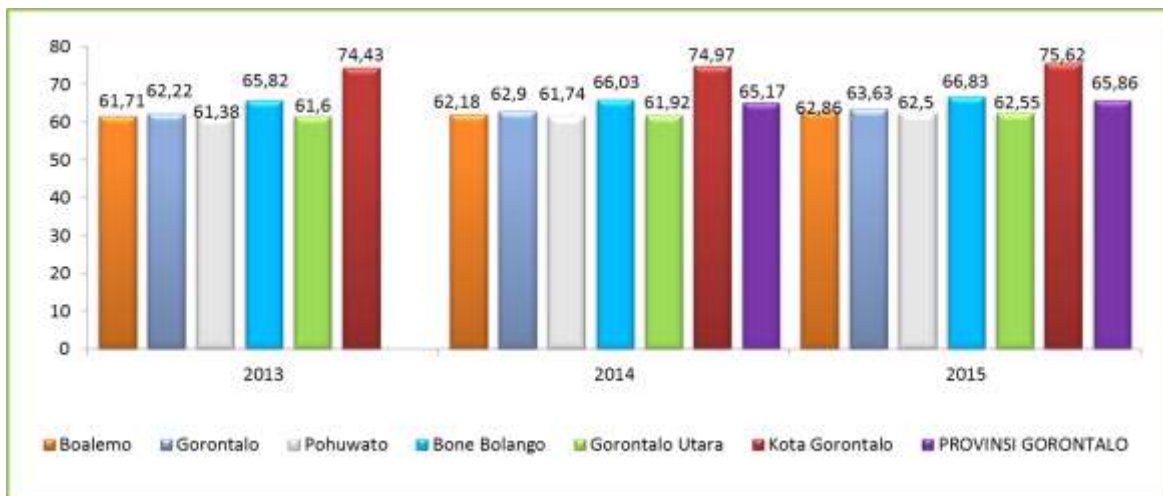
Dilihat dari aspek kinerja peningkatan kualitas hidup penduduk berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan presentase penduduk miskin, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 menunjukkan trend yang cukup baik. IPM kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 meningkat menjadi 66,43 dibanding pada tahun 2014 sebesar 66,03 dan dengan capaian tersebut maka IPM Bone Bolango tetap menjadi daerah peringkat kedua tertinggi di Provinsi Gorontalo setelah kota Gorontalo sejak 5 tahun terakhir ini. Angka ini masih diatas rata-rata Propinsi yang pada tahun 2014 mencapai 65,17, dan pada tahun 2015 mencapai 65,86. Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 naik menjadi 17,19% dibanding pada tahun 2014 sebesar 16,66%.

Grafik 1.3
IPM Kabupaten BoneBolango Tahun 2011 – 2015



Sumber Data : BPS RI

Grafik 1.4
Perbandingan IPM Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

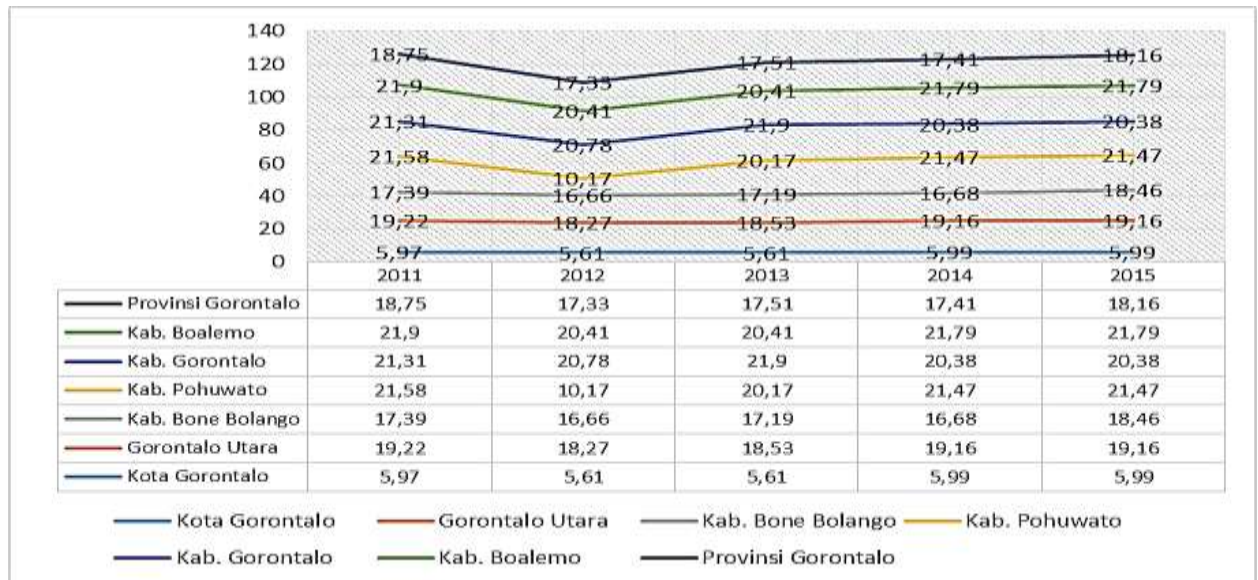


Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo



Grafik 1.4

Angka Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota di Gorontalo Tahun 2011 – 2015



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo

b. Kondisi Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel 1.13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	645.103,35	713.566,07	784.451,08	856.585,47	987.241,35
Pertambangan dan Penggalian	42.352,58	46.945,96	50.437,79	52.843,14	55.814,34
Industri Pengolahan	106.483,03	118.056,32	131.213,77	146.086,56	172.123,38
Pengadaan Listrik dan Gas	692,63	679,01	713,40	709,64	758,17
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	394,39	461,06	532,82	621,86	757,38
Konstruksi	162.638,04	190.922,24	214.863,59	251.602,57	311.118,15
Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190.781,76	217.397,69	244.290,63	282.766,54	331.612,34
Transportasi dan Pergudangan	20.215,36	23.220,54	25.201,09	27.781,73	30.633,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.350,97	21.505,36	22.598,03	24.723,69	27.860,47
Informasi dan Komunikasi	31.711,64	39.867,91	43.336,79	45.582,85	50.539,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	25.394,81	32.213,17	44.211,10	48.436,43	55.029,15



Real Estate	48.909,94	54.275,29	61.586,30	67.776,49	72.916,04
Jasa Perusahaan	1.891,12	2.098,37	2.524,49	3.034,57	3.536,39
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	233.901,61	268.955,79	298.692,97	323.172,45	344.990,63
Jasa Pendidikan	67.270,27	77.012,19	97.149,63	115.844,30	129.054,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.141,87	89.165,02	106.772,21	123.787,87	135.568,96
Jasa Lainnya	39.429,19	42.740,14	46.696,36	53.268,99	58.857,76
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1.719.662,56	1.939.082,13	2.175.272,05	2.424.625,15	2.768.411,78

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011 - 2014 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	645.103,35	672.518,81	711.343,90	756.779,51	809.081,97
Pertambangan dan Penggalian	42.352,58	45.137,48	45.916,38	46.247,54	46.572,99
Industri Pengolahan	106.483,03	113.407,33	121.666,98	130.970,39	139.169,82
Pengadaan Listrik dan Gas	692,63	747,37	833,67	901,11	981,58
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	394,39	433,12	483,94	547,89	613,11
Konstruksi	162.638,04	178.477,62	190.752,61	212.839,07	246.802,22
Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190.781,76	208.545,15	225.238,93	246.706,66	271.716,52
Transportasi dan Pergudangan	20.215,36	21.879,67	23.105,36	24.722,22	26.201,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.350,97	21.293,36	21.542,01	22.642,94	24.688,69
Informasi dan Komunikasi	31.711,64	38.416,06	40.495,32	42.739,33	45.808,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	25.394,81	30.683,29	38.871,53	40.602,81	43.594,93
Real Estate	48.909,94	51.966,26	54.799,73	58.011,69	59.889,37
Jasa Perusahaan	1.891,12	2.021,49	2.317,72	2.678,37	2.938,06
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	233.901,61	249.479,22	266.559,35	282.942,74	296.751,72
Jasa Pendidikan	67.270,27	75.826,85	89.328,11	101.166,29	110.252,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.141,87	86.232,17	97.909,45	107.655,60	114.205,29
Jasa Lainnya	39.429,19	41.558,01	44.715,44	48.433,96	51.385,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1.719.662,56	1.838.623,26	1.975.880,43	2.126.588,12	2.290.654,91

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.15
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Tahun 2011- 2014

LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,51	36,80	36,06	35,33	35,66
Pertambangan dan Penggalian	2,46	2,42	2,32	2,18	2,02
Industri Pengolahan	6,19	6,09	6,03	6,03	6,22
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Konstruksi	9,46	9,85	9,88	10,38	11,24
Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,09	11,21	11,23	11,66	11,98



Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,20	1,16	1,15	1,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,11	1,04	1,02	1,01
Informasi dan Komunikasi	1,84	2,06	1,99	1,88	1,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,66	2,03	2,00	1,99
Real Estate	2,84	2,80	2,83	2,80	2,63
Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,60	13,87	13,73	13,33	12,46
Jasa Pendidikan	3,91	3,97	4,47	4,78	4,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,78	4,60	4,91	5,11	4,90
Jasa Lainnya	2,29	2,20	2,15	2,20	2,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.16
Laju Pertumbuhan PDRB Bone Bolango
Persektor Tahun 2010 – 2014

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,25	5,77	,39	6,91
Pertambangan dan Penggalian	6,58	1,73	0,72	0,70
Industri Pengolahan	6,50	7,28	7,65	6,26
Pengadaan Listrik dan Gas	7,90	11,55	8,09	8,93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,82	11,73	13,21	11,90
Konstruksi	9,74	6,88	11,58	15,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,31	8,00	9,53	10,14
Transportasi dan Pergudangan	8,23	5,60	7,00	5,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	1,17	5,11	9,03
Informasi dan Komunikasi	21,14	5,41	5,54	7,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	20,83	26,69	4,45	7,37
Real Estat	6,25	5,45	5,86	3,24
Jasa Perusahaan/Business Activities	6,89	14,65	15,56	9,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,66	6,85	6,15	4,88
Jasa Pendidikan	12,72	17,81	13,25	8,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,98	13,54	9,95	6,08
Jasa lainnya	5,40	7,60	8,32	6,09

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango



Tabel 1.17
Beberapa Agregat
PDRB Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2014

No.	Rincian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah)	930.800,5	1.019.512	1.108.036	1.217.568	1.359.860,1
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	141.915	145.015	147.692	148.471	151.094
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	6.445.347	7.030.392	7.502.343	8.171.188	8.742.136

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang “*Unggul dan Berdaya saing*” serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

Cerdas : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.

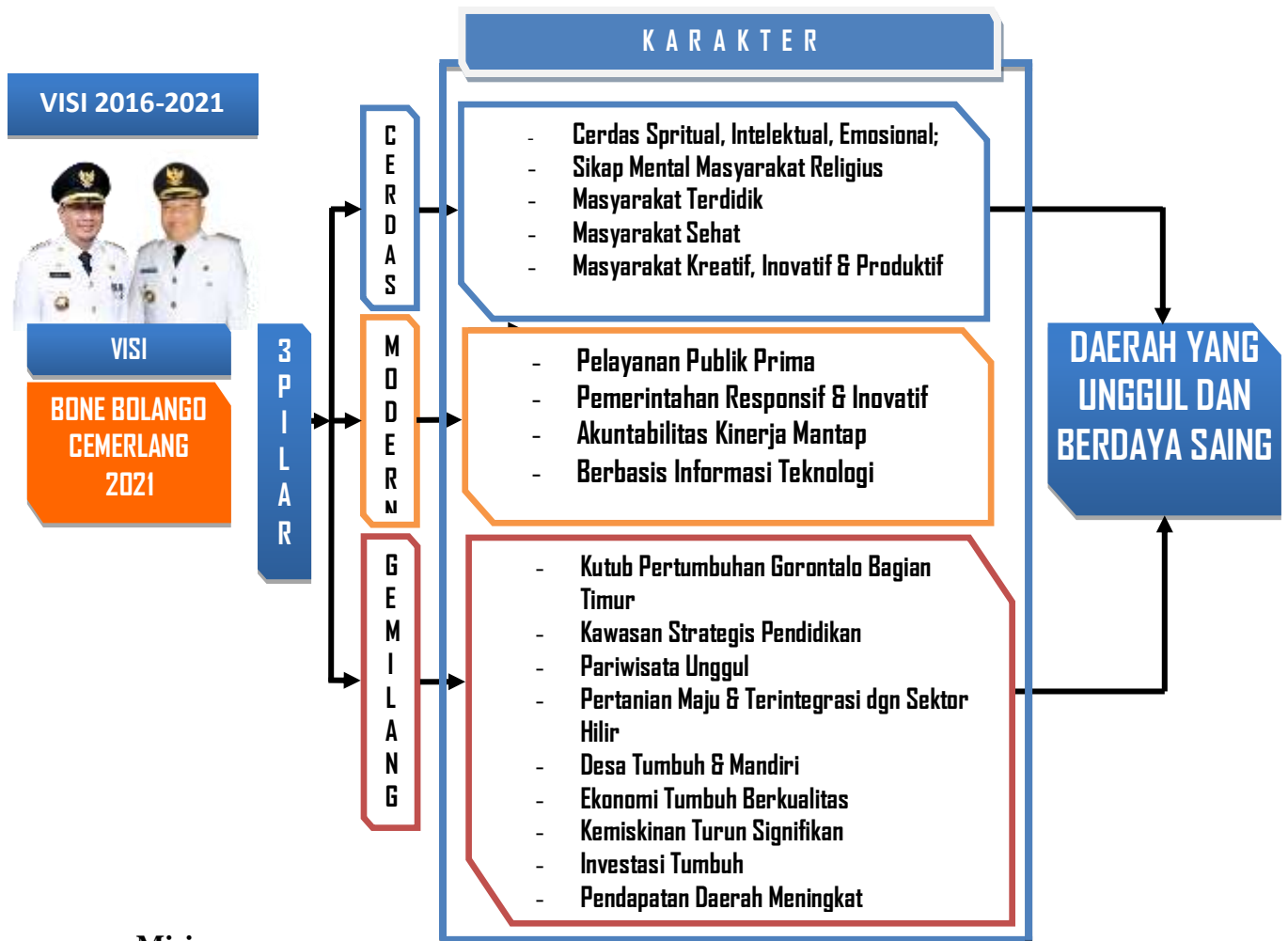
Modern : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta



mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Gemilang : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah dengan keunggulan *comparative* dan keunggulan *competitive*. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.

Visi dan Karakter Utama Visi Daerah 2016-2021



Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Misi menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan. Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tersebut, akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021, yakni sebagai berikut:

Misi Kesatu: Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta



sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Misi Kedua: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.



Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi "*Prime Mover*" pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam



dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.

. Bari berbagai faktor analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang ada, maka dapat disusun suatu matriks untuk menentukan strategi dalam mencapai visi dan misi.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi atau cara mencapai tujuan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program



operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain merupakan upaya untukantisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada para pelaksana

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten Bone Bolango.
2. Berdampak luas pada kepentingan masyarakat dan penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
3. Realistis untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab (satu) atau lebih sasaran pembangun.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rumusan strategi berdasarkan misi yang telah diuraikan sebagai berikut:



Tabel 6.1.

**Keterkaitan Misi, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Strategi	
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera			
Tujuan 1.1.			
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas			
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1.	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1.	Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat
		1.1.2.2.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi
Tujuan 1.2.			
Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender			
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1.	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
Tujuan 1.3			
Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin			
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga
1.3.2	Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat miskin	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar rumah tangga miskin
1.3.3	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif
Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup			
Tujuan 2.1.			
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah			
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1.	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi serta pemukiman yang layak bagi		



No.	Sasaran	Strategi	
	masyarakat dan lingkungan pemukiman		
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air		
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1.	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango
Tujuan 2.2.			
Meningkatkan pembangunan Desa			
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1.	Percepatan pertumbuhan desa
Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan			
Tujuan 3.1.			
Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)			
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1.	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang
Tujuan 3.2.			
Menguatkan ketahanan pangan Daerah			
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1.	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan, pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1.	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas
Tujuan 3.3.			
Meningkatkan peluang investasi			
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1.	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya			
Tujuan 4.1.			
Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik			
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		4.1.1.2.	Meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memperkuat upaya peningkatan PAD
		4.1.1.3.	Optimalkan upaya pemberantasan KKN



No.	Sasaran	Strategi	
			dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.5.	Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN
		4.1.1.6.	Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.
		4.1.1.7.	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		4.1.1.8.	Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap
		4.1.1.9.	Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi
		4.1.1.10	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif
		4.1.1.11.	Menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1.	Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat
		4.1.2.2.	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel
		4.1.2.3.	Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu
		4.1.2.4.	Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan job bidding
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan	4.1.3.1.	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD
		4.1.3.2.	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah
Tujuan 4.2.			
<i>Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan</i>			
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen	4.2.1.1.	Mengadakan berbagai riset yang mendalam



No.	Sasaran	Strategi	
	perubahan dalam pemerintahan		terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)	4.2.2.1.	Perluasan informasi pelayanan publik untuk mengontrol performa pelayanan sesuai ISO: 9001
		4.2.2.2.	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi
		4.2.2.3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.1. dibawah ini



**Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera			
Tujuan 1.1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas			
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1.	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas
			Penyediaan sarana prasarana pendidikan secara terarah, bertahap dan merata hingga wilayah terencil
			Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Pengembangan pendidikan non-formal bagi masyarakat
			Peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis IT
			Meningkatkan pelestarian seni budaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pentas seni dan budaya
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1.	Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat
			Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar hingga keseluruh wilayah terencil
			Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan rujukan dengan meningkatkan kualifikasi RSUD Toto menjadi tipe B dengan unggulan layanan spesialisistik tertentu serta kualifikasi RSUD Tombulilato menjadi Tipe C dengan unggulan layanan penyakit jiwa, paru dan narkoba (JPN)
			Peningkatan ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan, termasuk tenaga spesialis secara merata dan memenuhi kebutuhan dan standar layanan minimum.
			Pemenuhan ketersediaan obat baik pada layanan dasar maupun rujukan
			Peningkatan jaminan sosial kesehatan masyarakat secara merata dan menyeluruh (Universal Health Coverage)
			Peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan balita
			Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
			Pengembangan kemitraan layanan kesehatan



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		1.1.2.2.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi	Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
Tujuan 1.2. <i>Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender</i>				
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan Pembinaan prestasi olahraga Pembinaan wirausaha pemuda
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1.	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri	Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya Pengembangan kabupaten Bone Bolango sebagai kota layak anak
Tujuan 1.3 <i>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</i>				
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga	Pemberian perlindungan sosial masyarakat melalui jaminan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim, janda, penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
1.3.2.	Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat miskin	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar rumah tangga miskin	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar keluarga yang menjamin kelangsungan hidup keluarga
1.3.3.	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana usaha, bantuan/fasilitas modal usaha, bantuan manajemen dan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan
Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup				
Tujuan 2.1. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah</i>				
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1.	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah Penyediaan sarana penunjang sistem transportasi darat khususnya prasarana terminal sesuai arahan RTRW
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi serta pemukiman yang layak bagi masyarakat dan lingkungan pemukiman			Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi secara terarah, terpadu dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan perumahan yang layak serta sarana prasarana lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1.	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten berwawasan lingkungan serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango	Penataan pusat ibu kota pemerintahan, pusat kegiatan lokal dan kawasan perkotaan lainnya Peningkatan konservasi, penayagunaan dan pengendalian air Penyediaan arahan rencana ruang dan pengendalian ruang penguatan kelembagaan BKPRD Penyediaan ruang terbuka hijau buatan dan pengendalian kelestarian ruang terbuka hijau alami Penanganan kawasan rawan bencana melalui upaya mitigasi bencana Penguatan kelembagaan Pokja Pengendalian Lingkungan Hidup Penataan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Pengelolaan, pemanfaatan hutan secara ekonomi, lestari dan berbasis masyarakat serta peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan dari penjarahan, penebangan liar, kebakaran dan peredaran kayu illegal
Tujuan 2.2. Meningkatkan pembangunan Desa				
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1.	Percepatan pertumbuhan desa	Percepatan pembangunan infrastruktur desa Pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan produk unggulan desa Pembinaan masyarakat desa dan peningkatan peran aktif masyarakat Peningkatan kapasitas dan peran aparatur pemerintahan desa
Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan				
Tujuan 3.1. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)				
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1.	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment	Pengembangan jasa pariwisata utamanya wisata alam dan wisata budaya sebagai keunggulan lokal melalui pengembangan objek wisata Taman laut Olele, Kawasan Wisata Pantai Botutonuo, Wisata alam Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Objek Wisata Lombongo, Air Terjun Taludaa, Riverside Bone, Obyek Wisata Meranti, Wisata Budaya dan Sejarah serta Pengembangan Desa



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				<p>Wisata</p> <p>Peningkatan produksi dan produktifitas usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kelautan berbasis kawasan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan usaha</p> <p>Penataan dan pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan khususnya PETI, serta pengembangan iklim kondusif bagi tumbuhnya partisipasi dunia usaha pada usaha pertambangan</p>
				<p>Pengembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya lokal utamanya industri kopi pinogu, aren, pertanian organik, kerajinan kerawang dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pengembangan sentra dan cluster industri dengan memperkuat pembinaan usaha dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kualitas produksi, bantuan permodalan dan sarana prasarana usaha, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dunia usaha</p> <p>Pengembangan sarana prasarana perdagangan yang mendukung pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan pasar harian pada kawasan perdagangan</p> <p>Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pembinaan usaha dan manajemen serta bantuan permodalan.</p> <p>Mengembangkan kemitraan serta menciptakan iklim kondusif yang dapat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha atau melalui pendekatan Public Private Partnership dalam pengembangan usaha unggulan daerah</p>
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan	<p>Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan cepat tumbuh yang berbasis keunggulan sumber daya lokal dan daya saing pemasaran.</p> <p>Pengembangan sentra-sentra atau cluster usaha ekonomi yang menjadi</p>



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang	<p>unggulan daerah utamanya Kopi Pinogu, Pertanian Organik, Aren dan Usaha Pertanian Terpadu (Hulu Hilir Integrated)</p> <p>Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperkuat produk unggulan masing-masing desa andalan</p> <p>Pengembangan kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah</p>
Tujuan 3.2.				
Menguatkan ketahanan pangan Daerah				
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1.	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan, pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis	<p>Peningkatan produksi pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta divesifikasi pangan</p> <p>Pendayagunaan lahan tidak produktif serta lahan kritis</p> <p>Pengembangan desa mandiri pangan secara terarah dan berkelanjutan</p>
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1.	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas	Peningkatan cadangan pangan daerah dan jaminan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
Tujuan 3.3.				
Meningkatkan peluang investasi				
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1.	Meningkatkan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	<p>Pengembangan kemudahan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur perizinan, serta pengembangan sistem insentif dan disinsentif</p> <p>Pengembangan kawasan khusus yang diarahkan sebagai wilayah prioritas investasi</p> <p>Pengembangan promosi potensi unggulan daerah melalui berbagai forum promosi investasi serta media informasi publik</p> <p>Pengembangan kerjasama pembangunan baik kerjasama antar daerah, antar level pemerintahan, kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan penelitian serta stakeholder lainnya</p>
Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya				
Tujuan 4.1.				
Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik				
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistim



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku menuju opini WTP
		4.1.1.2.	Meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memperkuat upaya peningkatan PAD	Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan daerah
		4.1.1.3.	Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian LKIP guna meraih predikat B (Baik, perlu sedikit perbaikan)
		4.1.1.4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas materi dan ketepatan penyampaian LPPD
		4.1.1.5.	Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN	Implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penegakan sistem reward dan punishment sesuai aturan yang berlaku
		4.1.1.6.	Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.	Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala untuk jangka panjang, menengah atau pendek
		4.1.1.7.	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Melaksanakan adminisitrasi kependudukan yang berkualitas
		4.1.1.8.	Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan kriteria prioritas
		4.1.1.9.	Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi	Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik melalui peningkatan kapasitas bandwidth terpasang yang didukung perluasan jaringannya
		4.1.1.10	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif	Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
		4.1.1.11.	Menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg	Meningkatnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada dan Pileg



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1.	Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat	Meningkatkan percepatan proses melalui pelayanan berbasis IT
		4.1.2.2.	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akomodatif, berkelanjutan dan berkualitas
		4.1.2.3.	Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu	Penyusunan regulasi untuk penerapan manajemen kendali mutu SOP dan SPM di bidang pelayanan
		4.1.2.4.	Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan job bidding	Penerapan sistem merit (kinerja profesional) termasuk sistem reward dan punishment dalam pengisian jabatan serta Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan ASN
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan	4.1.3.1.	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD	Membangun sistem penetapan kinerja pelayanan SKPD sebagai perwujudan komitmen peningkatan pelayanan publik
		4.1.3.2.	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah	Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, dunia usaha dan perguruan tinggi
Tujuan 4.2.				
Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan				
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	4.2.1.1.	Mengadakan berbagai riset yang mendalam terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan	Pelaksanaan riset secara komprehensif dan sistematis yang mengacu pada akar permasalahan daerah, sehingga diperlukan sebuah koordinasi yang nyata dan sistematis dari berbagai pihak untuk menjalankannya
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)	4.2.2.1.	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi	Membuat regulasi untuk meningkatkan upaya mengenalkan teknologi informasi dalam aktivitas pelaksanaan tugas keseharian ASN terutama surat menyurat sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas
		4.2.2.2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan	Menerapkan kebijakan "One Agency, One Innovation", yaitu setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan "Quick Wins" sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah



C. Prioritas Daerah

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.1. dibawah ini Berdasarkan hasil analisa terhadap isu – isu strategis dan janji Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (Enam) prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, yakni :

1. Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal

Prioritas pengurangan rakyat miskin difokuskan pada 5 (lima) bentuk intervensi. Intervensi *Pertama* diarahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Intervensi *kedua*, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi *ketiga*, diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; dan pendampingan serta peningkatan keterampilan manajemen usaha. Intervensi *keempat* yakni penyediaan sarana prasarana dasar rumah tangga berupa peningkatan akses pada rumah layak, penyediaan akses sanitasi dan air bersih, akses listrik dan prasarana dasar lainnya. Intervensi *kelima* yakni melalui kebijakan affirmative dengan



mengembangkan program khusus pada wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan dan ketertinggalan.

Sedangkan pengentasan desa tertinggal diarahkan melalui 4 (empat) fokus kebijakan; *pertama* yakni penguatan kelembagaan dan kapasitas pembangunan desa, *kedua* yakni percepatan pembangunan infrastruktur desa, *ketiga*; pengembangan ekonomi desa dengan memperkuat unggulan desa, *keempat* yakni pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha.

2. Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

3. Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (*Universal Health Coverage*), serta peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh



masyarakat, peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan KB, pemberantasan penyakit menular dan penanganan penyakit tertentu dengan prevalensi tinggi, penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan juga melalui pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

4. Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah

Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.



5. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan

Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten. Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, telekomunikasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sumber daya air, perumahan pemukiman, serta sarana-prasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan baik pembangunan terminal, moda transportasi maupun rekayasa jalan dan pengaturan perilaku lalu lintas melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta terbentuknya struktur dan pola ruang yang terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu dan beberapa titik diwilayah Bone Pesisir. Pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pula pada pembukaan akses lintas selatan Suwawa – Kabila Bone serta pembukaan akses Suwawa Selatan – Tulabolo Barat Suwawa Timur. Disamping itu, dukungan infrastruktur jalan pada kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan serta kawasan strategis lainnya akan terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan



moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik.

Peningkatan kapasitas aparatur daerah dilakukan melalui pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan dan pelatihan aparatur baik diklat fungsional, diklat teknis, diklat kepemimpinan maupun pendidikan akademik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pengembangan aparatur diarahkan pula melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan, penguatan kinerja KORPRI, serta perlindungan hukum dan hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkan kepuasan layanan dan jaminan akses layanan masyarakat yang cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau. Peningkatan layanan publik diarahkan pula untuk peningkatan daya tarik investasi khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui penyediaan system layanan yang handal, termasuk kerangka regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan serta efektifitas dan efisiensi setiap jenis layanan, peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknis, peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas.

Dimensi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



Keenam prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan melalui tiga dimensi pembangunan utama yakni:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan



sikap mental aparat. Membangun aparat yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi **"Prime Mover"** pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan



memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan APBD dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun 2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Perubahannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





(APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara continue berupaya melakukan perbaikan serta peningkatan, diantaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.



a. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1). Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (BKPPD), berikutnya perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem pendapatan daerah, berorientasi pada sektor/bidang pungutan (by object) dan berorientasi pada fungsi fungsi (by function) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:
 - a) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah;
 - b) Sistem pengawasan menjadi lebih baik;
 - c) Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
 - Peningkatan jurnal wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi;
 - Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;
 - Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah panagihannya.
- 2.) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;
 - Penyesuaian tarif;



- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

3.) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian. Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu di perlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- a) Pengawasan dan Pengendalian Yuridis; Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
- b) Pengawasan dan Pengendalian Teknis; Pengawasan dan pengendalian teknis menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran ditempat.
- c) Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan; Pengawasan dan pengendalian ini lebih di tujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- d) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan PAD; Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah, juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat membayar pajak maupun retribusi.



b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang di laksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah

1. Pajak Hotel dan Penginapan
2. Restoran
3. Pajak Rumah Makan
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Parkir
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta disesuaikan kembali dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Dana perimbangan , yang meliputi :

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang meliputi :

- Pendapatan Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.) Target Pendapatan

Jumlah target pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango pada APBD tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 904,291,736,146.00** Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penetapan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a.) Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 59.547.484.925,00**

terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| ➤ Pajak Daerah | Rp. | 7.150.000.000,00 |
| ➤ Retribusi Daerah | Rp. | 3.039.750.000,00 |
| ➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. | 450.000.000,00 |
| ➤ Lain-Lain PAD Yang Sah | Rp. | 48.907.734.925,00 |

b.). Dana Perimbangan **Rp. 713.422.819.012,00**



terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak /
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 20.616.878.021,00
- Dana Alokasi Umum Rp. 495.957.190.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 196.848.751.000,00

3). Lain – lain Pendapatan yang Sah **Rp. 131.321.432.209,00**

terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 16.860.984.709,00
- Dana Hibah Rp. 6.242.300.000,00
- Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 3.522.000.000,00
- Dana Penyesuaian Rp. 5.000.000.000,00
- Lain – Lain PAD yg Sah Rp. 99.696.147.500,00

2.) Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada APBD tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar **Rp. 875.639.023.436,00** atau mencapai **96,83 %** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 904.291.736. 146,00** seperti terlihat pada Tabel. 1 berikut ini :

Tabel. 3.1

**Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		TARGET	REALISASI	%
		2016		
1	PAD :	59.547.484.925,00	62.673.301.624,41	105,25
	Pajak Daerah	7.150.000.000,00	6.956.341.302,00	97,29
	Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	1.875.914.737,00	61,71
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	515.533.098,00	114,56
	Lain - Lain PAD yang Sah	48.907.734.925,00	53.325.512.487,41	109,03
2	Dana Perimbangan :	713.422.819.012,00	679.378.911.420,00	95,23
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan	20.616.878.012,00	17.965.540.658,00	87,14





	Pajak			
	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	495.957.190.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	196.848.751.000,00	165.456.180.762,00	84,05
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah :	131.321.432.209,00	133.586.810.393,00	101,73
	Pendapatan HIBAH	6.242.300.000,00	13.000.000.000,00	208,26
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya	16.860.984.709,00	16.502.474.943,00	97,87
	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.522.000.000,00	2.213.588.500,00	62,85
	Lain - Lain PAD yang Sah	99.696.147.500,00	96.870.746.950,00	97,17
	Jumlah	904,291,736,146.00	875.639.023.436,00	96.83

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi jenis-jenis Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar **Rp. 62.673.301.624,41** atau mencapai **105,25 %** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 59.547.484.925,00** dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 6.956.341.302,00 atau 97,29% dari target pendapatan pajak daerah pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 7.150.000.000,00.
- Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.875.914.737,00 atau 61,71% dari target pendapatan retribusi daerah pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 3.039.750.000,00.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 515.533.098,00 atau 114,56 % dari target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,00.
- Lain-Lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 53.325.512.487,41 atau 109,03 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 48.907.734.925,00

Sedangkan penerimaan pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2016 yang berasal dari dana perimbangan terealisasi sebesar **Rp. 679.378.911.420,00** atau tercapai sebesar **95.23 %**



dari target transfer sebesar **Rp. 713.422.819.012,00** dengan rincian jenis-jenis dana perimbangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak terealisasi sebesar Rp. 17.965.540.658,00 atau sebesar 87,14 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 20.616.878.021,00.
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp. 495.957.190.000,00 atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pendapatan Dana Alokasi Umum pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 495.957.190.000,00.
- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp. 165.456.180.762,00. atau sebesar 84,05 %, sesuai dengan target pendapatan dana alokasi khusus pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 196.848.751.000,00.

Kontribusi terhadap pendapatan daerah selain berasal dari PAD dan Dana perimbangan, juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar **Rp. 133.586.810.393,00** atau sebesar **101,73 %**, sesuai dengan target pada APBD tahun 2016 sebesar **Rp. 131.321.432.209,00** dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Hibah terealisasi Rp. 13.000.000.000,00 atau sebesar 208,26 % dari target pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 6.242.300.000,00.
- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 16.502.474.943,00 atau sebesar 97,87 % dari target pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 16.860.984.709,00.
- c. Dana Penyesuaian terealisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 2.213.588.500,00 atau sebesar 62,85 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 3.522.000.000,00.
- e. Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp. 96.870.746.950,00 atau sebesar 97,17 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 99.696.147.500,00.

Berikut dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik dibawah ini.

Grafik III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango

3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terdapat beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- 1). Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi masih kurang;
- 2). Kurang optimalnya penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD;
- 3). fektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- 4). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya masih kurang;

Solusi :



- 1). dalam mempertahankan tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
 - 2). Penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD, perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
 - 3). Perlu ditingkatkan upaya mengefektifkan pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
 - 4). Perlu dioptimalkan upaya pembinaan dalam meningkatkan kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
 - 5). Perlu upaya yang serius dalam meningkatkan pemahaman serta Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga sadar pajak
- b. Dana Perimbangan
- Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan strategi dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya;

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.



1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dipetakan berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan daerah dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



- d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi bidang pendidikan.
- e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Target Belanja

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango APBD tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp. 940.107.234.391.76** yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang secara garis besar anggaran belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 547.042.159.407.95** yang terdiri dari berbagai jenis belanja, yaitu :

Belanja Pegawai	Rp. 378.057.647.405'95
Belanja Hibah	Rp. 8.7564.000'00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.441.208.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 149.036.904.002,00
Belanja Tidak Terduga	Rp. 750.000.000,00

2) Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 393.065.074.983.81 yang terdiri dari berbagai jenis belanja, yaitu :

Belanja Pegawai	Rp. 51.836.377.158,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 142.022.096.189,81
Belanja Modal	Rp. 199.206.601.636,00



b. Realisasi Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 terealisasi sebesar **Rp. 844.697.822.533.00** atau sekitar **89.85 %**, dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 940.107.234.391.76** berikut gambaran realisasi anggaran seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel III.2
Rekapitulasi Belanja Daerah
Tahun 2016

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung		547,042,159,407.95	502,322,816,320.00	91.83
-	Belanja Pegawai	378,057,647,405.95	339,624,790,476.00	89.83
-	Belanja Hibah	8,756,400,000.00	4,583,600,000.00	52.35
-	Belanja Bantuan Sosial	10,441,208,000.00	10,012,337,000.00	95.89
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	149,036,904,002.00	147,794,226,290.00	99.17
-	Bantuan Keuangan			
-	Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	307,862,554.00	41.05
Belanja Langsung		393,065,074,983.81	342,375,006,213.00	87.10
-	Belanja Pegawai	51,836,377,158.00	50,369,955,082.00	97.17
-	Belanja Barang dan Jasa	142,022,096,189.81	132,594,150,650.00	93.36
-	Belanja Modal	199,206,601,636.00	159,410,900,481.00	80.02
TOTAL		940,107,234,391.76	844,697,822,533.00	89.85

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango sebelum di audit

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

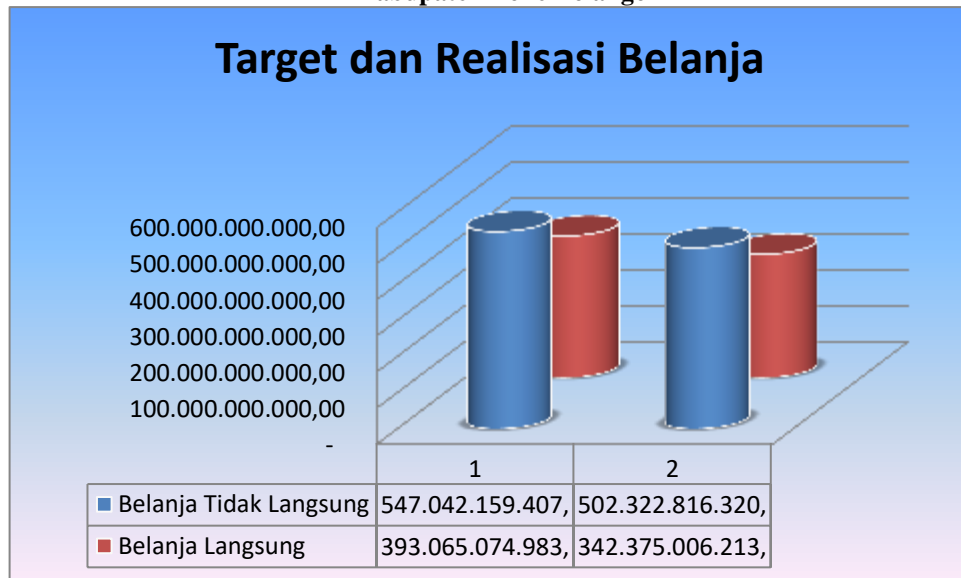


- 1) Anggaran yang ditetapkan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 547.042.159.407,95 terealisasi sebesar Rp. 502.322.816.320,00 atau mencapai 91.83 %, yang terdiri dari :
 - Anggaran yang ditetapkan belanja pegawai sebesar Rp. 378.057.647.405,95 terealisasi sebesar Rp. 339.624.790.476,00 atau mencapai 89.83 % ;
 - Anggaran yang ditetapkan belanja hibah sebesar Rp. 8.756.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.583.600.000,00 atau mencapai 52.35 % ;
 - Anggaran yang ditetapkan belanja bantuan social Rp. 10.441.208.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.012.337.000,00 atau mencapai 95.89 %;
 - Anggaran yang ditetapkan Bantuan Keuan9an Rp. 149.036.904.002,00 terealisasi sebesar Rp. 147.794.226.290,00 atau mencapai 99.17 %
 - Anggaran yang ditetapkan belanja tidak terduga sebesar Rp. 750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 307.862.554,00 atau mencapai 41.05 %;
- 3) Anggaran yang ditetapkan Belanja Langsung sebesar Rp. 393.065.074.983.81 terealisasi sebesar Rp. 342.375.006.213,00 atau sebesar 87.10 %; terdiri dari :
 - Anggaran yang ditetapkan Belanja Pegawai sebesar Rp. 51.836.377.158,00 terealisasi sebesar Rp. 50.369.955.082.00 atau sebesar 97.17 %;
 - Anggaran yang ditetapkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 142.022.096.189,81 terealisasi sebesar Rp. 132.594.150.650.00 atau sebesar 93.36 % ;
 - Anggaran yang ditetapkan Belanja Modal sebesar Rp. 199.206.601.636,00 terealisasi sebesar Rp. 159.410.900.481,00 atau sebesar 80.02 %

Berikut komposisi Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dapat digambarkan dalam grafik III. 2 target dan realisasi belanja sebagaimana dibawah ini :



Grafik III. 2
Target dan Realisasi Belanja
Kabupaten Bone Bolango



Belanja sebagaimana yang dijelaskan di atas, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang jika dilihat dari komposisinya masih dinilai cukup baik. Untuk tahun 2016, komposisi belanja tidak langsung sebesar 58 % dan belanja langsung sebesar 42 %, dapat dilihat pada gambar III.3 sebagaimana berikut :

Gambar III. 3
Prosentasi Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Bone Bolango





3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan utama Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 yang dihadapi adalah :

- 1). Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan luasnya wilayah pembangunan yang berdampak kurang optimalnya penataan pembangunan daerah serta kurangnya ketersediaan prasarana teknologi dan tenaga-tenaga ahli yang menunjang pembangunan.
- 2). kurangnya sinergi pembangunan antara sektor, khususnya dengan sektor pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan daerah.
- 4). Belum tersedianya data base yang akurat dan informasi investasi yang terbatas mengenai potensi sumber daya alam, khususnya hasil kajian para ahli, sehingga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada tidak dapat dioptimalkan.
- 6). Tingkat pelayanan, baik tenaga, dana maupun peralatan yang ada masih belum memadai dibandingkan dengan sasaran dan luas wilayah pelayanan.
- 7). Kurangnya promosi, khususnya di luar Kabupaten Bone Bolango mengenai potensi pariwisata, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang merupakan potensi unggulan;
- 8). Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sarana publik lainnya yang representatif;

b. Solusi

Upaya - upaya Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016, di antaranya melalui :

- 1) Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta Infrastruktur dasar;
- 2) Melakukan penekanan terhadap biaya-biaya overhead, agar dapat dialihkan kepada kegiatan-kegiatan prioritas;
- 3) Disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran



penggunaan anggaran;

- 4) Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (added value) bagi pendapatan daerah;

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Tabel III.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

No	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42,815,498,245.76	42,815,498,245.76	100
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42,815,498,245.76	42,815,498,245.76	100
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	100
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	100
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	(66,756,699,150.17)	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	(66,756,699,150.17)	

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango sebelum di audit

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 42.815.498.245,76 merupakan Penerimaan Pembiayaan dari Akumulasi SiLPA Tahun 2015 dengan realisasi Rp. 42.815.498.245,76.

Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, pada tahun 2014 dianggarkan



sebesar Rp.6.500.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.500.000.000,00 atau 115,38%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini, dipergunakan untuk:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulut | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Bone Bolango | Rp. 6.000.000.000,00 |



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango, pelaksanaan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan capaian kinerja hasil dan kinerja output serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci capaian kinerja hasil dan output selang tahun 2016 sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pendidikan

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Kebijakan nasional pembangunan difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, dengan maksud mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selain difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, juga difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merupakan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.



Guna mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah Peningkatan mutu layanan pendidikan guna meningkatnya angka partisipasi pendidikan dan peningkatan mutu lulusan pada semua jenjang pendidikan, perbaikan angka melek huruf, dan capaian prestasi bidang pendidikan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Pendidikan pada tahun 2016-2021 ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, 1 (satu) UPT dan 1 (satu) kecamatan yaitu Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Kecamatan Tilongkabila. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pendidikan telah dianggarkan Tahun 2016-2020 sebesar Rp. 151.975.330.941 dimana pada tahun 2016 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 20.764.917.500 dan tahun 2017 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 27.027.507.392. Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Program pendidikan anak usia dini, dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini selama tahun 2016-2020

dan rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.1
Capaian Kinerja Output Program Pendidikan Anak Usia Dini*

NO	Kegiatan	Sat	Tahun 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tot al
1	Pembangunan PAUD	Unit	-	-	N/A	N/A	N/A	-
2	Kelompok Paud yang dibina	Klpk	149	N/A	N/A	N/A	N/A	149
3	Pengadaan Alat Peraga Edukatif	Unit	-	-	N/A	N/A	N/A	-

Adapun kegiatan penunjang program selang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Insentif Penilik, Tenaga Pendidik PAUD dan Pengelola PAUD dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 225.000.000



Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dengan realisasi anggaran Rp. 85.738.000
2. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dengan anggaran Rp. 106.350.000

2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 dan rencana kegiatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.2
Capaian Kinerja Output Peningkatan Sarana
dan prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*

NO	Kegiatan	Satuan	Tahun 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Total
1	Pembangunan RKB SDN	Unit	12	1	N/A	N/A	N/A	13
2	Pembangunan RKB SMPN	Unit	-	-	N/A	N/A	N/A	-
3	Rehabilitasi Bangunan SDN	Ruang	55	29	N/A	N/A	N/A	84
4	Rehabilitasi Bangunan SMPN	Ruang	-	7	N/A	N/A	N/A	7
5	Pembangunan Perpustakaan SDN	Unit	-	-	N/A	N/A	N/A	-
6	Pembangunan Perpustakaan SMPN	Unit	-	-	N/A	N/A	N/A	-
8	Pembangunan Laboratorium SMPN	Unit	-	3	N/A	N/A	N/A	3
10	Pengadaan Alat Peraga SD	Paket	11	9	N/A	N/A	N/A	20
12	Pengadaan Alat Laboratorium SMPN	Set	N/A	6	N/A	N/A	N/A	6

Adapun kegiatan penunjang lainnya untuk menunjang program tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Jasa perencanaan (DED) Pembangunan RKB sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000
2. Jasa perencanaan (DED) Rehabilitasi sekolah sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000
3. Jasa pengawasan Pembangunan RKB sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran teralisasi sebesar Rp. 50.000.000



4. Jasa pengawasan Rehabilitasi sekolah sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran teralisasi sebesar Rp. 30.000.000
5. Kegiatan pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa dengan berbagai jenis lomba Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 178.472.500
6. Pelaksanaan ujian Akhir (UAS) SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.399.500
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.270.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak 27 paket dengan anggaran Rp. 1.308.821.000
2. Pengadaan Peralatan pendidikan SD sebanyak paket 11 dengan anggaran Rp. 600.048.200
3. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar dengan realisasi anggaran Rp. 69.096.000
4. Penyelenggaraan Paket A dengan anggaran sebesar Rp.29.450.000
5. Penyelenggaraan Paket B dengan anggaran sebesar Rp. 29.330.000

3) Program pendidikan menengah

Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 155.236.000
2. Penyelenggaraan paket C setara SMU dengan anggaran Rp. 29.750.000
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran Rp. 54.785.000
4. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional dengan realisasi anggaran Rp. 12.485.000

4) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Gita Bahana Nusantara dengan realisasi anggaran Rp. 32.442.500

5) Program pendidikan non formal

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan non formal yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal sebanyak 2 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.255.000



2. Pelaksanaan Kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup dengan realisasi anggaran Rp. 50.000.000
- 6) **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :
 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.065.000
 2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.420.000
 3. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi dengan realisasi anggaran Rp. 93.902.500
- 7) **Program manajemen pelayanan pendidikan**
Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 antara lain :
 1. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dengan realisasi anggaran Rp. 60.374.500
 2. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dengan realisasi anggaran Rp. 121.137.735
 3. Pelaksanaan kegiatan Wokshop pemanfaatan aplikasi pendataan pendidikan dasar dan menengah dan penyusunan profil pendidikan tahun pelajaran 2016/2017 dengan anggaran Rp. 97.140.000
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran Rp. 73.270.000

b. Capaian Kinerja dari pelaksanaan program

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan pada urusan pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- Jika dilihat dari perkembangan angka melek huruf pada tahun 2016 ini terjadi peningkatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

*Tabel 4.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan*

NO	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis			85.596
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas			86.552
3	Angka melek huruf	0,965	0,98	0,98

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango



- Sedangkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, tetapi tidak dengan APS SMP/MTs.
- Kondisi ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, demikian pula untuk SMP/MTs
- Meningkatnya kualitas bangunan sekolah serta tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai dapat mewujudkan suasana yang nyaman bagi siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar.
- Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, melalui workshop dan pembinaan guru lewat forum KKG/MGMP;
- Meningkatnya kualitas perencanaan program pendidikan, melalui rapat koordinasi awal tahun pelajaran;
- Terpetakannya kondisi kapasitas dan kompetensi guru bersertifikat;
- Meningkatnya pemahaman aturan dan regulasi pendidikan, melalui sosialisasi dan advokasi peraturan dan regulasi pendidikan;
- Untuk capaian indikator kinerja bidang pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Capaian Kinerja APM, APK dan APS

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015	Capaian Kinerja 2016
ANGKA PARTISIPASI MURNI				
1	SD/MI/Paket A	79,82%	87,23%	75,56%
2.	SMP/MTs/Paket B	55,11 %	52,31%	55,44%
3.	SMA/MA/Paket C	51,40 %	47,62%	52,17%
ANGKA PARTISIPASI KASAR				
1.	SD/MI/Paket A	89,22%	102,45%	97,98 %



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015	Capaian Kinerja 2016
2.	SMP/MTs/Paket B	74,80 %	81,45 %	82,27 %
3.	SMA/MA/Paket C	61,62 %	70,50 %	78,37 %
ANGKA PUTUS SEKOLAH				
1.	SD/MI/Paket A	0,37%	0,18%	0,14 %
2.	SMP/MTs/Paket B	0,79 %	0,79 %	0,16 %
3.	SMA/MA/Paket C	0,79 %	0,41 %	0,64 %
ANGKA KELULUSAN				
1.	SD/MI/Paket A	100 %	103,59 %	101,23 %
2.	SMP/MTs/Paket B	100 %	101,33 %	89,00 %
3.	SMA/MA/Paket C	100 %	98,61 %	100 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

Adapun prestasi diperoleh di bidang pendidikan adalah:

1. Juara I musik etnis
2. Juara Olympiade SMP 1 Suwawa

c. Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan

- 1) Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan SD/MI disebabkan oleh jumlah penduduk anak usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 20.358 orang yang ada di Kabupaten Bone Bolango bersekolah di luar kabupaten (sejumlah 4.772 orang lebih memilih sekolah swasta unggulan yang ada di luar Kabupaten)
- 2) APM SMP di 2015 ke 2016 turun diakibatkan minat anak untuk sekolah menurun diakibatkan akses ke sekolah jauh karena ada beberapa kecamatan yang belum ada unit sekolah

b) Solusi

Adapun yang menjadi solusi berdasarkan permasalahan diatas adalah:



- 1) Seiring dengan perkembangan pendidikan dalam menghadapi globalisasi menuntut kompetensi guru yang lebih profesional dalam mengelola proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif serta sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa lebih cenderung memilih bersekolah diwilayahnya yang bisa dijangkau, tidak mengeluarkan biaya dibandingkan bersekolah ditempat lainnya.
- 2) Optimalisasi pemberian bantuan operasional bagi siswa yang kurang mampu sehingga terhindar dari drop out.
- 3) Optimalisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan untuk melihat tingkat efektivitas pemanfaatan prasarana sekolah termasuk didalamnya unit-unit pembelajaran, alat peraga, buku-buku pelajaran, serta proses belajar mengajar sehingga terhindar dari in efektivitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah kecamatan/provinsi dalam persiapan pelaksanaan terutama mengenai penetapan lokasi pembangunan sekolah, pembebasan lahan pembangunan sekolah

TREND PENINGKATAN SARANA PENDIDIKAN KABUPATEN BONE BOLANGO

KEGIATAN	TAHUN					
	2014		2015		2016	
	VOL.	NILAI	VOL.	NILAI	VOL.	NILAI
SD						
1.Rehabilitasi sedang ruang kelas	38	2,227,104,000	2	106,900,000	26	1,886,679,000
2.Pembangunan ruang kelas baru	2	292,130,000	18	2,112,876,000	12	1,864,270,000
3.Pembangunan rumah dinas guru	2	222,200,000	-	-	-	-
4.Pembangunan ruang guru	0	-	-	-	-	1,023,680,000
		2,741,434,000		2,219,776,000		3,750,949,000
SMP						
1.Rehabilitasi sedang ruang kelas	15	742,500,000	2	90,000,000	-	-
2.Pembangunan ruang kelas baru	4	611,028,000	16	2,188,800,000	-	-
		1,353,528,000		2,278,800,000		-
SMA						
1.Rehabilitasi sedang ruang kelas	6	386,100,000	-	-	-	-
2.Pembangunan ruang kelas baru	8	1,386,000,000	6	1,050,000,000	-	-
3.Pembangunan lab IPA	2	574,200,000	-	-	-	-
		2,346,300,000		1,050,000,000		-
SMK						
1.Pembangunan ruang praktek siswa	8	-	-	-	-	-



		1,837,440,000				
2.Pembangunan ruang guru	1	229,680,000	8	1,856,000,000	-	-
3.Pembangunan lab sains	2	306,900,000	-	-	-	-
4.Pembangunan ruang kelas baru	2	314,820,000	-	-	-	-
		15,571,364,000		12,953,152,000		8,525,578,000

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango

Kesehatan

Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.76.750.000,- dan realisasi sebesar Rp Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.70.750.000,- atau 92,2% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 2) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.108.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.102.955.907,- atau 95% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Obat-Obatan, Belanja Bahan Kimia Laboratorium (Reagen),

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Revitalisasi sistem kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.1.302.934.500,- dan realisasi sebesar Rp.1.183.785.000,- atau 91% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 2) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.85.925.000,- dan realisasi sebesar Rp.85.410.000,- atau 99% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 3) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp.134.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.86.205.502,- atau 64% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Air dan Listrik;



- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.37.933.000,- dan realisasi sebesar Rp.25.479.000,- atau 67% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber;
 - 5) Peningkatan kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.660.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.660.000.000,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 - 6) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.249.992.185,- atau 99,9% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Bahan Obat-Obatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan :
- 1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan anggaran sebesar Rp.35.315.000,- dan realisasi sebesar Rp.35.047.500,- atau 99% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- d. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :**
- 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat untuk dinas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.186.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.184.736.600,- atau 99,1% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat untuk RSUD Toto Kabila dengan anggaran sebesar Rp.59.656.000,- dan realisasi sebesar Rp.51.460.000,- atau 86% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak, Belanja Sosialisasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya,



Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat untuk RSUD Tpmbulilato dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.000.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak;

- 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan anggaran sebesar Rp.50.417.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.417.000,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Narasumber;
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.34.895.000,- dan realisasi sebesar Rp.34.680.000,- atau 99,4% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.92.873.000,- dan realisasi sebesar Rp.92.025.966,- atau 99,1%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Belanja Listrik, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien Rumah Sakit, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.34.895.000,- dan realisasi sebesar Rp.34.837.500,- atau 99,8%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan :

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.138.279.800,- dan realisasi sebesar Rp.83.530.000,- atau 60% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Bahan Kimia Laboratorium (Reagen),



Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan anggaran sebesar Rp.13.680.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.048.000,- atau 30%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian;

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan kegiatan :

- 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dengan anggaran sebesar Rp.58.057.000,- dan realisasi sebesar Rp.58.057.000,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
- 2) Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik dengan anggaran sebesar Rp.45.172.500,- dan realisasi sebesar Rp.45.020.000,- atau 99,7%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.51.785.000,- dan realisasi sebesar Rp.51.723.750,- atau 99,9%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Penggandaan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :

- 1) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.57.873.000,- dan realisasi sebesar Rp.54.873.000,- atau 95%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Narasumber
- 2) Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.16.590.000,- dan realisasi sebesar Rp.16.590.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak



- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.34.860.000,- dan realisasi sebesar Rp.33.810.000,- atau 97%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - 4) Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp.449.980.000,- dan realisasi sebesar Rp.358.025.410,- atau 80%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;
- i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, dengan kegiatan :**
- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.1.066.901.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.046.905.050,- atau 98%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan;
 - 2) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dengan anggaran sebesar Rp.957.385.000,- dan realisasi sebesar Rp.932.941.000,- atau 97% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan;
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.8.798.412.000,- dan realisasi sebesar Rp.7.884.227.434,- atau 90%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan;



- 4) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.4.818.190.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.850.928.550,- atau 80%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan;
- 5) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.19.705.770,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.25.811.281,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%

j. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan kegiatan :

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.35.315.000,- dan realisasi sebesar Rp.35.257.500,- atau 99,8%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

h. Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik), dengan kegiatan :

- 1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan anggaran sebesar Rp.5.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.467.741.400,- atau 87%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien Rumah Sakit, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer;
- 2) Akreditasi Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.411.880.000,- dan realisasi sebesar Rp.354.620.000,- atau 86,1%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;



- 3) Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dengan anggaran sebesar Rp.494.230.000,- dan realisasi sebesar Rp.97.083.351,- atau 20%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Ruang/Kamar Penginapan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien Rumah Sakit, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, dengan kegiatan :**
 - 1) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) dengan anggaran sebesar Rp.149.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.149.700.000,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
 - 2) Pengadaan ambulance/mobil jenazah dengan anggaran sebesar Rp.285.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.285.000.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
 - 3) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.7.085.039.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.998.719.700,- atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan;
 - 4) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.232.465.017,- dan realisasi sebesar Rp.232.465.017,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan;
 - 5) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.4.455.748.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.455.709.669,- atau 99,9%,



- Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum;
- 6) Pembangunan rumah sakit (Bantuan Khusus Provinsi) dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.035.495.600,- atau 68%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan;
 - 7) Pembangunan rumah sakit (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.240.897.010,- dan realisasi sebesar Rp.240.897.010,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi;
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit untuk RSUD Toto Kabila dengan anggaran sebesar Rp.601.667.000,- dan realisasi sebesar Rp.599.472.000,- atau 99,6%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor, Belanja Jasa Cleaning Service, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas,
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit untuk RSUD Tombulilato dengan anggaran sebesar Rp.72.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.72.000.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Cleaning Service
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dengan anggaran sebesar Rp.182.726.000,- dan realisasi sebesar Rp.179.670.117,- atau 98%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas;
 - 11) Rehabilitasi bangunan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.79.500.000,- atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;
 - 12) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp.77.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.498.561,- atau 98%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Persediaan Makanan Pokok,



- 13) Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (Lanjutan DAK 2015) dengan anggaran sebesar Rp.192.738.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%;
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp.5.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.250.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;

j. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan :

- 1) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic untuk RSUD Toto Kabila dengan anggaran sebesar Rp.575.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.557.214.191,- atau 97%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
- 2) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic untuk RSUD Tombulilato dengan anggaran sebesar Rp.1.150.920.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.148.211.640,- atau 99,8%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Persediaan Makanan Pokok, Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 3) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.412.768.847,- atau 57%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Uang Lembur PNS, Uang Lembur Non PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Bahan Obat-Obatan, Belanja Bahan Kimia Laboratorium (Reagen), Belanja Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien Rumah Sakit, Belanja Perjalanan



Dinas Luar Daerah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;

k. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan :

1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan anggaran sebesar Rp.22.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.22.150.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Narasumber;

l. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan :

1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan anggaran sebesar Rp.155.205.000,- dan realisasi sebesar Rp.154.588.800,- atau 99,6%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Listrik, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber, Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga;



m. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan kegiatan :

- 1) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan anggaran sebesar Rp.19.265.000,- dan realisasi sebesar Rp.19.265.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Narasumber, Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga;

n. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp.135.221.000,- dan realisasi sebesar Rp.134.476.900,- atau 99,5%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah,
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.1.383.498.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.218.843.600,- atau 88,1%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin -



- Pengadaan Peralatan Studio Visual, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
- 3) Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp.534.900.000,- dan realisasi sebesar Rp.464.461.400,- atau 87%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Narasumber;
 - 4) Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Lanjutan 2015) dengan anggaran sebesar Rp.42.922.000,- dan realisasi sebesar Rp.42.812.000,- atau 99,7%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;

o. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan kegiatan :

- 1) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan anggaran sebesar Rp.46.175.000,- dan realisasi sebesar Rp.44.917.500,- atau 97%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber;
- 2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dengan anggaran sebesar Rp.47.709.000,- dan realisasi sebesar Rp.47.709.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta



- Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;
- 3) Pembinaan organisasi perempuan dengan anggaran sebesar Rp.76.280.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.280.000,- atau 97,4%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak, Belanja Cetak, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;
 - 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.28.820.000,- dan realisasi sebesar Rp.27.217.000,- atau 94%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

p. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan:

- 1) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.500.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat;
- 2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dengan anggaran sebesar Rp.26.502.000,- dan realisasi sebesar Rp.26.502.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis,



Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;

- 3) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp.111.104.000,- dan realisasi sebesar Rp.111.097.000,- atau 99,9% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber;

q. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :

- 1) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan anggaran sebesar Rp.70.549.950,- dan realisasi sebesar Rp.66.945.000,- atau 95%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber, Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.23.557.000,- dan realisasi sebesar Rp.23.557.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;



Capaian Kinerja dari pelaksanaan program

KINERJA KESEHATAN

DATA ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN, ANGKA KEMATIAN BAYI (MORTALITAS) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2014 - 2016

URAIAN	TAHUN		
	2014	2015	2016
ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	157	374	318
ANGKA KEMATIAN BAYI (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	14	14	16
ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	1,97	5	1
PRAVALENSI GIZI BURUK	0,45%	0,50 %	0,55 %
CAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE UNTUK JAMINAN KESEHATAN BAGI SELURUH RAKYAT (TAHUN 2013-2016)	100%		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang didanai oleh DAU yang tidak mencapai target realisasi, seperti pengadaan incinerator yang telah dianggarkan melalui DPAP-SKPD Dinas Kesehatan, tidak bisa direalisasikan karena berbenturan dengan aturan yang ada.
- 2) Masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang didanai oleh DAK non fisik yang tidak mencapai target realisasi, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terhambat karena proses pencairan dana transferan DAK, dan Jaminan Persalinan yang penyerapan anggarannya tidak maksimal dikarenakan Pemanfaatan RTK dan rujukan persalinan bagi mereka yang tidak memiliki jaminan tidak dimanfaatkan secara optimal.

b. Solusi

- 1) Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi perihal segala aturan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa baik bersumber DAU maupun DAK.
- 2) Memberi bimbingan kepada Puskesmas selaku pelaksana kegiatan BOK dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pemanfaatan



dana, yang kemudian mempengaruhi mekanisme pencairan dana transferan, mengingat BOK adalah dana alokasi khusus (DAK) .

- 3) Sehubungan dengan pemanfaatan JAMPERSAL dalam hal ini rumah tunggu kelahiran (RTK) oleh masyarakat maka pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan.

Sosial

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 343.404.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 288,888,571 atau 84,12 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembayaran Rekening Telepon, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan jumlah belanja administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.205.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.755.100,- atau 97,34 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten dan provinsi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten dan provinsi.
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan jumlah koordinasi/konsultasi yang ikuti dan dapat dipertanggungjawabkan;



Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	343.404.300	288,888,571	54.515.729	Jumlah belanja administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	205.220.000	199,755,100	5,464,900	Jumlah Kegiatan Koordinasi/konsultasi program kegiatan yang diikuti	12 bulan
		548.624.300	488.643.671	59.980.629		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.195.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.150.355.498,- atau 77,11 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 6 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 6 operasional dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 6 operasional dan kendaraan roda 2, mesin genset, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik.
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.94.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.94.255.100,- atau 99,90 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor, Pengadaan mesin pendingin ruangan, Pengadaan laptop, Pengadaan printer, Pengadaan kursi kerja, Pengadaan camera digital, Pengadaan handy talkie, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat dan terpenuhinya seragam dinas bagi ASN.



Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	195.000.000	150.355.498	44.644.502	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg dapat beroperasi dengan baik	12 bulan
2	Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	94.350.000	94.255.100	94.900	Jumlah peralatan kantor yg diadakan dan dipelihara	12 bulan
		289.350.000	244.610.598	44.739.402		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.437.750,- atau 99,64 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	17.500.000	17.437.750	62.250	Jumlah Pegawai yg memiliki pakaian seragam	49 orang
		17.500.000	17.437.750	62.250		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.65.213.817,- dan terealisasi Rp.63.718.817,- atau 97,71 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai



pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	65.213.817	63.718.817	1.495.000	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimtek	3 orang
		17.500.000	17.437.750	62.250		

e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

- 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya sebesar Rp.105.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp.104.355.000,- atau 98,86 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Bimbingan teknis/sosialisasi LK3, Bimbingan teknis/sosialisasi TKSK, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta bimtek/sosialisasi LK3 dan TKSK meningkat.
- 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin sebesar Rp. 517.204.313,- dan terealisasi sebesar Rp.479.784.000,- atau 92,76 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek bagi calon peneriman bantuan KUBE, Bantuan KUBE, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi kube fakir miskin meningkat;

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir	105.555.000	104.355.000	1.200.000	Jumlah peserta bimbingan/sosialisasi program LK3 Honorarium TKSK	20 orang 18 orang



	miskin, KAT dan PMKS lainnya					
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin	517.204.313	479.784.000	37.420.313	Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi kube fakir miskin	8 paket
		622.759.313	584.139.000	38.620.313		

f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

- 1) Kegiatan Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi peyandang cacat dan lansia dengan anggaran sebesar Rp.354.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.339.790.000,- atau 95,88 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Bantuan UEP lanjut usia, Bantuan UEP anak cacat, Bantuan anak yatim, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah bimbingan sosial bagi lanjut usia, penyandang cacat dan anak berkebutuhan khusus, UEP lanjut usia yang masih potensial dan tidak potensial, UEP anak cacat, bantuan anak yatim;
 - 2) Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan anggaran sebesar Rp.9.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.370.000,- atau 100 %,Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah bimbingan teknis tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya bimtek tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan menurunnya angka pengguna narkoba;
- b. Kegiatan Penanganan masalah-masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan anggaran sebesar Rp.184.035.000,- dan realisasi sebesar Rp.183.994.600,- atau 99,98 %

Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang pembentukan kampung siaga bencana (KSB) dan bantuan bahan makanan pada saat terjadi bencana.



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terbentuknya kampung siaga bencana (KSB) dan masyarakat yang terkena musibah mendapatkan bantuan.

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi peyandang cacat dan lansia	354.380.000	339.790.000	14.590.000	Jumlah bimbingan sosial bagi lanjut usia, penyandang cacat dan anak berkebutuhan khusus, UEP lanjut usia yang masih potensial dan tidak potensial, UEP anak cacat, bantuan anak yatim	20 orang
2	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	9.370.000	9.370.000	0	Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	20 orang
3	Penanganan masalah-masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	184.035.000	183.994.600	40.400	Sosialisasi pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan sosialisasi/regulasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional	100 persen
		547.785.000	533.154.600	14.630.400		

g. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Kelembagaan Sosial.

- 1) Kegiatan Peningkatan Peran aktif masyarakat dan Dunia usaha dengan anggaran sebesar Rp.82.154.750,- dan terealisasi sebesar Rp.81.214.750,- atau 98,86 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Bimbingan teknis/sosialisasi bagi karang taruna, Bantuan UEP, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah karang taruna yang diberdayakan meningkat;
- 2) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.8.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.390.000,- atau 100



%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi WKSBM, Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi organisasi sosial.

- 3) Kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 18.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.540.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah hari pahlawan, Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan hari pahlawan.

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan Dunia usaha	82.154.750	81.214.750	940.000	Jumlah peserta Sosialisasi/bimtek dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda melalui pemberdayaan sosial	20 orang
2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	8.390.000	8.390.000	0	Presentase terwujudnya kesejahteraan sosial bagi organisasi sosial	100 persen
3	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	18.540.000	18.540.000	0	terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan hari pahlawan	1 kegiatan
		109.084.750	109.084.750	950.000		

j. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Kegiatan Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan dengan anggaran sebesar Rp.70.270.200,- dan terealisasi sebesar Rp.65.309.000,- atau 92,94 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan ekonomi melalui kelompok ternak sapi bali, Hasil yang diharapkan terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi;
- 2) Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 479.672.000,- dan terealisasi sebesar Rp.408.375.150,- atau 85,14 %, Kegiatan yang



dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana bagi transmigran, Hasil yang diharapkan jumlah sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi yang dibangun meningkat;

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	70.270.200	65.309.000	4.961.200	terlaksana pengembangan sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi	100 persen
2	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	479.672.000	408.375.150	71.296.850	jumlah sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi	8 paket
		549.942.200	473.684.150	76.258.050		

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih belum optimalnya fungsi pelayanan sosial.
- 2) Kurangnya bimbingan/sosialisasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan agar dapat bisa mandiri sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana ekonomi dan sosial bagi masyarakat transmigran.

b. Solusi

- 4) Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan peningkatan pelayanan baik perlindungan sosial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 5) Memberikan sosialisasi berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada masyarakat berupa sarana usaha dan membentuk kelompok usaha produktif.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana bagi transmigran berupa sarana air bersih, MCK, Jalan, genset dan lain sebagainya.



Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Penyediaan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Rp. 372.771.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 362.694.830,- atau 97,30% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut Sub Kegiatan Honorarium PNSD dan Non PNSD Rp. 138.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 136.290.000,-, Sub Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Rp. 234.731.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 226.404.830,-
- 1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Rp. 576.043.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 575.754.075,- atau 99,95% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 378.623.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 378.339.075,- Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 197.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.415.000;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.700.000,- atau 99,57% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Penataan Halaman Kantor Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.700.000,-
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.710.000,- atau 93,55% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Roda Dua Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.710.000,-
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 87.082.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.825.485,- atau 99,71% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Belanja Jasa Service Rp. 15.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.250.000,- Sub Kegiatan Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 25.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.500.000,- Sub



Kegiatan Belanja Bahan Bakar minyak/gas pelumas Rp. 46.332.000,- dengan realisasi sebesar Rp.46.075.485,-

- 4) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 218.355.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 211.106.700,- atau 96,68% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor Rp. 50.755.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.580.000,- Sub Kegiatan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 37.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.422.000,- Sub Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Meubelir Rp. 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.000.000,- Sub Kegiatan Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 32.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.257.200,- Sub Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Rp. 29.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.847.500,- Sub Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Rp. 33.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,-

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakainan Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lainnya Rp. 41.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.345.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga Rp. 16.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.050.000,- Sub Kegiatan Pakain Seragam PKK dan Baju Olah Raga Rp. 25.295.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.295.000,-

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 35.321.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.173.500,- atau 99,58% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Belanja Bimbingan Teknis Rp. 35.321.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.173.500,-

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 17.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.410.000,- atau 99,77%;



- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 2.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.150.000,- atau 100%.

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Rp. 269.612.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 269.569.300,- atau 99,98% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rp. 147.680.000,- dengan realisasi Rp. 147.569.300,- Sub Kegiatan Bimtek Barang dan Jasa Desa Rp. 121.932.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.890.300,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Rp. 361.861.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 161.860.300,- atau 44,73% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Pengumpulan/Penginputan Data Profil Desa/Kelurahan Rp. 57.730.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.730.000,- Sub Kegiatan Pengumpulan/Penginputan Data Sistem Informasi Posyandu (SIP Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- Sub Kegiatan Pembentukan Komite Standar Pelatihan Masyarakat Desa/Kelurahan Rp. 74.131.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.130.300,- Sub Kegiatan Pembuatan Peta Desa Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (Tidak Terlaksana)
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Rp. 270.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 268.366.000,- atau 99,07% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Lomba TTG Tingkat Kabupaten /Nasional Rp. 90.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.400.000,- Sub Kegiatan Pencanaan BBGRM Tkt. Kabupaten /Nasional Rp. 179.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.966.000,-
- 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 124.093.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.038.000,- atau 98,34% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Raskin Rp. 103.890.000,- Sub Kegiatan Rakor Kegiatan PKK Rp. 18.148.000;



e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- 1) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rp. 86.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.550.000,- atau 97,20% Sub Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Manajemen BUMDES Rp. 86.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.550.000,-

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- 1) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 310.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 302.033.500,- Sub Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Sarana dan Prasarana Desa Rp. 168.130.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 161.030.000,- Sub Kegiatan Sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Desa Rp. 12.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.700.000,-
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Rp. 24.220.000,- dengan realisasi sebesar 23.940.000,- atau 98,94%;

g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- 1) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 182.291.400 dengan realisasi sebesar Rp. 295.699.400,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Bimtek SIMDA Desa dengan jumlah peserta yang ditargetkan 165 desa dengan realisasi 165 Desa dan target anggaran Rp. 105.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.499.400,- Sub Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dengan peserta yang ditarget sebanyak 165 desa dengan target Rp. 24.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.050.000,- Sub Kegiatan Sosialisasi APBD Desa Rp. 166.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.150.000,-
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 184.835.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 175.490.000,- atau 93,37% dengan rincian sebagai berikut Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemerintah Desa Rp. 140.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 131.540.000,- Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 43.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.950.000,- Capaian kinerja atas



pengembangan ekonomi desa melalui kegiatan penguatan kelembagaan BUMdes dengan target sebanyak 32Desa dari 165 Desa dengan prosentase 20% dengan realisasi sebanyak 32 desa dengan prosentase sebesar 20%; Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut,

- 3) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa telah melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan aparatur desa dibidang pemerintahan dan keuangan yang ditargetkan 165 desa dengan realisasi 165 desa atau prosentase kinerja sebesar 100%;
- 4) Upaya meningkatkan status desa berdasarkan kategori Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada dimana pada tahun 2016 ditargetkan desa Swadaya berjumlah 128 desa atau prosentase sebesar 80% dengan realisasi 149 desa dengan prosentase sebesar 93,2% , target desa Swakarya berjumlah 27 desa atau prosentase sebesar 16,8% dengan realisasi 9 desa dengan prosentase sebesar 5,6% , sedang target desa Swasembada berjumlah 5 desa atau prosentase sebesar 3% dengan realisasi sebesar 2 desa dengan prosentase 1,2%.;
- 5) Dalam rangka pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan terutama Tim Penggerak PKK dimana pada tahun 2016 ditargetkan PKK tingkat Desa yang aktif sebesar 165 desadengan realisasi sebesar 165 desa dengan prosentase 100% dan Posyandu aktif yang ditargetkan sebesar 165 desa dengan realisasi sebesar 206 Posyandu dengan prosentase 125%.;

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Adanya perubahan tentang regulasi pemerintahan desa yang menyangkut tentang pilkades, perencanaan pembangunan desa, monitoring pertanggungjawaban APBdes dan penyusunan pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan kepala desa.
- 2) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa.
- 3) Masih adanya beberapa desa yang belum memahami seluk beluk desa sehingga belum bisa menetapkan potensi desa.



b. Solusi

- 1) Penguatan kembali pada kegiatan kapasitas aparatur desa khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, APBdesa, RKP desa, LKPJ desa.
- 2) Pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa.
- 3) Kegiatan penyusunan dokumen potensi desa dan kawasan perdesaan sebagai acuan dalam pendirian BUMdes dan BUMdes bersama;

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.043.021.875 dan terealisasi sebesar Rp. 1.013.010.875 atau 97,12%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan
- Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
- Pengadaan Alat Tulis Kantor
- Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik
- Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Pembayaran Rekening Telepon
- Pembayaran Rekening Air
- Pembayaran Rekening Listrik
- Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah
- Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel
- Biaya Cetak
- Biaya Penggandaan
- Biaya Makanan dan Minuman Rapat
- Pengadaan Buku Peraturan Pedrundang-undangan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.



- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.204.015`000 dan terealisasi sebesar Rp.202.772.457 atau 99,39 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah kabupaten.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.193.644.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.187.693.500,00 atau 96.93 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.113.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.111.221.000,00 atau 98,22 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :Pengadaan Sepeda Motor , Pengadaan Absen Sidik Jari, Pengadaan AC, Pengadaan Notebook / Laptop, Pengadaan Printer , Pengadaan LCD, Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PU

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.52.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.685.000,00 atau 99,86 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pengadaan Pakaian Olah Raga.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata Disiplin pegawai meningkat.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.66.205.000,00 dan terealisasi Rp.65.495.300,00 atau 98.93 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev, Bimtek Jabatan Fungsional Tertentu, Bimtek Penyusunan LPPD Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.162.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.162.468.650,00 atau 99.74%

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Laporan LPPD, Penyusunan Laporan LKIP, Penyusunan Laporan Renja , Penyusunan Laporan RKA dan Penyusunan Laporan PPHP

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan kinerja pemerintah yang diterbitkan.

- 2) Kegiatan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp 3.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.019.000,00 atau 99.80%. Kegiatan



yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan Semesteran yang diterbitkan.

- 3) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.600.000,00 atau 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan Tahunan yang diterbitkan.

f. Program Perencanaan Tata Ruang

- 1) kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dengan anggaran Rp. 322.814.125 dan terealisasi sebesar 320.666.817 atau 99,33%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- DED RTH Kec. Botupingge	1	Dokumen
- DED RTH Kec. Tilongkabila	1	Dokumen
- DED Median dan Trotoar Alun-Alun	1	Dokumen
- DED Median Jalan 3 Titik (Suwawa,Kabila,Tapa)	1	Dokumen
- DED RTH Kecamatan Bone Pantai	1	Dokumen
- DED RTH Lapangan Duano Kecamatan Suwawa Tengah	1	Dokumen
- DED Bangunan Menara Jam	1	Dokumen
- DED RTH Kecamatan Bulango Timur	1	Dokumen
- DED RTH Kecamatan Suwawa Selatan	1	Dokumen
- DED RTH Kecamatan Suwawa Timur	1	Dokumen
- Pengawasan Pembangunan	1	Dokumen

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah Dokumen perencanaan RTH se kabupaten bone bolango.

g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- 1) Kegiatan Penataan RTH dengan Anggaran sebesar Rp. 2.290.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.247.698.635 atau 98,15%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



- Pembangunan RTH Bone Lanjutan Paving : 409,4 m²
- Pembangunan Center Point Tahap II
- Penataan Taman Center Point)
- Pembangunan Median Jalan Alun-Alun Kabupaten Bone Bolango Lanjutan 116,8 m²
- Pembangunan Trotoar Alun Alun Kabupaten Bone Bolango Lanjutan 122,35 m²
- Revisi Design Center Point 1 dokumen
- Revisi Design RTH Kec.Bone 1 dokumen
- Pembangunan Menara Jam 2,72 m²
- Pemeliharaan Lapangan IPPOT
- Pembangunan Trotoar Menuju lapangan IPPOT 293,5 m²
- Revisi Design Kawasan Alun-alun Kawasan Pemerintahan 1 dok
- Pemeliharaan Tugu 4 Titik

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau meningkat.

- 2) Kegiatan Penataan RTH (lanjutan) dengan Anggaran sebesar Rp. 472.915.040 dengan realisasi sebesar Rp. 326.815.100 atau 69,11%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- DED RTH Lapangan Ipot Tapa 1 Dokumen
- Pengadaan Peta RTRW (A1) Kab.Bone Bolango 1 Dokumen
- Pemeliharaan RTH Kab. Bone Bolango 1 Dokumen
- Pembangunan Alun-alun kawasan Pemerintahan 1 Dokumen
- Pembangunan Median Jalan Bj. Habibie 1 Dokumen
- Pembangunan Trotoar + Saluran Jl.BJ.Habibie 1 Dokumen



- Pembangunan RTH Kawasan Kantor Camat Bone 1 Dokumen

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau dengan Penataan Kawasan.

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 3.349.895.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.684.697.500 atau 80,14%. Sisa anggaran sebesar 665.197.500 diluncurkan pada tahun anggaran 2017 senilai Rp. 664.201.500.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- DED Pembangunan Gedung Kantor 1 Dokumen
- Pemasangan Pavinblok Yiladia 815 M²
- Pembangunan Gedung BPU Suwawa Timur Tahap I 240 M²
- DED Pengembangan Rudis Yiladia 1 Dokumen
- DED Pengembangan Rudis Bantayo 1 Dokumen
- DED Kantor Badan Lingkungan Hidup 1 Dokumen
- DED Kantor Perumahan 1 Dokumen
- DED Kantor Dinas Pertanian 1 Dokumen
- DED Kantor BP4K 1 Dokumen
- Pengembangan Bandayo 380,8 M²
- Pengembangan Yiladia 61 M²
- Pemeliharaan Kantor Bupati 1 paket

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Gedung pemerintahan yang memadai.

- 2) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) dengan Anggaran Rp. 54.422.300 dan terealisasi sebesar Rp. 54.422.300 atau 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Pagar Kantor Desa Monano
- Pengembangan Dan Penataan Bandayo Bone Bolango



- 3) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DAK Lanjutan) dengan Anggaran Rp. 275.692.700 dan terealisasi sebesar Rp. 274.425.200 atau 99,54%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Dinas Peternakan	18,15 m x 28,2 m
- Kantor Camat Tapa	23,50 m x 17 m
- Kantor Camat Kabila	23,50 m x 17 m
- Kantor Camat Pinogu	15,25 m x 21,7 m
- Kantor Camat Bone Pantai	23,5 m x 17 m
- Pengembangan Sarana Dan Prasarana	Talud : 78 m ³
- Pemerintahan	Rabat Beton : 669 m ²
	Timbunan: 153 m ³

i. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong

- 1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase gorong-gorong dengan Anggaran Rp. 1.154.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.125.062.950 atau 97,44%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- DED Pembangunan Saluran Drainase Skala Kawasan Permukiman	1 Dokumen
- DED Saluran Drainase	1 Dokumen
- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase	1 Dokumen
- Pembangunan Saluran Darainase Permata-Berlian	230 M ²
- Pembangunan Saluran Darainase Desa Tamboo	200 M ²
- Pembangunan Saluran Darainase Desa Suka Damai	200 M ²
- Pembangunan Saluran Darainase Desa Taludaa	320 M ²
- Pembangunan Saluran Darainase Desa Masiaga	150 M ²
- Pembangunan Saluran Darainase Bongopini Kec. Tilongkabila	153 M ²

- 2) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase gorong-gorong dengan Anggaran Rp. 11.210.450 dan terealisasi sebesar Rp. 11.210.450 atau 100%.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Drainase Desa Panggulo II 172 M²
- Pembangunan Saluran Drainase Desa Butu 152 M²

j. Program Pengembangan Kinerja Peelolaan Air Minum dan Air Limbah

- 1) Kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana air limbah dengan anggaran Rp. 126.575.000 dengan realisasi sebesar Rp. 126.571.667 atau 99,99%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Operasi dan pemeliharaan kegiatan sanitasi 25 Meter
- UKL / UPL Ipal Komunal 1 Dokumen

- 2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana air limbah (DAK) dengan anggaran Rp. 4.856.510.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.853.356.708 atau 99,94%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

IPAL Komunal (DAK)

- Pembangunan IPAL Kawasan Kabila 10 x 4 x 2,75 m³
 - Lokasi Kelurahan Oluhuta 9 x 3 x 1,8 m³
 - Lokasi Kelurahan Tumbihe Pipa induk : 1167 m,
SR : 80 Unit
- Pembangunan IPAL Komunal Toto Utara 8 x 3 x 2 m³
- Pembangunan IPAL Komunal mamungaa Timur 6 x 3 x 2,5 m³
- Pembangunan IPAL Komunal Ilohuwa 6 x 3 x 2,5 m³
- Pembangunan IPAL Komunal Tilongkabila 6 x 3 x 2,5 m³
- Pembangunan IPAL Tunas Jaya 6 x 3 x 2,5 m³
- Pembangunan IPAL Komunal Dutohe 9 x 3 x 2 m³
- Pengembangan IPAL Komunal Dutohe Barat SR = 50 Unit

- 3) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah dengan anggaran Rp. 112.230.000 dengan realisasi sebesar Rp. 112.230.000 atau 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- DED SPAM Pinogu 1 Dokumen



- DED Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Bone Bolango 1 Dokumen
 - UKL/UPL Pembangunan SPAM 1 Dokumen
- 4) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (DAK) dengan anggaran Rp. 3.740.666.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.006.132.405 atau 80,36%. tersisa sebesar 734.533.595 dan diluncurkan pada tahun 2017 senilai 734.527.500.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengembangan JDU Bone Bolango Lanjutan Kec. Botupingge 3066 M
 - Pengembangan JDU Bone Bolango Lanjutan Kec. Bulango Utara 2730 M
 - Pengembangan JDU Bone Bolango Lanjutan Kec. Bone Pantai 912 M
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Bone Bolango 3078 M
- 5) Kegiatan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan anggaran Rp. 22.876.000 dengan realisasi sebesar Rp. 22.730.000 atau 99,36%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 43.490.000 dengan realisasi sebesar Rp. 39.970.000 atau 99,36%
- 7) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (DAK Lanjutan) dengan anggaran Rp. 109.504.800 dengan realisasi sebesar Rp. 109.504.800 atau 100%
- Peningkatan SPAM Bulango Ulu 3229,51 M
 - Pembangunan SPAM Perdesaan Suka Makmur 3566,23 M

k. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan anggaran Rp. 5.490.160.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.171.498.800 atau 94,20%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



- DED Peningkatan Jalan Ruas Toto-Kantor Bupati- Danau Perintis Cs.	1 Dokumen
- DED Peningkatan Jalan Ruas Sp.1 Jalan Desa Tunas Jaya Cs	1 Dokumen
- DED Jalan Bulontala - Botutonuo, Cs	1 Dokumen
- DED Peningkatan Jalan Ruas Moutong - Tunggulo-Toto Cs (lanjutan)	1 Dokumen
- DED Peningkatan Jalan Sp.Ruas Dutohe - Iloheluma Cs	1 Dokumen
- DED Peningkatan Jalan Lomaya - Kopi - Bulango Ulu Cs	1 Dokumen
- DED Peningkatan Jalan ruas Danau Perintis- Lombongo Cs.	1 Dokumen
- Peningkatan Jalan Desa Tingkohubu	333 m
- Peningkatan Jalan Lomaya-Kramat	333 m
- Peningkatan Jalan Desa Waolo	280 m
- Peningkatan Jalan Desa Toto Utara (Tembus KPU Prov)	822 m
- Peningkatan Jalan Desa Pangi	175 m
- Peningkatan Jalan Desa Pinomantiga	175 m
- UKL/UPL Peningkatan Jalan Ruas Toto-Kantor Bupati- Danau Perintis Cs.	1 dokumen
- UKL/UPL Peningkatan Jalan Ruas Sp.1 Jalan Desa Tunas Jaya Cs	1 dokumen
- UKL/UPL Peningkatan Jalan Ruas Moutong - Tunggulo-Toto Cs (lanjutan)	1 dokumen
- UKL/UPL Peningkatan Jalan Sp.Ruas Dutohe - Iloheluma Cs	1 dokumen
- UKL/UPL Peningkatan Jalan Lomaya - Kopi - Bulango Ulu Cs	1 dokumen
- UKL/UPL Peningkatan Jalan ruas Danau Perintis- Lombongo Cs.	1 dokumen
- Peningkatan Jalan DesaTingkohubu Timur	333 m
- Peningkatan Jalan Astra Kec. Suwawa	333 m
- DED / Perencanaan Peningkatan Jalan Desa	1 Dokumen



- Pengawasan Peningkatan Jalan Desa 1 Dokumen
 - Peningkatan Jalan Ruas Tulabolo-Pinogu 1.754 m
 - DED Peningkatan Ruas Danau Perintis-Sungai Bone (Riverside), Cs 1 Dokumen
 - DED Peningkatan Jalan Ruas Bube - Bulotalangi, Cs 1 Dokumen
 - DED Peningkatan Ruas Talango - Bube, Cs 1 Dokumen
 - Peningkatan Jalan Desa Ulantha (Akses Rumah Dinas Sekda) 280 m
 - Pemeliharaan Jalan 526 m
 - UKL/UPL Peningkatan Ruas Danau Perintis-Sungai Bone (Riverside), Cs 1 Dokumen
 - UKL/UPL Peningkatan Jalan Ruas Bube - Bulotalangi, Cs 1 Dokumen
 - UKL/UPL Peningkatan Ruas SP Talango - Bube, Cs 1 Dokumen
 - Pengawasan Jalan (DAK Tambahan) 1 Dokumen
 - DED Infrastruktur Jalan Tahun 2017 1 Dokumen
- 2) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Infrastruktur Jalan) dengan anggaran Rp. 62.939.755.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.305.294.480 atau 67,22%. Sisa senilai 20.633.715.700 diluncurkan tahun anggaran 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Jalan Ruas Toto-Kantor Bupati- Danau Perintis Cs. 6.650 m
- Peningkatan Jalan Ruas Sp.1 Jalan Desa Tunas Jaya Cs 6.650 m
- Peningkatan Jalan Ruas Moutong - Tunggulo-Toto Cs (lanjutan) 4.600 m
- Peningkatan Jalan Sp.Ruas Dutohe - Iloheluma Cs 4.200 m
- Peningkatan Jalan Lomaya - Kopi - Bulango Ulu Cs 6.500 m
- Peningkatan Jalan ruas Danau Perintis- Lombongo Cs. 2.185 m
- Pengawasan 1 dokumen
- Peningkatan Jaln Ruas Bube - Bulotalangi, Cs 10.000 m
- Peningkatan Jalan Ruas Danau Perintis - Sungai Bone (Riverside), Cs 9.500 m



- Peningkatan Jalan Ruas SP. Talango - Bube, Cs	7.600 m
- Perencanaan Jalan	1 dokumen
- Peningkatan Jalan Desa Talumopatu – Dunggala	350 m
- Peningkatan Jalan Desa Huntu Barat	350 m
- Peningkatan Jalan Desa Talulobutu Selatan	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Helumo - Danau Perintis (Lanjutan)	350 m
- Peningkatan Jalan Desa Tingkohubu (Lanjutan)	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Mootilango (Lanjutan)	350 m
- Peningkatan Jalan Desa Tunggulo - Bongopini (Lanjutan)	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Tamboo	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Moutong	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Bulotalangi Timur	200 m
- Peningkatan Jalan Desa Ponelo - Boidu - Sejahtera	350 m
- Peningkatan Jalan Desa Tapadaa - Bulango Utara	350 m
- Pengawasan	1 dok

3) Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan anggaran Rp. 325.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 301.962.500 atau 92,91%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jembatan Huluduotamo Lanjutan	1 unit
- Pembangunan Jembatan Bunga Alo Lanjutan	1 unit
Pembangunan Jembatan Molintogupo	1 unit

4) Kegiatan Pembangunan Jembatan (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 22.420.250 dengan realisasi sebesar Rp22.420.250 atau 100%.

1) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Lanjutan) dengan anggaran Rp. 22.072.000 dengan realisasi sebesar Rp22.072.000 atau 100%.

2) Kegiatan Pembangunan Jalan (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 399.310.450 dengan realisasi sebesar Rp. 399.310.450 atau 100%.



l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 104.454.025 dengan realisasi sebesar Rp. 94.232.300 atau 90,21%.

m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan IRigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan anggaran Rp. 521.145.000 dengan realisasi sebesar Rp. 520.180.632 atau 99,81%
- Pembangunan Irigasi Lomaya 216 m
 - Pemeliharaan Irigasi 150 m
- 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) dengan anggaran Rp. 3.680.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.674.571.100 atau 99,85%
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI Perintis 95 m
575 m
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Posolo 3 Bangunan
Terjunan 900 m
 - Peningkatan Jaringan Irigasi DI bongopini 635 m
1500 m
 - Peningkatan Jaringan IRigasi Butaiyodaa 1 bangunan galeri
3 main hole
 - Lanjutan Peningkatan Jaringan Irigasi di Perintis 93,5 m
 - Lanjutan Peningkatan Jaringan Irigasi di Bongopini 70 m
- 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 304.276.620 dengan realisasi sebesar Rp. 131.141.137 atau 43,10%

n. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- 1) Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan anggaran Rp. 1.264.246.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.212.048.095 atau 95,87%
- Pembangunan talud Desa Masiaga 265 m
 - Pembangunan Tebing Botutonuo 129,08 m
 - Pembangunan Bronjong Desa Pelita 173 m



- Pembangunan Bronjong Desa Ulanta 177,39 m
- Pembangunan Bronjong Pengaman jembatan desa bandungan 75,6 m
- Lanjutan Peningkatan Jaringan Irigasi di Bongopini 70 m

2) Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 150.054.100 dengan realisasi sebesar Rp. 24.929.800 atau 16,61%

2. Pencapaian Makro Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian makro urusan pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dapat di gambarkan sebagaimana dibawah ini :

a. Data Kinerja Infrastruktur

Tabel VI.
Kinerja Infrastruktur

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah					
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi	
% Kondisi Jalan Baik	%	66.66%	71	72%	102
Rata-Rata Capaian					101.4

Capaian kinerja strategi tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi kedua dalam dokumen RPJMD Bone Bolango Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup “. Sasaran strategi ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Dari table di atas terlihat, bahwa indikator dari sasaran strategis 7 ini mencapai 101.4%, dengan kategori nilai capaian **sangat tinggi**, Indikator kinerja utama rsentase peningkatan kondisi jalan baik adalah sebagai penunjang aksesibilitas wilayah merupakan indikator kinerja utama yang mengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang semakin



tinggi diperlukan prasarana berupa jalan dan jembatan yang baik. Prasarana jalan yang baik akan memperlancar aksesibilitas penduduk dalam melakukan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat baik berupa pendistribusian barang maupun kelancaran jangkaun akses ke kantong-kantong produksi.

Tahun 2016 ditargetkan total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 71% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 368,373 km yaitu sepanjang 261,545 km kondisi baik. Dinas Pekerjaan Umum melalui Program Kegiatan Tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sebesar 45,5 km maka realisasi kondisi jalan baik Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 mengalami peningkatan jalan baik sebesar 66,67% dari total panjang jalan kabupaten yaitu sepanjang 245,603 km jalan kabupaten dengan kondisi baik saat ini. Sehingga diperoleh capaian kinerja kondisi jalan baik tahun 2016 sebesar 93, 91% dengan predikat capaian kinerja kategori **SANGAT TINGGI**. Berikut ini data tentang perbandingan panjang jalan kabupaten kondisi baik selang tahun 2011-2016.

Kinerja Utama Infrastruktur Jalan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2016

NO	KINERJA UTAMA	2014	2015	2016
1	Kondisi Jalan Mantap	62,70%	66,66%	72%
2	Panjang Jalan Terbangun (Km2)	33,92	32,327	45,5
3	Jembatan Terbangun (Unit)	2	3	2
4	Gedung/Bangunan (Unit)	9	7	4
5	Irigasi (Meter)	2.367	3.683	3.728
6	Ipal Komunal Terbangun (Unit)	0	5	10

Sumber data :Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango

Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik
Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015	REALISASI 2016
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	46,25%	46,25%	34,28%	43,78 %	66,6%	66,67%

Sumber data :Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango



4. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

- a) Permasalahan pembebasan tanah untuk pembangunan antara lain :
 1. Beberapa pemilik tanah belum sepakat terhadap harga yang ditawarkan atau ingin dibayarkan sekaligus bangunan dan/atau tanaman;
 2. Beberapa kepemilikan tanah yang akan dibayarkan sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan;
- b) Kegiatan fisik belum sesuai rencana, karena terdapat beberapa kendala di lapangan, antara lain :
 1. Banyaknya utilitas yang ada di bahu jalan yang digunakan untuk pelebaran, sehingga dibutuhkan waktu untuk koordinasi dengan instansi terkait;
 2. Kondisi medan lokasi kegiatan yang sempit dan tidak rata, sehingga membuat pekerjaan menjadi lambat, karena mobilisasi kendaraan pengangkut material/bahan menjadi sulit.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 340.494.500,- terealisasi sebesar Rp. 334.977.500,- sisa anggaran Rp. 5.517.000,- atau sebesar 98 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Telepon/Internet, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang cukup untuk menunjang tugas organisasi / badan;
- 2) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 145.215.000,- terealisasi sebesar Rp. 145.977.500, sisa



anggaran Rp. 22.000.- atau 99,98 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. Dengan anggaran sebesar Rp. 240.573.500,- terealisasi sebesar Rp. 240.573.500,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) / Mobil Dinas, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas untuk menunjang segala kegiatan badan;
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Dengan anggaran sebesar Rp. 118.032.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.777.200,- sisa anggaran Rp. 3.254.800,- atau 97,24 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Jasa Service, Belanja Pergantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam menunjang tugas – tugas badan;
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut , Belanja Pemeliharaan Gedung kantor, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terpeliharanya gedung kantor dalam menunjang suasana kerja yang sehat dan tugas – tugas badan;
4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.800.000,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop, Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak Printer, Hasil yang



diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor untuk menunjang segala kegiatan badan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan. Dengan anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.250.000,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Belanja Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan., Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terpenuhinya pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Dengan anggaran sebesar Rp. 79.210.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.203.800,- sisa anggaran Rp. 6.200,- atau 99.99 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Bimtek Keuangan dan Perencanaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terlaksananya Bimtek Keuangan dan Perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 8.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.975.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.



f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 1) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp. 37.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.905.000,- sisa anggaran Rp. 10.000,- atau 99,97 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembinaan / Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pemantauan dalam rangka Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan wawasan kebangsaan di kabupaten bone bolango.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. Dengan anggaran sebesar Rp. 52.090.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.995.000,- sisa anggaran Rp. 95.000,- atau 99,82 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyuluhan/Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, Pemantauan Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kabupaten bone bolango;

g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- 1) Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp. 571.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 565.265.000,- sisa anggaran Rp. 5.960.000,- atau 98,95 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Gangguan Keamanan Daerah Penyuluhan/Sosialisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Daerah Penyuluhan/Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Penyusunan Dokumen Laporan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah, Pemantauan Kegiatan Dalam rangka Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatkan pengkajian masalah-masalah aktual yang berkaitan erat dengan ketertiban dan keamanan di kabupaten bone bolango;



h. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp. 58.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.295.000,- sisa anggaran Rp. 105.000,- atau 99,82 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan UU Pemilu Kepada Masyarakat, Penyusunan Dokumen Tim Verifikasi Bantuan Parpol, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatkan pemahaman sistem pemerintahan politik dan demokrasi pada masyarakat;
- 2) Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. Dengan anggaran sebesar Rp. 86.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 86.885.000,- sisa anggaran Rp. 15.000,- atau 99,98 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyuluhan/Sosialisasi Budaya dan Etika Politik, Penyusunan Dokumen Pemantauan Forum-Forum Diskusi Politik, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut ,Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budaya dan etika berpolitik yang baik dan santun.

i. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat.

- 1) Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp. 41.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.065.000,- sisa anggaran Rp. 50.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembinaan/Sosialisasi Kepada masyarakat tentang ketahanan sosial dan ketahanan budaya, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat, Ketahanan Ekonomi;
- 2) Kegiatan Sarasehan dan Dialog Ketahanan ekonomi. Dengan anggaran sebesar Rp. 68.805.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.775.000,- sisa anggaran Rp. 30.000,- atau 95,95 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemantauan Kepada Masyarakat Tentang Ketahanan Ekonomi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Tersedianya dokumen pemantauan tentang ketahanan ekonomi;



j. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 1) Pentas Seni Dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Anggaran Rp. 463.225.000,- Realisasi Rp.452.641.000,- (97,72 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peringatan hari Patriotik 23 Januari, Peringatan hari Otonomi Daerah, Peringatan HUT Kabupaten Bone Bolongo, Peringatan Hari Proklamasi, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah;

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya kesadaran, perilaku, serta peran masyarakat tentang hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
2. Masih kurang dan terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pemeran utama untuk mewujudkan keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Solusi

1. Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat melalui program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik, sedikitnya dapat mengatasi persoalan ketertiban dan keamanan daerah.
2. Melakukan pembinaan terhadap aparatur dalam hal tugas pokok dan fungsi sebagai pemeran utama dalam mewujudkan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta penegakan disiplin.

Lingkungan Hidup

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.257.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 256.221.197,00 atau 99,68 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Alat Tulis Kantor, Telepon, Listrik, Belanja jasa perbaikan alat kantor, Belanja Cetak, Belanja Pengandaan, Belanja Makan Minum Harian Pegawai, Belanja Makan



Minum Rapat, Belanja Makan Minum Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.145.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.145.700.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan perjalanan dinas yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	257.490.000	256.221.197	1.268.803	Jumlah administrasi pegawai yang diadakan	1 tahun
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	145.700.000	145.700.000	0	Jumlah koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun
		403.190.000	401.921.197	1.268.803		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.135.642.158,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.018.558,00 atau 98,80 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran



adalah laporan pemeliharaan kendaraan yang tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.119.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.118.643.000 atau 99,58 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemeliharaan bangunan gedung kantor Belanja modal peralatan dan mesin-Mesin Bor, Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya, Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan alat pendingin, Belanja modal peralatan dan mesin-Personal Komputer, Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Kursi Tamu, Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan alat studio, Belanja modal peralatan dan mesin-Alat Komunikasi telepon, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	135.624.158	134.018.558	1.605.600	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor terpelihara	17 unit
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	119.140.000	118.643.000	497.000	Jumlah peralatan dan pemeliharaan kantor yang diadakan	10 unit
		254.764.158	252.661.558	2.102.600		

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.13.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.541.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Hasil yang diharapkan akan dicapai



pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pakaian dinas pegawai negeri sipil yang lengkap.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	13.600.000	13.541.000	59.000	Jumlah pakaian dinas pegawai yang diadakan	46 set
		13.600.000	13.541.000	59.000		

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp.73.609.042,00 dan terealisasi Rp.73.539.042,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut , Bimtek Perencanaan, Bimtek Keuangan, Diklat Pendidikan Lain-lain, Diklat Pim IV, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	73.609.042	73.539.042	70.000	Terlaksananya Bimtek/Pelatihan PNS	11 kali
		73.609.042	73.539.042	70.000		

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.40.949.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.944.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Dokumen Capaian Kinerja/Laporan Kinerja SKPD yang di buat, Hasil



yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.949.500	40.944.000	5.500	Jumlah dokumen capaian kinerja/laporan kinerja SKPD yang dibuat	6 dok
		40.949.500	40.944.000	5.500		

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 1) Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan anggaran sebesar Rp.208.847.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.815.311,00 atau 98 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut BBM/Gas Persampahan, Belanja Iuran Kompensasi Pengelolaan, Belanja Penggantian Suku Persampahan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase tercapainya operasi dan pemeliharaan sarana prasana persampahan.
- 2) Kegiatan Kemampuan aparat pengelolaan persampahan dengan anggaran sebesar Rp.680.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.680.500.851,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase, Pasukan kebersihan yang menggunakan pakaian seragam dan terwujudnya kebersihan lingkungan.
- 3) Kegiatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp.25.565.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.565.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ATK, Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa ruang rapat, Belanja makan minum rapat, Belanja perjalanan dinas dalam



daerah, Belanja jasa narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase masyarakat yang mengetahui perda persampahan.

- 4) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) anggaran sebesar Rp.261.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.251.551.000,00 atau 98 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja modal dan peralatan mesin pengadaan alat kantor- mesin penggerak TPST, Pengadaan Tong sampah Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- 5) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Lanjutan 2015) anggaran sebesar Rp.21.496.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.496.950,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Kontainer Sampah Mini, Pembuatan Bak pengomposan, Gerobak Dorong;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	208.847.200	204.815.311	4.031.889	Jumlah BBM yang diadakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah dan jumlah tempat membuang sampah yang tersedia	24 unit & 1 lokasi
2	Peningkatan Kemampuan Aparat pengelolaan persampahan	680.510.000	680.500.851	9.200	Jumlah tenaga pengelola sampah yang tersedia & tersedianya pakaian seragam pengelola sampah	107 org
3	Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	25.565.200	25.565.000	200	Jumlah masyarakat yang mengetahui perda persampahan	50 org



4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	261.000.000	251.551.000	9.449.000	Jumlah sarana dan prasarana pengelola persampahan yang diadakan	289 unit
5	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Lanjutan 2015)	21.496.950	21.496.950	0		
		1.197.419.350	1.183.929.061	13.490.289		

f. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

- 1) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan anggaran sebesar Rp.60.949.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.949.200,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adipura/Adiwiyata, ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung, Belanja makan minum rapat sosialisasi, Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah, Jasa Narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pencapaian Adipura/Adiwiyata.
- 2) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.51.633.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.632.500,00 atau 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan, Honorarium panitia Penyusunan dokumen SLHD, ATK, Cetak, Penggandaan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Jasa tenaga ahli uji sampel, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tercapainya penyusunan dokumen SLHD dan kualitas uji air.
- 3) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp.50.804.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.804.000,00 atau 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan, Honorarium panitia kegiatan sosialisasi penertiban izin lingkungan, ATK, Cetak, Penggandaan, Sewa gedung, Makan minum rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Jasa tenaga narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah pelaku usaha yang mengetahui tentang penertiban izin lingkungan;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	60.494.200	60.494.200	0	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar akan kota kebersihan dan sehat	4 sekolah
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	51.633.000	51.632.500	500	Jumlah dokumen laporan kualitas lingkungan di Bone Bolango	3 dok
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup	50.804.000	50.804.000	0	Jumlah masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup	3 dok
		162.931.200	162.930.700	500		

g. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

- 1) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dengan anggaran sebesar Rp.203.478.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 202.912.355,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honoraium Panitia Tim Pemeriksa Dok Lingkungan ULK/UPL, ATK, Cetak, Penggandaan, Makan minum rapat, Makan minum tamu, Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah, Jasa konsultan penelitian, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Dokumen lingkungan hidup berupa formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL).
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.36.147.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.087.000,00 atau 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan, Honorarium PPTK, ATK, Cetak, Penggandaan, Makan minum rapat, Makan minum tamu, Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Mengetahui dan memahami setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan



yang diajukan oleh Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan tindak lanjut apa yang perlu dilaksanakan setelah melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 3) Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (DAK Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.8.903.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.903.500,00 atau 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan penanaman vegetasi di jalur hijau
- 4) Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (DAK Lanjutan 2015) dengan anggaran sebesar Rp.8.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.115.000,00 atau 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penanaman vegetasi pencegah longsor dan ramah lingkungan di bantaran sempadan danau perintis dan penanaman pohon di taman Alun-alun;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	203.478.700	202.912.355	566.345	Laporan MIH dan UKL/UPL	5 dok
2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	36.147.000	36.087.000	600.000	Laporan/dokumen mengenai perlindungan dan konservasi SDA	2 dok
3	Koordinasi Pengelolaan Konservasi (DAK Lanjutan)	8.903.500	8.903.500	0		
4	Koordinasi Pengelolaan Konservasi (DAK Lanjutan 2015)	8.115.000	8.115.000	0		
		256.644.200	255.477.855	1.166.345		



- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.15.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. Rp.15.775.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut ATK, Jasa penyiaran/publikasi media elektronik/cetak, Cetak, Penggandaan, Sewa kursi, Sewa tenda, Sewa sound sistem, Makan minum sosialisasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kab. Bone bolango, Perjalanan dinas dalam daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatkan pengetahuan para *stakeholder* dan masyarakat umum dengan komunikasi dua arah berupa sosialisasi tentang pentingnya unsur-unsur yang ada dalam lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Data dan informasi lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.17.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.930.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut ATK, Jasa Hosting website, Pemeliharaan website, Perjalanan dinas dalam daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tercapainya pelayanan perizinan yang cepat;
 - 3) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.56.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.495.000,00 atau 99 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Personal Komputer penunjang SIL (Notebook), Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Akses point, flashdisk, LCD Proyektor, Layar Monitor LCD), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tercapainya pelayanan perizinan yang cepat;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	15.775.000	15.775.000	0	Tersedianya media edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang informasi lingkungan & terselenggaranya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 tahun & 1 kali
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	17.100.000	16.930.000	170.000	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi operator web & Terselenggaranya Media Informasi Lingkungan Hidup secara Online.	4 Orang & 1 tahun
3	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (DAK)	56.000.000	55.495.000	505.000	Tersedianya peralatan yang memadai untuk mendukung media informasi bidang lingkungan hidup	3 jenis
		88.875.000	88.200.000	675.000		

i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- 1) Kegiatan Penataan RTH dengan anggaran sebesar Rp.217.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 216.830.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanaman, perencanaan dan pengawasan RTH, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terpenuhinya ruang terbuka hijau bagi masyarakat;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan RTH dengan anggaran sebesar Rp.141.523.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.237.950,00 atau 98 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium jasa pemeliharaan RTH, BBM, Penggantian suku cadang, Sewa mobil penyiram, Pemeliharaan RTH, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terpenuhinya ruang terbuka hijau yang terpelihara dengan baik;



- 3) Kegiatan Penataan RTH (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.941.912.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 901.482.100,00 atau 95 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Bahan dan Peralatan Pemeliharaan RTH, Mesin Pompa Air, Pengadaan Tanaman Hias RTH, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terpenuhinya ruang terbuka hijau bagi masyarakat;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penataan RTH	217.000.000	216.830.000	170.000	Jumlah RTH yang tertata	3 RTH
2	Pemeliharaan RTH	141.523.000	139.237.950	2.285.050	Tersedianya RTH yang terpelihara dengan baik	8 buah
3	Penataan RTH (DAK)	941.912.000	901.482.100	40.429.900	Tersedianya jumlah RTH yang memadai	2 buah
		1.300.435.000	1.257.550.050	42.884.950		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Penetapan target yang terlalu tinggi dalam penanganan sampah menyebabkan terlihat kinerja bidang persampahan sangat rendah.

b. Solusi

Menetapkan target yang dapat dicapai yang disesuaikan dengan sarana prasarana pendukung pencapaian target.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.257.868.100 terealisasi sebesar Rp.235.210.100 atau 91.21 %.Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Belanja alat tulis kantor, Belanja bahan pameran, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya makan minum tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.74.661.000 dan terealisasi sebesar Rp.74.661.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi antara instansi terkait dengan instansi lainnya yang disusun tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 114.610.000dan terealisasi sebesar Rp.112.068.000 atau 97.78 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Hasil yang diharapkan akan



dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan sarana dan prasarana aparatur yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.172.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.172.300.000 atau 99.71 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor, Pengadaan mesin pendingin ruang, Pengadaan lemari, Pengadaan kamera cctv, Pengadaan gense, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.
- 3) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas roda 4 dengan anggaran sebesar Rp.220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.220.000.000 atau 100 %, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah mobil dinas untuk kepala dinas untuk kepentingan dinas dalam rangka penunjang kepentingan masyarakat

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.18.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.37.669.000 dan terealisasi Rp.36.669.000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek Pengelolaan Keuangan Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev, Bimtek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Bimtek Penyusunan LPPD, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah PNS yang telah memiliki keahlian berdasarkan bidang masing-masing;



5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.34.750.000 dan terealisasi sebesar Rp34.750.000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan;

6) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Kegiatan Pembanguna dan Pengoperasian SIAK secara terpadua dengan anggaran sebesar Rp.155.855.000 dan terealisasi sebesar Rp.155.134.000 atau 99,53 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honor panitia pelaksana kegiatan, Honor pegawai tidak tetap, Belanja alat tulis kantor, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja pengadaan laptop, Belanja pengadaan personal computer, Belanja pengadaan alat komunikasi telephone, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah fasilitas jaringan siak yang terpelihara;
- 2) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.359.445.000 dan terealisasi sebesar Rp.359.445.000 atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan computer, Belanja jasa tenaga ahli, Belanja pengadaan server, Belanja pengadaan papan led/ranning teks, Belanja pengadaan mini computer, Belanja pengadaan jaringan, Belanja pengadaan menara, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pemeliharaan aplikasi jaringan yang meningkat.
- 3) Kegiatan Pengelahan dalam penyusunan Laporan informasi kependuduakn dengan anggaran sebesar Rp.75.410.000 dan terealisasi sebesar Rp.75.410.000 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja alat tulis kantor untuk pembuatan dokumen, Belanja cetak, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tercapainya penyusunan laporan kependudukan



- 4) Kegiatan Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan anggaran sebesar Rp.77.174.000 dan terealisasi sebesar Rp.77.174.000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelayanan mobile di kecamatan, Belanja alat tulis kantor, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja laptop penunjang pelayanan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah masyarakat yang mendapat dokumen kependudukan melebihi target yang telah ditetapkan
- 5) Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil dengan anggaran sebesar Rp.106.817.000 dan terealisasi sebesar Rp.106.817.000 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut sosialisasi, perjalanan dinas dalam daerah;

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya animo masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil

b. Solusi

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan ditingkat desa dalam arti yang belum memiliki ktp,kk dan akta kelahiran perlu diberikan sosialisasi tentang mudahnya pengurusan dokumen tersebut;
- 2) Adanya pelayanan di tingkat desa untuk membantu masyarakat dalam hal biaya transport kendaraan;

Komunikasi dan Informaika

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 191.390.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 180.440.000,- atau 94,27 % Hasil Capaian Kerja , Terlaksananya pelayanan penyediaan administrasi perkantoran, realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terdukungnya kebutuhan administrasi Bagian Humas dan Kominfo laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) Tahun, berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, honorarium tim



pengadaan barang dan jasa, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan plakat, pembayaran telepon, biaya cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp 191.390.000,- dan terealisasi dana sebesar Rp. 180.440.000,- (94,27 %), permasalahan yang dihadapi yaitu perubahan harga relatif cepat kadang sulit diprediksi. Dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.

2. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah , Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 277.400.000,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 275.348.500,- atau 99,26 % , Hasil Capaian Kerja , Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 1 (satu) Tahun untuk kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp 277.400.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 275.348.500,- (99,26 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada permasalahan di tahun 2016.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	191.390.000	180.440.000	10.950.000	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	277.400.000	275.348.500	2.051.500	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dinas dalam dan keluar daerah	1 tahun
Jumlah		468.790.000	455.788.500	13.001.500		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- atau 100 % , Hasil Capaian Kerja, Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda empat 1 (satu) unit dengan alokasi dana



sebesar Rp 210.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp 210.000.000,- (100 %) permasalahan yang dihadapi tidak ada dan solusi nihil.

- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.200.000,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.652.300,- atau 95 %, Hasil Capaian Kerja Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 (satu) paket berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas/operasional kantor dan Sewa sarana mobilitas darat dengan alokasi dana sebesar Rp 150.200.000,- yang terealisasi sebesar Rp 142.652.300,- (95 %) permasalahan yang dihadapi tidak ada dan solusi nihil.
- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.500.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 158.893.450,- atau 99,61 %, Hasil Capaian Kerja, Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor realisasi dari kegiatan ini yaitu perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pembelian berupa pendingin ruangan (AC) 2 unit, tripod 1 unit, harddisk eksternal 2 unit, computer PC 2 unit, notebook 1 buah, lemari 1 buah, meubelair 1 paket, kamera 1 buah, handytalky 4 unit, meja kerja 4 buah, CCTV 1 Paket. Alokasi anggaran sebesar Rp. 159.500.000,-, realisasi Rp 158.893.450,- (99,61%). Permasalahan berupa komoditi ini sulit didapat, penyedia jasa relatif jauh, persyaratan pembelian relatif rumit. Solusinya yaitu koordinasi yang semakin intensif antara pembeli dan penyedia jasa;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	210.000.000	210.000.000	-	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda empat	1 unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.200.000	142.652.300	7.547.700	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun



3.	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	159.500.000	158.893.450	606.550	Jumlah perlengkapan/ peralatan gedung kantor yang diadakan	30 Paket/ Unit /Thn
Jumlah		468.790.000	455.788.500	13.001.500		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan, Dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- atau 100 %, Hasil Capaian Kerja, Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan 1 (satu) paket. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu Berupa PDH Kepala Bagian 2 Stel, Pakaian Dinas Harian Staf 19 Stel/Org, Pakaian Olahraga 25 Stel/Org dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.750.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- (100 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	12.750.000	12.750.000	-	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	46 Org/ Stel
Jumlah		12.750.000	12.750.000			

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, Dengan anggaran sebesar Rp. 9.490.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.642.500,- atau 91,06 %, Hasil Capaian Kerja, Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 (satu) kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur setelah mengikuti kegiatan diklat perencanaan dengan



alokasi anggaran sebesar Rp 9.490.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.642.500,- (91,06 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9.490.000	8.642.500	847.500	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Keg
Jumlah		9.490.000	8.642.500	847.500		

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 358.800.000, Realisasi anggaran sebesar Rp. 350.523.501 atau 97,69 %, Hasil Capaian Kerja, Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi 1 (satu) Tahun. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu tersedianya layanan media komunikasi dan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh publik berupa Layanan Internet Cyber Dedicate, pemeliharaan peralatan telematika, listrik videotron, pengembangan cyber city (Hotspot WMS), pengadaan/pemeliharaan website pemkab Bone Bolango dengan alokasi anggaran sebesar Rp 358.800.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 350.523.501,- (97,69 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	358.800.000	350.523.501	8.276.499	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi	1 Tahun
Jumlah		358.800.000	350.523.501	8.276.499		



f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 1) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 125.670.000, Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.688.209 atau 99,21 %, Hasil Capaian Kerja, Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terfasilitasinya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.670.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 124.688.209 , - (99,21 %), kegiatan ini berjalan dengan baik;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	125.670.000	124.688.209	981.791	Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 tahun
Jumlah		125.670.000	124.688.209	981.791		

g. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

- 1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.369.800.000, Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.357.840.000 atau 99,12 %, Hasil Capaian Kerja, Tersebar luasnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kerjasama Bagian Humas dan Kominfo dengan Mas media, Berupa penyiaran /publikasi yang berkerjasama dengan Perum LKBN Antara biro Gorontalo, TV Lokal, Radio Lokal, Gorontalo Post, Radar Gorontalo, dan pembuatan Tabloid Kambungu. Alokasi anggaran sebesar Rp 1.369.800.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.357.840.000,- (99,12 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik relatif tidak



ada masalah. Permasalahan dan solusi selama kurun waktu tahun 2016 pada Bagian Humas dan Kominfo seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lancar.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.369.800.000	1.357.840.000	11.960.000	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mas media	1 Tahun
Jumlah		1.369.800.000	1.357.840.000	11.960.000		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Jumlah PNS sangat terbatas dan kurang sehingga kinerja belum maksimal.
- 2) SDM PNS sangat terbatas sehingga kinerja belum maksimal.
- 3) Alokasi dana khususnya belanja langsung terbatas sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas.

b. Solusi :

- 1) Memaksimalkan PNS yang ada, kedepan menambah jumlah pegawai.
- 2) Efisiensi dana dan mengutamakan skala prioritas, menimbang jumlah dana terbatas.
- 3) Mengirimkan diklat PNS untuk peningkatan SDM PNS

Koperasi, usaha kecil dan menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- 1) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi dengan anggaran sebesar Rp. 85,060,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 85,039,200,- atau 99,98 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan ATK, Biaya Jasa Kontribusi Pameran, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perjalanan dinas, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran



adalah prosentase jumlah Koperasi yang dibina, diawasi, diberikan penghargaan dan dikoordinasikan meningkat.

- 2) Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 87,940,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87,930,000,- atau 99,99 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan ATK, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Sewa Peralatan Studio, Pengadaan Makan Minum Peserta Sosialisasi, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Jasa Narasumber, Uang Pengganti Transportasi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah kerjasama usaha yang baik dalam pengembangan dan perluasan jaringan perkoperasian meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	85.060.000	85.039.200	20.800	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	3 Keg
2	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	87.940.000	87.930.000	10.000	Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	2 Keg
T O T A L		173.000.000	172.969.200	30.800		

b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

- 1) Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 270,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 169,400,000,- atau 62,74 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan ATK, Belanja Bahan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Biaya Sewa Gedung, Biaya Sewa Peralatan Studio, Pengadaan Makan Minum Peserta Sosialisasi, Biaya Perjalanan Dinas, Pengadaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat, Biaya Jasa Narasumber, Pengadaan Mesin



dan Peralatan Bengkel, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Usaha Kecil Menengah yang difasilitasi melalui Perkuatan Modal meningkat.

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp. 71,296,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71,294,000,- atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan ATK, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Sewa Gedung, Biaya Sewa Peralatan Studio, Pengadaan Makan Minum Peserta Sosialisasi, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Jasa Narasumber, Uang Saku Peserta, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah peserta sosialisasi / diklat IUMK dan jumlah UMKM yang difasilitasi melalui kegiatan Wira Usaha Baru (WUB) meningkat.
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 36,130,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36,129,500,- atau 99,81 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan ATK, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perjalanan Dinas, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah dokumen pelaporan evaluasi dan monitoring data base WUB dan data base KK miskin potensial meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	71.296.000	71.294.000	2.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2 Keg
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	36.200.000	36.129.000	71.000	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Dok
T O T A L		107.496.000	107.423.000	73.000		



d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 89,850,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89,849,859,- atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan ATK, Biaya Jasa Kontribusi Pameran, Biaya Cetak dan Penggandaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	89,850,000	89,849,859	141	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	6 Keg
T O T A L		89,850,000	89,849,859	141		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing;
2. Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga perlu pengembangan di wilayah lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga;
4. Belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, cq. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya;



5. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional dan sebagian besar koperasi dikelola paruh waktu atau sisa pekerjaan lainnya;
6. Pola kemitraan dan kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pefrindustrian dan Perdagangan dengan Pengusaha Besar belum optimal;
7. Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk UMKM;
8. Masih adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari Pemerintah merupakan hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 10) Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas pelaku usaha;

b. Solusi

- 1) Pelatihan penerapan dan bantuan sarana prasarana teknologi;
- 2) Pengembangan kawasan perdagangan di wilayah yang belum tersentuh;
- 3) Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen;
- 4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 5) Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui pelatihan;
- 6) Meningkatkan pola kemitraan dengan BUMN/BUMD/BUMS secara berkesinambungan;
- 7) Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui keunggulan kompetitif;
- 8) Memberikan pemahaman tentang ketentuan dana bergulir melalui penyuluhan/sosialisasi maupun kunjungan langsung kepada Koperasi/UMKM;
- 9) Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha.



Perhubungan

a. Program Pelayann Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 741,613,800 dan terealisasi sebesar Rp. 740,902,052 atau 99,90%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembayaran Rekening Telepon, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase Peingkatan Pelaynan Administrasi Perkantoran;
- 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 302,631,000 dan terealisasi sebesar Rp. 302,538,700 atau 99,97%,Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase Peingkatan Pelaynan Administrasi Perkantoran;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	741,613,800	740,902,052	711,748	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	12 Bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah	302,631,000	302,538,700	92,300	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilakukan	12 Bulan
		1,044,244,800	1,043,440,752	804,048		



1) Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 77,500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74,790,000 atau 96,50%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon II, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai;
- 3) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 221,825,000 dan terealisasi sebesar Rp. 217,699,100 atau 98,14%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemeliharaan/perbaikan alat kantor Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor Pengadaan mesin pendingin ruangan, Pengadaan Lemari, Pengadaan meja kerja, Pengadaan sofa, Pengadaan Dispenser, Pengadaan Hardisk Eksternal, Pengadaan Personal Computer, Pengadaan Mesin Absensi, Pengadaan Kalkulator, Pengadaan Kursi, Pengadaan Ipad, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	77,500,000	74,790,000	2,710,000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213,500,000	208,784,260	4,715,740	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	221,825,000	217,699,100	4,125,900	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara	12 bulan
		512,825,000	501,273,360	11,551,640		

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 58.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 58.500.000 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pakaian Dinas Perhubungan, Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase penyediaan fasilitas peningkatan disiplin aparatur

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	58,500,000	58,500,000	0	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak	100 Orang
		58,500,000	58,500,000	0		

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp. 92,926,400 dan terealisasi sebesar Rp. 92,916,800 atau 99,99%, Kegiatan yang telah dilaksanakan Bimtek Keuangan, Bimtek Perencanaan, Hasil yang



diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase dukungan pendidikan dan pelatihan formal terhadap peningkatan sumber daya aparatur;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	92,926,400	92,916,800	9,600	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang
		92,926,400	92,916,800	9,600		

4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 162,483,650 dan terealisasi sebesar Rp. 162,483,650 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD (TAPKIN), Penyusunan LPPD, Penyusunan LKPJ, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terpenuhinya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162,438,650	162,438,650	0	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen
		162,438,650	162,438,650	0		

5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 1) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasin Angkutan Umum di Jalan Raya dengan anggaran sebesar Rp. 427,510,000 dan terealisasi sebesar Rp. 427,076,000 atau 99,90%, Kegiatan yang dilaksanakan Pembentukan Tim Pengatur dan pengawas lalu lintas dan Angkutan Jalan Masuk Kabupaten melalui Operasi



- Terpadu di daerah Hukum Kabupaten Bone Bolango, Bantuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi Angkutan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase Penigkata Angkutan Layak Jalan;
- 2) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dengan anggaran Rp. 59,147,625 dan terealisasi sebesar Rp. 59,147,000 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase Penigkata Angkutan Layak Jalan.
 - 3) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dengan Anggaran sebesar Rp. 32,599,400 dan terealisasi sebesar Rp. 32,339,400 atau 99,20%, Kegiatan yang dilaksanakan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase Penigkata Angkutan Layak Jalan;
 - 4) Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 10,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 10,000,000 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksanaan koordinasi dalm rangka memonitoring serta mengevaluasi peningkatan pelayanan angkutan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase Penigkata Angkutan Layak Jalan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan Raya	427,510,000	427,076,000	434,000	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian disiplin umum di jalan raya	12 Dokumen
2	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	59,147,625	59,147,000	625	Jumlah sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan yang dibuat	2 Kali
3	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan	32,599,400	32,599,400	260,000	Jumlah peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan	30 Orang



	Umum Teladan				umum teladan	
4	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	10,000,000	10,000,000	0	Jumlah koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	12 Bulan
		529,257,025	528,563,025	694,000		

6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Kegiatan Pembanguna Gedung Terminal dengna anggaran 34,180,000 dan terealisasi sebesar Rp. 33,875,000 atau 99,11%, Kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Pos Retribusi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentse peningkatan efektivitas sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Terminal	34,180,000	33,875,000	305,000	Jumah gedung terminal yang dibangun (pos perhubungan)	4 Buah
		34,180,000	33,875,000	305,000		

7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1) Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp.1,943,461,200 dan terealisasi sebesar Rp. 1,939,276,250 atau 99,78%, Kegiatan yang dilaksanakan Pengadaan Mini Bus, Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas, Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	1,943,461,200	1,939,276,250	4,184,950	Jumah Rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	12 Bulan
		1,943,461,200	1,939,276,250	4,184,950		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten baik di Bidang Perhubungan maupun Pariwisata
- 2) Belum memadainya sarana dan prasaran penunjang ASN dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya
- 3) Masih belum meratanya pembangunan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan di sepanjang jalan di Kabupaten Bone Bolango
- 4) Masih Terbatasnya Pagu anggaran yang diberikan sehingga belum dapat mengakomodir kegiatan tambahan yang lain
- 5) Terhentinya kegiatan pemungutan retribusi di Pos-pos perhubungan dikarenakan dapat terindikasi pungutan liar
- 6) Belum adanya perda atau perbub yang menjadi payung hukum dalam pemungutan retribusi baik dibidang Perhubungan Maupun Pariwisata
- 7) masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian dari setiap Objek Wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango

b. Solusi

- 1) Lebih memaksimalkan pelatihan ataupun bimbingan bagi ASN
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasaran yang tepat agar dapat memaksimalkan kinerja ASN
- 3) Pemerataan pembangunan Rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan guna menekan dan meurunkan jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Bone Bolango
- 4) Pemberian Alokasi Dana tepat sehingga dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan penunjang yang lain



- 5) pengaktifan kembli pos-pos pemungutan retribusi
- 6) adanya payung huku yang jelas mengenai retribusi baik di bidang Perhubungan maupun di bidng Pariwisata
- 7) Meingkatkan kegiatan sosialisasi sadar keselamatan berlalu lintas serta memaksimalkan pembinaan kelompok sadar wisata;

Penanaman Modal

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

- 2) Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 341.249.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 332.248.084,- atau 97 % kegiatan yang dilaksnakan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium Non PNS, Pengadaan ATK, alat listrik dan elektronik, pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Pembayaran Rekening Telpon, Listrik, Surat kabar, pembayaran biaya kawat/faksimili/internet/TV kabel, Biaya Cetak dan penggandaan, Biaya makanan dan minuman rapat/tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran, yang disusun tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 126.668.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.405.921,-atau 99.79%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dalam daerah, rapat-rapat koordinasi keluar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	341.249.000,-	332.248.084,-	9.000.916,-	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Bulan





2.	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Ke Luar Daerah	126.668.800,-	126.405.921,-	262.879,-	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun
		467.917.800,-	458.654.005,-	9.263.795		

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 132.831.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.078.750,- atau 97.93%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Jasa servis Kendaraan Dinas Roda 2, suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2, bahan bakar minyak Kendaraan dinas roda 2 dan 4, penggantian STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132.831.000,-	130.078.750,-	2.752.250,-	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 Tahun
2.	Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	228.500.000,-	228.450.000,-	50.000,-	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	6 unit

c. Program Peningkatan Displin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 228.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 228.450.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pemeliharaan / perbaiki alat kantor, Pengadaan Kendaraan dinas roda 2, pengadaan computer, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan dan dipelihara/di perbaiki meningkat;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus Dan Pakaian Kerja Lapangan	18.750.000,-	18.750.000,-	0,-	Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	68 stel
		18.750.000,-	18.750.000,-	0,-		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp. 47.775.200,- terealisasi sebesar Rp. 47.775.200,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, mengikuti Bimtek Perencanaan, bimtek keuangan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat:

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.775.200,-	47.775.200,-	0,-	Terlaksananya kegiatan Bimtek	2 Kegiatan
		47.775.200,-	47.775.200,-	0,-		

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 51.411.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.359.700,- atau 99.90 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Penyusunan Laporan Laki, Renstra, RENJA, RKA, TAPKIN, LPPD, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan;
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.200.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Penyusunan Laporan Keuangan, Hasil yang



diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah laporan keuangan yang diterbitkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.411.000,-	51.359.700,-	51.300,-	Terlaksananya kegiatan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	13.200.000,-	13.200.000,-	0,-	Terlaksananya Kegiatan Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan
		64.611.000,-	64.559.700,-	51.300,-		

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Kegiatan penyusunan system informasi terhadap layanan public dengan anggaran sebesar Rp. 120.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.820.000,- atau 99,35%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pengadaan meubelair, pengadaan alat pendingin, pengadaan printer, pengadaan peralatan jaringan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas perangkat jaringan komputer meningkat;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	120.600.000,-	119.820.000,-	51.300,-	Terlaksananya kegiatan penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	1 Perangkat Jaringan
		120.600.000,-	119.820.000,-	51.300,-		



g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, peminaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 53.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.270.000,- atau 79,05%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Kegiatan Pengawasan dan pemantauan lokasi usaha yang bermasalah dan belum memiliki izin usaha, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase lokasi usaha yang ditindaklanjuti meningkat;
- 2) Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 36.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.830.000,- atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pengawasan, pengaduan dan evaluasi lokasi usaha PMA dan PMDN, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Prosentase jumlah pengaduan meningkat;
- 4) Pengembangan potensi unggulan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 81.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.675.000,- atau 39%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pembuatan Buku Profil Potensi Unggulan Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Prosentase buku profil potensi unggulan daerah;
- 5) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dengan anggaran sebesar Rp. 40.795.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.735.000,- atau 99.85%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pembuatan Buku Profil PMA PMDN, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Prosentase buku Profil PMA PMDN Meningkat;
- 6) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi dengan anggaran sebesar Rp. 34.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.475.200,- atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek SPIPISE, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat;
- 7) Penyelenggaraan pameran investasi dengan anggaran sebesar Rp. 19.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.899.000,- atau 77%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pameran kabupaten Bone Bolango, Pameran Provinsi Gorontalo,



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah pameran yang diikuti Meningkat;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.170.000,-	52.270.000,-	900.000,-	Terlaksananya kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan
2.	Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	36.830.000,-	36.830.000,-	0,-	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur	1 Dokumen
3.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	81.675.000,-	31.675.000,-	50.000.000,-	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1 Kegiatan
4.	Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMND/PMA	40.795.000,-	40.735.000,-	60.000,-	Terlaksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA	50 Buku Profil Investasi
5.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	34.920.000,-	34.475.200,-	444.800,-	Terlaksananya kegiatan kualitas SDM Guna peningkatan pelayanan investasi	4 Orang
6.	Penyelenggaraan pameran investasi	19.400.000,-	14.899.000,-	4.501.000,-	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	2 pameran
		266.790.000,-	210.884.200,-	55.905.800,-		

h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 222.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.625.742,- atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Kegiatan



Peninjauan lapangan dan Proses pelayanan perizinan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah izin yang dikeluarkan meningkat;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1.	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	222.225.000,-	220.625.742,-	1.599.258,-	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	1 Perangkat Jaringan
		222.225.000,-	220.625.742,-	1.599.258,-		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya SDM dibidang Penanaman modal dan PTSP
- 2) Belum optimalnya Pemanfaatan Fasilitas Sistem Aplikasi SPIPSE
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus legalitas perizinan, serta masih banyaknya perusahaan yang tidak mengirimkan LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) Ke BPPTPM, sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pengawasan.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan promosi investasi daerah secara berkelanjutan
- 2) Peningkatan Pelayanan Paket Perizinan Online untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan
- 3) Mengoptimalkan penggunaan system aplikasi SPIPSE yang diberikan oleh BKPM Pusat;

Ketenagakerjaan

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- 1) Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan dan pelatihan berbasis masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.174.830.750,- dan terealisasi sebesar Rp.172.431.350,- atau 98,63 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah



Bantuan KUP bengkel las dan pertukangan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah wirausaha baru.

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp.68.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.891.000,- atau 99,05 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah bimtek pembuatan sarana HI,PP,PKB,LKS bipartit dan koperasi pekerja, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksana bimtek HI,PP,PKB,LKS dan koperasi pekerja;

Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 265.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 259.423.145,00 atau 98%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembayaran Rekening Telepon, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.255.995.066,00 dan terealisasi sebesar Rp. 255.994.280,00 atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	265.220.000	259.423.145	5.796,855	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	255.995.066	255,994,280	786	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan
		1,431,880,000	1,336,127,284	95,752,716		

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 121.384.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 119.718.550,00 atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perawatan jasa service kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun.
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 59.252.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.887.000,00 atau 99%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pengadaan laptop, Pengadaan printer, Pengadaan alat jaringan simda, Pengadaan kursi kerja hidrolik, Pengadaan kursi pernekel, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,00 atau 100%,



Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya pakaian dinas pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.700.000,00 atau 98%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Olahraga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya pakaian Olahraga untuk pegawai dan tenaga kontrak dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 46.992.934,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.
 1. Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan
 2. Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah meningkatnya kapabilitas pegawai negeri sipil Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mengikuti bimtek.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 19.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.740.000,00 atau 99,57 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA), Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Penyusunan Dokumen LPPD, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir



tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

f. Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- a. Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.501.000,00 atau 99,7%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pendataan potensi kepemudaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya tersedianya dokumen tentang data potensi kepemudaan.

g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembinaan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terbinanya organisasi / kelompok pemuda yang kreatif dan produktif.
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan dengan anggaran sebesar Rp. 586.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 576.836.600,00 atau 98,7%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Seleksi paskibraka ke tingkat Provinsi, Pelaksanaan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia, Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Kabupaten Bone Bolango, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah meningkatnya jumlah pemuda di kabupaten bone bolango yang memiliki keterampilan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 157.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 156.315.000,00 atau 99%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Kemah Bhakti Pemuda, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah meningkatnya jumlah pemuda di kabupaten bone bolango yang memiliki keterampilan dengan mengikuti kegiatan Kemah Bhakti Pemuda.
- 4) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 10.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.700.000,00 atau 100%, Kegiatan



yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya dokumen tentang evaluasi kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan pada tahun 2016.

h. Program Pembinaan Dan Pemasayarakatan Olahraga

- 1) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp. 113.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.005.000,00 atau 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Pembibitan atlit cabang Olahraga Volly Ball, Pelaksanaan Pembibitan atlit cabang Olahraga Catur, Pelaksanaan Pembibitan atlit cabang Olahraga Bulutangkis, Pelaksanaan Pembibitan atlit cabang Olahraga Atletik, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terbinanya club olahraga dengan atlit yang memiliki skil dan prestasi dibidangnya masing-masing;

- 2) Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 253.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 253.005.700,00 atau 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan open tournament cabang volly ball, Pelaksanaan open tournament cabang bulutangkis, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya kegiatan open tournament olahraga yang menghasilkan atlit-atlit terbaik pada cabang olahraga volley ball dan bulutangkis.

- 3) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp. 17.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.360.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan senam aerobic di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya kegiatan senam aerobic di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sehingga menghasilkan ASN yang sehat, cerdas dan inovatif didalam beraktifitas.
- 4). Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 464.637.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 460.618.900,00 atau 99%, Kegiatan



yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Mengikuti Kejuaranaan ditingkat Nasional (Kejurnas), Mengikuti Kejuaraan Olahraga ditingkat Provinsi (POPPROV), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya kesempatan bagi para atlit berprestasi untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan ditingkat nasional dan tingkat provinsi.

- 5). Kegiatan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 63.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.600.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Lomba Gerakjalan dalam rangka HUT RI, Pelaksanaan Pertandingan Futsal dalam Rangka HAORNAS, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya kegiatan lomba gerak jalan dan pertandingan futsal demi meriahnya HUT RI dan HAORNAS tahun 2016;
- 6) Kegiatan Pengembangan Olahraga rekreasi dengan anggaran sebesar Rp. 11.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.595.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Seleksi festival olahraga tradisional, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya atlit-atlit olahraga tradisional tahun 2016 yang akan mengikuti seleksi ditingkat Provinsi.
- 7) Kegiatan Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemberian bonus kepada atli dan pelatih berprestasi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah atlit dan pelatih berprestasi yang menerima bonus/penghargaan .

i. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

- 1) Kegiatan Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 240.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 240.010.000,00 atau 99,67%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan bantuan alat olahraga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun



anggaran adalah tersedianya alat-alat olahraga untuk diberikan bantuan di kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango,

- 2) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 1.546.277.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 701.361.750,00 atau 45%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembangunan pagar lapangan olahraga Kecamatan Bonepantai, Pembangunan pagar lapangan olahraga Desa Longalo, Pembangunan panggung lapangan Kaidundu, Pembangunan pagar lapangan Poowo Barat, Penataan lapangan olahraga Kecamatan Bulango Timur, Penataan lapangan olahraga Desa Ulanta, Pembangunan panggung lapangan Desa Pinogu, Perencanaan pembangunan prasarana olahraga tahun 2016, Pengawasan pembangunan prasarana olahraga tahun 2016, Pembangunan pagar lapangan Poowo Barat (lanjutan), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya lapangan olahraga yang representative di setiap kecamatan.
- 3) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 15.220.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.220.500,00 atau 100%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembangunan lapangan volley ball Kec. Tapa (lanjutan/retensi 5%), Penataan lapangan olahraga kec. Bulango Timur (lanjutan/retensi 5%), Perencanaan peningkatan halaman GOR Bulutangkis (luncuran), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya lapangan olahraga yang representative di setiap kecamatan.

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan salah satu sub kegiatan strategis tidak terlaksana dan harus diadakan pergeseran.
- 2) Lemahnya sistem evaluasi intern pada setiap bidang di SKPD, sehingga menyebabkan satu pekerjaan fisik yang tidak terealisasi / tidak terlaksana yakni Pembangunan Lapangan Olahraga Desa Boludawa.



Adapun kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni:

- Adanya Review design atas Detail Engineering Design (DED) yang telah ada sehingga menyebabkan paket dimaksud gagal lelang.
- Hasil Review Design selesai pada akhir Bulan Agustus tahun 2016, sehingga Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak berani lagi melakukan lelang terhadap pekerjaan dimaksud mengingat sisa waktu tahun anggaran berjalan tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini bila dilelang kembali.

b. Solusi

1) Langkah pemecahan masalah I adalah :

- Pejabat pelaksana lebih intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait / lintas SKPD yang lebih paham dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan, sehingga lebih jelas didalam pelaksanaan setiap kegiatan.
- Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.

2) Langkah pemecahan masalah II adalah :

- Lebih menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi intern kegiatan baik bulanan, triwulan maupun semesteran. Sehingga permasalahan yang akan maupun sedang dihadapi dapat diminimalisir maupun diantisipasi dan setiap kegiatan/pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
- Pejabat pelaksana dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango lebih intensif melakukan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) didalam tahapan-tahapan pengadaan mulai dari persiapan perencanaan, proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan dilapangan



**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.042.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.967.939.427,00 atau 92,8 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Alat Tulis Kantor, Telepon, Listrik, Belanja jasa perbaikan alat kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Harian Pegawai, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.738.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.738.420.829,00 atau 99.9 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Laporan Perjalanan Dinas yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	1.042.334.000	967.939.427	74.394.573	Jumlah administrasi pegawai yang diadakan	1 tahun



2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	738.540.000	738.420.829	119.171	Jumlah koordinasi konsultasi dalam daerah luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun
		1.780.874.000	1.706.360.256	74.513.744		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.227.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.803.200,00 atau 78,4 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.441.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.426.892.438,00 atau 96,8 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pemeliharaan bangunan gedung kantor, Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Kursi Tamu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja modal peralatan dan mesin-Alat Komunikasi telepon, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal



Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	227.920.000	178.803.200	49.116.800	Jumlah administrasi pegawai yang diadakan	1 tahun
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	441.000.000	426.892.438	14.107.562	Jumlah koordinasi konsultasi dalam daerah luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun
		668.920.000	605.695.638	63.224.362		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.44.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.583.000,00 atau 99,6 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pakaian dinas pegawai negeri sipil yang lengkap.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	44.750.000	44.583.000	167.000	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1 tahun
		44.750.000	44.583.000	167.000		



d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.29.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.990.000,00 atau 95,5%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Dokumen Capaian Kinerja/Laporan Kinerja SKPD yang di buat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp.15.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.050.000,00 atau 100 %, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang diterbitkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.290.000	27.990.000	1.300.000	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun
2	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	15.050.000	15.050.000	-	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 tahun
		44.340.000	43.040.000	1.300.000		

e. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kegiatan Standar Satuan Harga dengan anggaran sebesar Rp.159.815.000,0. 0 dan realisasi sebesar Rp 159.615.000,00 atau 99,8 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen ke SKPD se-Kabupaten Bone Bolango Tepat Waktu;
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp.259.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp 250.008.300,00 atau 96,4 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda APBD tahun anggaran 2017 Berkualitas dan Tepat Waktu.



- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp.514.170.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 512.767.500,00 atau 99,7 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Berkualitas dan Tepat Waktu
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 209.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 208.636.600, 00 atau 99,5%, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 Berkualitas dan Tepat Waktu
- 5) Kegiatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.581.215.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 570.364.100,00 atau 98,1 %, Hasil yang diharapkan Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Berkualitas
- 6) Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.512.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 50.611.200,00 atau 99,5%, Hasil yang diharapkan Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.912.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 904.510.377,00 atau 99,1 %, Hasil yang diharapkan Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tersertifikasi.
- 8) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.727.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 723.340.780,00 atau 99,4 %, Hasil yang diharapkan Tersedianya Dokumen Aset Daerah Memiliki Bukti Kepemilikan
- 9) Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.61.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp.61.390.000,00 atau 99,7 %, Hasil yang diharapkan Tersedianya Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 10) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan anggaran sebesar Rp.713.150.000,00 dan realisasi sebesar



702.526.975,00 atau 98,5 %, Hasil yang diharapkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Standar Satuan Harga	159.815.000	159.615.000	200.000	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 tahun
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	259.100.000	250.008.300	9.091.700	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 tahun
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	514.170.000	512.767.500	1.402.500	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 tahun
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	209.520.000	208.636.600	883.400	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 tahun
5	Sistem Informasi Keuangan Daerah	581.215.000,00	570.364.100	10.850.900	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 tahun
6	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	512.980.000	510.611.200	2.368.800	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	912.116.000	904.510.377	7.605.623		1 tahun
8	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	727.450.000	723.340.780	4.109.220	Jumlah Dokumen Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1 tahun
9	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	61.550.000	61.390.000	160.000	Jumlah Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	1 tahun
10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	713.150.000	702.526.975	10.623.025	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 tahun



		4.651.066.000	4.603.770.832	47.623.025		
--	--	---------------	---------------	------------	--	--

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang ada pada DPPKAD Kabupaten saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pembayaran tagihan (penginputan nilai tagihan) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama Kantor Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *on line*. Penyebabnya, tidak semua Kantor Kecamatan dapat dilayani jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan SIMDA Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sehingga Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan dalam menyiapkan administrasi tagihan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) masih melakukan penginputan data di Kantor DPPKAD Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Masih adanya Barang Milik Daerah pada beberapa SKPD yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, terdapat Barang Milik Daerah tidak diketahui keberadaannya, masih terdapat Aset Tetap Tanah yang berasal dari penyerahan Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Induk) tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, serta terdapat Barang Milik Daerah yang pengelolaannya belum sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari targetnya, terutama Retribusi Daerah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang masih terkendala pada aspek perizinannya.
- 4) Masih rendahnya tingkat disiplin Pejabat dan Staf DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, sehingga perlu lebih tegas dalam penerapan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.



b. Solusi

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan berdasarkan kondisi saat ini dengan memperhatikan potensi yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ya jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dapat menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, diperolehnya bukti-bukti kepemilikan terhadap Aset Tetap Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan dan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan, serta teratasinya permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Terwujudnya peningkatan Disiplin Pejabat dan Staf DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja DPPKAD Kabupaten Bone Bolango.

Ketenagakerjaan

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- 1) Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan dan pelatihan berbasis masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.174.830.750,- dan terealisasi sebesar Rp.172.431.350,- atau 98,63 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bantuan KUP bengkel las dan pertukangan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah wirausaha baru;



Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan dan pelatihan berbasis masyarakat	174.830.750	172.431.350	2.399.400	Presentase penyediaan wirausaha baru	100 persen
		174.830.750	172.431.350	2.399.400		

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp.68.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.891.000,- atau 99,05 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah bimtek pembuatan sarana HI,PP,PKB,LKS bipartit dan koperasi pekerja, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksanya bimtek HI,PP,PKB,LKS dan koperasi pekerja;

Realisasi Program dan Kegiatan SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	68.545.000	67.891.000	654.000	terlaksananya bimtek pembuatan sarana HI,PP,PKB,LKS bipartit dan koperasi pekerja	1 kegiatan
		68.545.000	67.891.000	654.000		

Kearsipan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 251.480.000 dan terealisasi sebesar Rp. 247.605.328 atau 98,45 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembayaran Rekening Telepon,



Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makan Minum Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Rata – rata Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang dicapai.

- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 114,901,000 dan terealisasi sebesar Rp. 114,805,000 atau 99,91 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah frekuensi kegiatan rapat dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	251,480,000	247.605.328	3,874,672	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	114,901,000	114,805,000	96,000	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun
		366.381.000	362.410.328	3.970.672		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.860.000 atau 99.22 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kenderaan roda dua 1 unit, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah kendaraan dinas yang diadakan



- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 110.490.000 dan terealisasi sebesar Rp. 105,069,600 atau 95,09 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan roda 2 operasional eselon IV, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2 eselon IV, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon III, dan kendaraan roda 2 eselon IV, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon III, dan kendaraan roda 2 eselon IV, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan.
- 3) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 258.569.000 dan terealisasi sebesar Rp. 250,422,000 atau 96,84 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut , Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pengadaan alat pendingin ruangan, Pengadaan Personal Komputer, Pengadaan Peralatan Mini Komputer, Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Bangunan Gedung Kantor, Jaringan Distribusi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan dan jumlah asset yang di adakan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal	18.000.000	17.860.000	140,000	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal	1 unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	110.490.000	105,069,600	5,420,400	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	11 unit
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	258.569.000	250,422,000	7,637,000	Terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	18 unit
		387.059.000	373.351.600	13.197.400		



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 13.250.00.00 dan terealisasi sebesar Rp.13,200,000 atau 99,62 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tingkat kedisiplinan aparatur.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	13.250.000	13,200,000	50,000	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	35 orang
		13.250.00	13.200.00	50.000		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 29.779.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 29,779,000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek Pengelolaan Keuangan, Bimtek Sismonep (e-monep), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan kemampuan/keahlian aparatur yang mengikuti bimtek.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.779.000.	29.779.000.	-	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	35 orang
		13.250.00	13.200.00	50.000		

e. **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**

- 1) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.010.000 atau 99.76 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Monitoring dan Evaluasi Arsip SKPD Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase Dokumen Arsip Daerah Yang Dikumpulkan/Terinventarisasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	17.050.000.	17.010.000.	40.000	Terlaksananya kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	37 SKPD
		13.250.00	13.200.00	50.000		

f. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

- 1) Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca dengan anggaran sebesar Rp. 33.380.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.380.000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Layanan Perpustakaan Keliling, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah sekolah dan desa yang mendapat pelayanan;



- 2) Kegiatan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 36.735.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.685.000 atau 99.86 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Lomba Perpustakaan Sekolah, Lomba Perpustakaan Desa, Lomba Bercerita Tingkat SD, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah perpustakaan yang mendapat pembinaan
- 3) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 34.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34,478,900 atau 99.93 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah bahan pustaka yang diadakan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	33.380.000.	33.380.000.	-	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	37 SKPD
2	Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	36.735.000	36.685.000	50.000	Terlaksananya kegiatan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	12 Sekolah/ Desa
3	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	34.500.000	34,478,900	21.100	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	300 Eksemplar
		104.615.000	104.543.900	71.100		



3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perpustakaan.
- 2) Masih kurangnya sosialisasi budaya baca.
- 3) Masih terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan,
- 4) Masih terbatasnya anggaran.
- 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas.
- 6) Belum adanya kesamaan profesi dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya arsip di kalangan aparatur khususnya, masyarakat pada umumnya.
- 7) Kurangnya SDM pengelola arsip baik kualitas maupun kuantitas khususnya untuk jabatan fungsional

b. Solusi

- 1) Meningkatkan eksistensi lembaga perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Memberikan pembinaan berupa sosialisasi tentang budaya baca dan memperluas jangkauan layanan perpustakaan dan kearsipan terhadap masyarakat..
- 3) Meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan secara rutin/berkala sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
- 4) Mengusulkan penambahan anggaran ke TAPD
- 5) Meningkatkan kompetensi keahlian SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan
- 6) Terjalannya kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, baik di lingkungan Pemda Kabupaten Bone Bolango maupun dengan instansi lainnya.

Pertanahan

a. Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah

1. Kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah Anggaran Rp. 4.824.955.000,- Realisasi Rp.4.501.045.375,- (93,29 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Survey tanah yang akan dibebaskan, Musyawarah harga tanah, Pembayaran tanah dan tanaman, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya luasan lahan untuk pembangunan fisik Pemerintah daerah



Perencanaan Pembangunan

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Anggaran Rp. 78.410.000,-, Realisasi Rp.77.211.000,- (98,47 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengumpulan data LKPJ, Penyusunan Dokumen LKPJ, Pembahasan LKPJ dengan DPRD Kab Bone Bolango, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen LKPJ Kabupaten Bone Bolango tahun 2015;

Bappeda Kabupaten Bone Bolango

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 427.579.000 dan terealisasi sebesar Rp. 386.391.281 atau 90,37 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Administrasi Keuangan & Administrasi Perkantoran, Pembayaran Honorarium Pengelola Pengadaan Barang & Jasa, Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer Bidang Keuangan & Administrasi Perkantoran, Pengadaan ATK, Pembayaran Rekening Air , Pembayaran Rekening listrik, Pembayaran Surat Kabar/Majalah, Pemuatan Berita/Iklan di Media, Pembayaran Rekening Internet, Pembayaran Rekening TV Satelit, Pengadaan Spanduk, Pengadaan Baliho, Biaya Cetak Dokumen, Biaya Pengandaan, Pengadan Makan dan Minum Rapat dan Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.298.022.000 dan terealisasi sebesar Rp. 297.539.657 atau 99,84 %., Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Koordinasi/konsultasi Tingkat Provinsi, Koordinasi/konsultasi Tingkat Kabupaten, Koordinasi/konsultasi ke Luar Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri





Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	427.579.000	386.391.281	41.187.719	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Yang direalisasikan	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	289.022.000	297.539.657	482.343	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang Diikuti	12 tahun
		7.166.010.000	683.930.938	41.670.062		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 211.215.000 dan terealisasi sebesar Rp. 201.767.500 atau 95,53 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Penataan dan Pengembangan Kantor Bapped (Pembuatan Taman), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 213.180.000 dan terealisasi sebesar Rp. 176.171.275 atau 82,64 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Jasa Service Kendaraan Roda dua dan Roda Empat, Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua, Belanja Kelengkapan Mobil Lainnya, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.



- 3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000, dan terealisasi sebesar Rp.50.000.000 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pemeliharaan Gedung Kantor, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.
- 4) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 245.562.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.547.000 atau 89% Kegiatan yang dilaksanakan Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik,Perbaikan Alat Kantor,Pengadaan Meja Rapa,Pengadaan Kursi Rapat,Pengadaan Ac Split,Pengadaan AC duduk,Pengadaan PC,Pengadaan Notebook,Pengadaan Monitor CCTV,Pengadaan Pengadaan Printer,Pengadaan Router,Pengadaan CCTV,Pembuatan Interior Ruangan
- Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat
- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 19.930.000 atau sebesar 90,59% Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan website Bappeda Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Kantor	211.215.000	201.767.500	9.447.500	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	1 Unit
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	213.180.000	176.171.275	37.008.725	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua Yang Diservice	20 Unit



3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah Gedung Kantor Yang Diperbaiki/Dipelihara	1 unit
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung kantor	245.562.000	218.547.000	27.015.000	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang diadakan dan dipelihara	86 Jenis
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung kantor (Lanjutan)	22.000.000	19.930.000	2.070.000	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Sistem
		742.957.000	666.415.775	75.541.225		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.36.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.650.000,00 atau 99,73 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Pengadaan Pakaian Batik Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	36.750.000	36.650.000	100.000	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan Yang Diadakan	132 org/stel
		36.750.000	36.650.000	100.000		



d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.36.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.650.000,00 atau 99,73 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) : Pengadaan Pakaian Olah Raga,Pengadaan Pakaian Batik Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	36.750.000	36.650.000	100.000	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan Yang Diadakan	132 org/stel
		36.750.000	36.650.000	100.000		

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp.30.000.000 dan terealisasi Rp.29.809.000 atau 99,36 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Aparatur Bappeda Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	29.809.000	191.000	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	3 org/kl
		30.000.000	29.809.000	191.000		



f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.825.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.825.000 atau 100 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar, Penyusunan Dokumen Lakip Bappeda ,Penyusunan Dokumen Renja Bappeda, Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

- 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan anggaran sebesar Rp.1.250.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.250.000 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

- 3) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp.875.000 dan terealisasi sebesar Rp.875.000 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	3.825.000	3.825.000	0	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Yang Disusun	8 Dokumen
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.250.000	1.250.000	0	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen



3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	875.000	875.000	0	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik & Keuangan akhir Tahun yang Disusun	1 Dokumen
		5.950.000	5.950.000	0		

g. Program Pengembangan Data/Informasi.

- 1) Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.128.993.000 dan terealisasi sebesar Rp. 125.724.920 atau 97,47 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Dokumen Data Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Bone Bolango, Penyusunan Dokumen Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Kabupaten Bone Bolango, Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kegiatan Rapat Koordinasi. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase kasus yang ditindaklanjuti meningkat.
- 2) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 438.927.000 dan terealisasi sebesar Rp. 431.762.000 atau 98,37 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pembayaran Honor Penanggung Jawab Website Pemeliharaan Server Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Server Pengadaan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Pengadaan Server Kegiatan Bimtek SIPPD Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase kasus yang ditindaklanjuti meningkat.
- 3) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.155.000 dan terealisasi sebesar Rp. 93.095.000 atau 97,84 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen SIPD, Penyusunan Dokumen Profil Daerah, Penyusunan Buku Satu Data Pembangunan Bone Bolango, Keikutsertaan dalam Kegiatan Pameran Perencanaan Pembangunan Kab. Bone Bolango Hasil yang



diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase kasus yang ditindaklanjuti meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi	128.993.000	125.724.920	3.268.080	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu	8 Dokumen
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen	438.927.000	431.762.000	7.165.000	Jumlah Sarana Penunjang Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Yang Diadakan	2 Sistem
3	Penyusunan Profile Daerah	95.155.000	93.095.000	2.060.000	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik & Keuangan akhir Tahun yang Disusun	1 Dokumen
		663.075.000	650.581.920	12.493.080		

h. Program Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

- 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.12.540.000 dan terealisasi sebesar Rp.12.540.000 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Dokumen Data Statistik (DDA), Penyusunan Dokumen Data Statistik (KCDA) Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas dibidang pengawasan meningkat.



- 2) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB dengan anggaran sebesar Rp.2.275.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.275.000 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Data Statistik PDRB. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas dibidang pengawasan meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	12.540.000	12.540.000	0	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Yang disusun	3 Dokumen
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	2.275.000	2.275.000	0	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Yang Disusun	1 Dokumen
		14.815.000	14.815.000	0		

i. Program Perencanaan Tata Ruang

- 1) Kegiatan Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL dengan anggaran sebesar Rp.52.632.000 dan tidak terealisasi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp.12.985.000 dan tidak terealisasi.
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan anggaran sebesar Rp.463.819.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 244.097.000, atau sebesar 52,63%
kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan DED.



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas dibidang pengawasan meningkat.

- 4) Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp.79.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.400.000, atau sebesar 100%

kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Koordinasi BKPRD tingkat Kabupaten.

- 5) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.15.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.210.000, atau sebesar 97.88%

kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Monitoring Evaluasi Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas dibidang pengawasan meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	52.632.000	0	52.632.000	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Yang Diperdakan	1 Perda
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	12.985.000	0	12.985.000	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang	100 org



3	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	463.819.000	244.097.000	219.722.000	Jumlah Dokumen Detail Tata Ruang Kawasan Yang Disusun	1 Dokumen
4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	79.400.000	79.400.000	0	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	9 Kali
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.540.000	15.210.000	330.000	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		624.376.000	338.707.000	285.669.000		

j. Program Kerjasama Pembangunan

- 1) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 122.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.703.496, atau sebesar 96,96% kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan Lokakarya Kemitraan Pembangunan Daerah, Kerja Sama dengan Ehime University dan UNG.



Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	122.420.000	118.703.496	3.716.504	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Dengan Lembaga/institusi lain yang dilaksanakan	2 Lembaga
		122.420.000	118.703.496	3.716.504		

k. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 1) Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran sebesar Rp. 54.332.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.823.349, atau sebesar 78,82% kegiatan yang dilaksanakan: Kegiatan Rapat Koordinasi Infrastruktur Daerah.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	54.332.000	42.823.349	11.508.651	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategi & Cepat Tumbuh yang dilaksanakan	2 kegiatan
		54.332.000	42.823.349	11.508.651		

l. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp. 182.612.500,- dan terealisasi sebesar Rp.



162.897.625,- atau 89,20% Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan koordinasi POKJA AMPL, Kegiatan Koordinasi PAKEM Pamsimas III, Kegiatan Sosialisasi Program Pamsimas III, Kegiatan Sosialisasi Tingkat Desa Penerima Program Pamsimas III, Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi (Lap. POKJA AMPL, Lap. PAKEM Program PAMSIMAS III & Lap. Sek PAMSIMAS III).

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	186.612.500	162.897.625	23.714.875	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi	1 Dokumen
		186.612.500	162.897.625	23.714.875		

m. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.839.000 atau 99,46% Kegiatan yang dilaksanakan : Aparatur Bappeda yang mengikuti kegiatan Bimtek dan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 233.630.000, dan terealisasi sebesar Rp. 233.630.000 atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Bimtek Tata Kelola Perencanaan SKPD.



Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	30.000.000	29.839.000	161.000	Jumlah Aparatur Bappeda yang Mempunyai Kompetensi dalam Bidang Perencanaan dan Pengendalian	3 orang
2	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	233.630.000	233.630.000	0	Jumlah Kasubag Perencanaan SKPD dan Kecamatan yang Mengikuti Bimtek Tata Kelola Perencanaan SKPD	60 org/kl
		263.630.000	263.469.000	161.000		

n. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public dengan anggaran sebesar Rp. 48.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.075.000, atau 98,88% Kegiatan yang dilaksanakan : Monitoring pelaksanaan musrenbang desa, Kegiatan musrenbang kecamatan.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD dengan anggaran sebesar Rp. 542.476.000, dan terealisasi sebesar Rp. 452.804.794, atau 83,47% kegiatan yang dilaksanakan : Penyusunan dokumen RPJMD, Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis



- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD dengan anggaran sebesar Rp. 56.737.500, dan terealisasi sebesar Rp. 48.037.500 atau 84,67% Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan Musrenbang RPJMD dan Konsultasi Publik
- 4) Kegiatan Penetapan RPJMD dengan anggaran sebesar Rp. 42.190.000, dan terealisasi sebesar Rp. 34.438.000, atau 81,63% Kegiatan yang dilaksanakan : Dokumen RPJMD yang telah disahkan dengan PERDA
- 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dengan anggaran sebesar Rp. 291.211.000, dan terealisasi sebesar Rp. 290.915.599, atau 99,90% kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan dokumen RKPD tahun 2017, Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tahun 2017 : Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan tahun 2016, Penyusunan Dokumen KUPA dan PPASP tahun 2016, Keikutsertaan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi, Keikutsertaan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran sebesar Rp. 88.250.000, dan terealisasi sebesar Rp. 88.150.000, atau 99,89% kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD
- 7) Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 211.607.000, dan terealisasi sebesar Rp. 210.299.510 atau 99,38%
- 8) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 146.990.000, dan terealisasi sebesar Rp. 135.115.500 atau 91,92% Kegiatan yang dilaksanakan : Penyusunan Dokumen Laporan Analisis Proyeksi Kompetensi SKPD dalam Implementasi Program dan Kegiatan, Kegiatan Rapat Koordinasi DAK dan TP, Kegiatan Rapat Penyampaian Hasil Kinerja Implementasi SKPD, Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016



Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	48.620.000	48.075.000	185.000	Jumlah kegiatan musrenbang desa dan kecamatan yang dipantau	2 kegiatan
2	Penyusunan Rancangan RPJMD Ruang	542.476.000	452.804.794	89.671.206	Jumlah Dokumen RPJMD yang disusun	2 Dokumen
3	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	56.737.500	48.037.500	8.700.000	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik	1 Kegiatan
4	Penetapan RPJMD	42.190.000	34.438.000	7.752.000	Jumlah Penetapan Dokumen RPJMD yang diperdakan	1 Perda
5	Penyusunan rancangan RKPD	291.211.000	290.915.599	295.401	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	6 Dokumen
6	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	88.250.000	88.150.000	100.000	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pra Musrenbang dan	407 orang



					Musrenbang RKPD	
7	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	211.607.000	210.299.510	1.307.490	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1 Dokumen
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	146.990.000	135.115.500	11.874.500	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Proyeksi Kompotensi SKPD dalam Implementasi Program dan Kegiatan yang disusun	4 Dokumen
		1.428.081.500	1.307.835.903	120.245.597		

o. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 173.610.000, dan terealisasi sebesar Rp. 173.580.000, atau 99,98% Kegiatan yang dilaksanakan : Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pembangunan Ekonomi, Penyusunan Dokumen Study Pendahuluan Destination Branding Kabupaten Bone Bolango
- 2). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 165.890.000, dan terealisasi sebesar Rp. 165.660.000 atau 99,86%



Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program PLKSDA-BM, Kegiatan Koordinasi Program PLKSDA-BM Tingkat Pusat, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- 3). Kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 631.250.000, dan terealisasi sebesar Rp. 605.614.054, atau 95,94%
Kegiatan yang dilaksanakan : Penyusunan dokumen strategis penanggulangan kemiskinan, Penyusunan dokumen verifikasi penduduk miskin desil 1,2,3
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Bone Bolango, Keg. Fasilitas bagi Lembaga/Organisasi yang bergerak di Bidang Penanggulangan Kemiskinan
- 4). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 53.107.500, dan terealisasi sebesar Rp. 52.957.500, atau 99,72%
Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan Rakor Monev Pembangunan Bidang ekonomi, Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	173.610.000	173.580.000	30.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang disusun	2 Dokumen
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	165.890.000	165.660.000	330.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3 Kegiatan



3	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	631.250.000	605.614.054	25.635.946	Jumlah Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Yang disusun	1 Dokumen
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	53.107.500	52.957.500	150.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Yang Disusun	4 Dokumen
		1.023.857.500	988.811.554	35.045.946		

p. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1). Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 54.151.000, dan terealisasi sebesar Rp. 53.200.886 atau 98,25%

Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan koordinasi tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten.

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Polaporan dengan anggaran sebesar Rp. 48.792.500, dan terealisasi sebesar Rp. 46.047.500 atau 94,37% Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan Rapat Koordinasi Monev Bidang Sosial Budaya, Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Monev Bidang Sosial Budaya



Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	54.151.000	53.200.886	950.114	Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Budaya Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan
2	Monitoring, Evaluasi dan Polaporan	48.792.500	46.047.500	2.745.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Yang disusun	4 Dokumen
		102.943.500	99.248.386	3.695.114		

q. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- 1). Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 31.320.000, dan terealisasi sebesar Rp. 31.245.000, atau 99,76% Kegiatan yang dilaksanakan : Kegiatan koordinasi bidang Fisik dan Prasarana Tingkat Provinsi dan Kabupaten,
- 2). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Polaporan dengan anggaran sebesar Rp. 59.011.000, dan terealisasi sebesar Rp. 58.936.000, atau 99,87% Kegiatan yang dilaksanakan : Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang FISPR

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	31.320.000	31.245.000	75.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2 Kegiatan



2	Monitoring, Evaluasi dan Polaporan	59.011.000	58.936.000	75.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Yang disusun	4 Dokumen
		90.331.000	90.181.000	150.000		

Perumahan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.164.646.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.162.505.100,00 atau 98,70 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV satelit, Pembayaran Jasa transaksi keuangan, Pembayaran jasa dekorasi, Pembayaran STNK, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan;

c. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.250.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.230.571.400,00 atau 91,97 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas Luar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersusunnya rencana kerja yang efektif dan efisien.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 245.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.260.000,00 atau 99,70%



kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya.

- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 69.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.897.239,00 atau 77,77 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II dan kendaraan roda, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II dan kendaraan roda 2, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 138.174.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 131.439.000,00 atau 95,13 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Pembayaran jasa pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pembayaran Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor, Pengadaan alat ukur universal, Pengadaan alat kantor lainnya, Pengadaan meubelair, Pengadaan alat pendingin, Pengadaan personal computer, Pengadaan peralatan mini computer, Pengadaan peralatan jaringan, Pengadaan alat komunikasi telephone, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya.

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.



c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi Rp. 60.000.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah mengikuti bimbingan teknis yang mendukung tugas-tugas PNS, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatnya pengetahuan PNS;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.375.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya laporan capaian kinerja perencanaan dan laporan keuangan.

e. Program Pengembangan Perumahan.

- 1) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan anggaran sebesar Rp.60.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.950.000,00 atau 72,70 %.
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan, Pembayaran honorarium Pokja, narasumber dan moderator, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah penyelenggaraan perumahan meningkat
- 4) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan anggaran sebesar Rp. 1.524.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.666.367.500,00 atau 43,70 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian pantas Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah rumah MBR yang ditingkatkan kualitasnya;



f. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan anggaran sebesar Rp. 160.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.628.000,00 atau 99,89 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan jambanisasi bagi MBR, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah tersedianya sarana prasarana rumah sehat bagi masyarakat miskin

g Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1) Kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 197.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 197.196.000,00 atau 99,85 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan jalan khusus kawasan perumahan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah konstruksi jalan, drainase kawasan yang ditingkatkan kualitasnya sarana prasarana rumah sehat bagi masyarakat miskin

h. Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial

1) Kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 75.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.673.000,00 atau 99,89 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah belanja bahan baku rumah, stimulasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah rumah yang rusak akibat bencana alam dapat direhabilitasi

Realisasi Pelaksanaan rogram dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam					



3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya data masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni, sanitasi dasar dan air bersih, sarana dan prasarana umum
- 2) Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program kegiatan strategis
 - a. Rendahnya kualitas SDM

b. Solusi

- 1) Melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengajukan proposal atas adanya bantuan pembangunan rumah layak huni, sanitasi dasar dan air bersih, sarana dan prasarana umum . Mengaktifkan aparat desa dalam pendataan dilingkungan kerjanya
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD dalam penentuan besarnya anggaran, mengusulkan program kegiatan strategis yang merupakan program nasional sehingga bisa didanai oleh APBN
- 3) Peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan teknis lainnya

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.228.288.000 dan terealisasi sebesar Rp.225.783.500 atau 98,90 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Cetak, Belanja Pengandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan;



- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.118.374.250 dan terealisasi sebesar Rp.117.222.300 atau 99,03 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	228.228.000	225.783.500	2.504.500	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	118.374.250	117.222.300	1.151.950	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	1 tahun
		346.662.250	343.005.800	3.656.450		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.232.868.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.224.929.000,00 atau 96,59 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.120.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.118.729.850,00 atau 98,46 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Gedung dan



Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Pengadaan AC), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya / Home Use (Pengadaan Tirai), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Notebook dan PC), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer (Printer), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Hard Disk Eksternal), Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- 3) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 100 %, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan meningkat;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	268.010.000	268.010.000	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diadakan	3 Unit
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	130.350.000	101.627.150	28.722.850	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang di service/dipelihara	33 Unit
2	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	136.363.750	132.228.050	4.135.700	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara	10 Jenis
		534.723.750	501.865.200	32.858.550		



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan mesin Absensi, Pengadaan CCTV,
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Peningkatan Disiplin ASN pada Dinas P2KB&P3A yang tepat waktu dan Tersedianya alat bantu keamanan atau CCTV pada DP2KB&P3A,
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.37.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.612.000,00 atau 98,68 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya pakaian dinas, dan pakaian olah raga ASN;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	3.000.000	3.000.000	-	Jumlah Mesin/Kartu Absensi diadakan	1 Unit
	Kegiatan Pengadaan Pengadaan CCTV	7.000.000	7.000.000	-	Jumlah CCTV diadakan	1 Unit
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000	32.000.000	1.000.000	Jumlah pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan yang di adakan	111 Stell
		43.000.000	42.000.000	1.000.000		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal Rp.50.471.050,00 dan terealisasi Rp. 50.471.050,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan



Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev, Bimtek Jabatan Fungsional Tertentu, Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah ASN DP2KB&P3A yang ditingkatkan Kapasitasnya;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.471.050	50.471.050	-	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang
		50.471.050	50.471.050	-		

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.4.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.100.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyusunan dok.laporan realisasi kinerja dan Keuangan, Penyusunan Dok. Laporan Akuntabilitas Dinas (LAKIP), Penyusunan Dok. Rencana Tahunan Dinas (RENJA), Penyusunan Dok. Rencana Stratejik (RENSTRA), Penyusunan Dok.Indikator Kinerja Utama Badan (IKU), Penyusunan Dok. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Dok. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan, sesuai dan tepat waktu.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.400.000	11.355.000	3.045.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, monitoring, pelaporan dan pengendalian yang disusun	4 Dok
					Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu triwulan/semesteran.	2 Dok

f. Program Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp.135.221.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.476.900,00 atau 99.45 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelayanan KB dan Pembinaan PLKB dan PPKBD, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dalam rangka konsultasi, monev, dan sosialisasi DAK 2016, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannya Kegiatan Keluarga Berencana melalui Pelayanan KB Pembinaan PLKB dan PPKBD yang diadakan
- 2) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.1.383.498.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.218.843.600,00 atau 88.10 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PHO dan FHO) dan Tim Pengawas, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Alkon), Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak), Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Papan Tulis),Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengadaan Tempat Sampah),Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Laptop),Belanja Modal peralatan dan Mesin -



Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat, Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual (LCD Proyektor), Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone (Smartphone), Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Gedung Balai Penyuluh KB, Pagar Balai Penyuluh, Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya sarana dan prasarana PLKB

- 3) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK NON FISIK) dengan anggaran sebesar Rp.534.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.464.461.400,00 atau 86.83 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelatihan / Sosialisasi / Bimtek PLKB, Pendistribusian Barang Alat Kontrasepsi Ke 18 kecamatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Penyuluhan kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PLKB, Penyediaan operasional bagi ASN DP2KBP3A sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terealisasinya operasional Balai Penyuluh dan Meningkatkan pemahaman PLKB yang dibina melalui sosialisasi yang dilaksanakan;
- 4) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK LANJUTAN) dengan anggaran sebesar Rp.42.922.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.42.812.000,00 atau 99.74 %, Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan Botupingge (DAK), Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan Bulango Ulu (DAK), Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan Botupingge (DAK Pendamping), Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Bulango Ulu (DAK Pendamping), Jasa Pengawasan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terealisasinya sarana dan prasarana lanjutan gedung balai serta jasa pengawasannya.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	135.221.000	134.476.900	744.100	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana yang diadakan	2 Keg.
2	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)	1.383.498.000	1.218.843.600	164.654.400	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	14 Paket
3	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	534.900.000	464.461.400	70.438.600	Jumlah Operasional Balai Penyuluh dan cakupan PLKB yang dibina.	18 Kec
4	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Lanjutan)	42.922.000	42.812.000	110.000	Jumlah sarana dan prasarana lanjutan yang di adakan	100%
		2.096.541.000	1.860.593.900	235.947.100		

g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- 1) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reprodksi Remaja (KRR) dengan anggaran sebesar Rp.22.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.150.000,00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Sosialisasi Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, dan penurunannya angka pernikahan di bawah usia 20 tahun;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	22.150.000	22.150.000	-	Jumlah Peserta Remaja yang mengikuti Sosialisasi Advokasi Konseling Informatif Edukatif, (KIE)	100 orang/ remaja
		22.150.000	22.150.000	-		



h. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB dengan anggaran sebesar Rp.155.205.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.155.588.800,00 atau 99.60 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Sosialisasi / pelatihan pengurus kelompok bina keluarga remaja (BKR), Jumbara IMP dalam rangka hari Keluarga Nasional (HARGANAS), Orientasi Pembinaan Kelompok Tribina / UPPKS, Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka lomba kelompok tribina / UPPKS, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka hasil UPPKS pada HARGANAS, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan kegiatan diatas tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam kegiatan kelompok Tribina. (bina kel. Balita, Bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan UPPKS);

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	155.205.000	155.588.800	616.200	Jumlah Peserta sosialisasi / pelatihan pengurus kelompok bina keluarga remaja (BKR)	250 kelompok
		155.205.000	155.588.800	-		

i. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

- 1) Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan anggaran sebesar Rp.19.265.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.265.000,00 atau 100 %,Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimtek dan sosialisasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Lomba Pencatatan dan Pelaporan, Cerdas Cermat dan Paduan Suara Anak, Penyediaan Hadiah Penghargaan terhadap



peserta lomba Pencatatan dan pelaporan, lomba Cerdas Cermat, dan lomba Paduan Suara, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Mewujudkan Pengembangan Bakat anak melalui pelatihan dan lomba cerdas cermat dan paduan suara yang di laksanakan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	19.265.000	19.265.000	-	Jumlah Peserta Pelatihan dan Lomba Pencatatan dan Pelaporan, cerdas cermat dan Paduan suara Anak	1 dok
		19.265.000	19.265.000	-		

j. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 atau 100 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Penyediaan, Fasilitas dan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya operasional, fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) yang di adakan;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak dengan anggaran sebesar Rp.26.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.502.000,00 atau 100 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Sosialisasi dan bimbingan teknis peserta LDK Forum Anak, Penyediaan Pakaian seragam bagi forum anak, Perjalanan Dinas dalam rangka Kongres/Forum Anak, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Mewujudkan aspirasi dan memfasilitasi kebutuhan anak melalui sosialisasi forum anak;



- 3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp.111.104.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.097.000,00 atau 99.99 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Bimbingan Teknis dan sosialisasi peserta penyusun profil BKBPP dan pemutakhiran data pilah gender dan anak, Penyusunan Profil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Orientasi Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak, Peninjauan Lapangan dalam rangka Penyusunan Profil BKBPP & Pemutakhiran Data, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersusunnya Dokumen Profil Badan KBPP, dan dokumen Pemutakhiran Data;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan (P2TP2)	2.500.000	2.500.000	-	Jumlah Operasional, Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	1 Tahun
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	26.502.000	26.502.000	-	Jumlah aspirasi dan kebutuhan anak melalui sosialisasi, bimtek pelatihan forum anak	50 orang
3	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	111.104.000	111.097.000	7.000	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 dok
		140.106.000	140.099.000	7.000		

h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 1) Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp.70.549.950.00 dan terealisasi sebesar Rp.



66.945.000,00 atau 94.89 %.Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Sosialisasi dan bimbingan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Pendampingan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penyediaan fasilitasi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penyediaan fasilitas tenaga ahli dalam hal visum korban (KDRT), Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan menurunnya prosentase terhadap tindak kekerasan tsb;

- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.23.557.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.557.000.00 atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Peninjauan dilapangan dalam rangka pendataan korban tindak kekerasan, korban perempuan dan anak di Polres, Peninjauan dilapangan dalam rangka pendataan korban tindak kekerasan, korban perempuan dan anak di Puskesmas, Peninjauan dilapangan dalam rangka pendataan korban tindak kekerasan, korban perempuan dan anak di kecamatan, Peninjauan dilapangan dalam rangka pendataan KTP, KTA pada 18 Kecamatan, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya Dokumen KTP, KTA dan KDRT yang di susun;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	70.549.950	66.945.000	3.604.950	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	100 org
2	Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	23.557.000	23.557.000	-	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	4 dok
		94.106.950	90.502.000	3.604.950		



i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan

- 1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.76.280.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.280.000,00 atau 97.38 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut kegiatan sosialisasi 10 program PKK dan Peringatan Hari Ibu (PHI), Perancangan perayaan Hari Ibu, Ziarah Dalam rangka Perayaan Hari ibu, Olah Raga Dalam rangka Perayaan Hari ibu, Kegiatan Hari Puncak Perayaan Hari Ibu, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan – kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannya kegiatan sosialisasi 10 program PKK, dan Peringatan Hari Ibu (PHI)
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dengan anggaran sebesar Rp.47.709.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.709.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Sosialisasi Bimbingan Teknis Peserta Pembentukan Vokal Point, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Stuban Pengawasan PUG di Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Jawa Tengah, Penyediaan operasional sebagai penunjang kegiatan – kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Peserta Pelatihan yang memahami tentang Kesetaraan gender;
- 3) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera dengan anggaran sebesar Rp.46.175.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.917.500,00 atau 97.28 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Kegiatan Sosialisasi P2WKSS, Kegiatan Sosialisasi Percepatan penurunan angka kematian ibu bagi peserta P2WKSS, Pencanaan Kegiatan P2WKSS, Sosialisasi Pelatihan keterampilan bagi peserta P2WKSS, Bimbingan Teknis Lintas Sektor, Penilaian Kegiatan P2WKSS, Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Seragam P2WKSS, Penyediaan operasional lainnya sebagai penunjang kegiatan – kegiatan tersebut, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terfasilitasinya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian terhadap Perempuan;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	76.280.000	74.280.000	2.000.000	Jumlah Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan yang diadakan	2 keg
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender	47.709.000	47.709.000	-	Jumlah peserta Pelatihan Analisis Gender bagi fokal foin SKPD	30 org
3	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	46.175.000	44.917.500	1.257.500	Jumlah Peserta sasaran kegiatan P2WKSS.	150 org
4	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28.820.000	27.217.000	1.603.000	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 dok
		198.984.000	194.123.500	4.860.500		

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

- 1) Kurangnya Pemahaman Hukum pada masyarakat sehingga terdapat kecenderungan pada masyarakat untuk tidak melaporkan Kasus KDRT yang terjadi kepada Aparat yang berwenang.
- 2) Adanya Budaya Hukum yang beranggapan bahwa KDRT merupakan Hak Privacy /Persoalan Pribadi Keluarga sehingga merupakan sesuatu yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain.
- 3) Belum Terbentuknya lembaga konsultasi Keluarga (PUSPAGA)
- 4) Belum terbentuknya Kota layak anak dari desa, kecamatan, kabupaten
- 5) Masih belum adanya petugas yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan atau yang mengolah P2TP2A, masih ditangani oleh staf PA Kabupaten.
- 6) Belum Maksimalnya Kepengurusan Pokja PUG



- 7) Perbedaan Gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan ini sering terjadi di berbagai bidang pembangunan
- 8) Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender, dan Belum tersusunnya perangkat analisis, perangkat pemantauan dan evaluasi
- 9) Pemasaran dari usaha keterampilan perempuan di kabupaten Bone Bolango belum bisa di realisasikan sehingga usahanya belum bisa maksimal

b. Solusi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 1) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang KDRT dan penanganannya baik secara hukum maupun secara Kesehatan Psikis korban KDRT
- 2) Perlu adanya pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- 3) Perlu adanya pembentukan kota layak anak melalui Desa, Kec. dan Kabupaten.
- 4) Perlu ada tugas pembantuan dari tim ahli khusus dalam penanganan P2TP2A sehingga segala permasalahan menjadi lebih efisien.
- 5) Ditingkatkan pelatihan, bimbingan terhadap Pokja PUG
- 6) Lebih menekankan kepada perencanaan Responsif gender (PRG) demi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan, sehingga di harapkan dapat menghasilkan anggaran responsive gender (ARG)
- 7) Pembuatan Kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya PUG
- 8) Perlu pengembangan dalam hal monitoring, dan peningkatan pelatihan bagi usaha perempuan.

c. Permasalahan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Jumlah Alat Kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan masyarakat masih kurang memadai
- 2) Minimnya jumlah personil Penyuluh KB .
- 3) Kompetensi SDM bidan yang belum memadai.
- 4) Alat dan obat kontrasepsi masih bergantung pada pendistribusian oleh propinsi, dan jika dropingnya terlambat maka otomatis pelayanan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) terhambat pula.



- 5) Peserta KB baru dan peserta KB aktif belum seluruhnya memiliki Kartu BPJS atau JAMKESMAS, sehingga itu menjadi kendala dalam mengikuti Program KB.
- 6) Pelaporan dan Pengimputan PLKB dari kecamatan ke kabupaten masih secara manual sehingga sulit untuk di pantau atau monitor pencapaiannya.

d. Solusi Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Pengadaan Alat kontrasepsi lebih di tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Penambahan Jumlah PLKB sehingga dapat menyebar di 18 kecamatan dan kualitas pelaporannya menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Seluruh bidan dan petugas medis di harapkan semuanya telah ikut serta dalam mengikuti pelatihan CTU (contraception technology update) teknologi kontrasepsi terkini dan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) sehingga memaksimalkan pelayanan dalam hal IUD dan Implan kepada masyarakat.
- 4) Pemberian Kartu BPJS dan JAMKESMAS kepada masyarakat lebih di tingkatkan jumlahnya.
- 5) Perlu adanya internet dan server guna pemantauan secara cepat perkembangan dan peningkatan jumlah KB aktif, KB baru dan jumlah sasaran PUSnya

**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.857.804.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.725.667.912,00 atau 92,89 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,



Battery Kering), Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembayaran Rekening Telepon, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Pembayaran Jasa Tenaga Ahli, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 708.756.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 708.617.500,00 atau 99,98 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah efektif dan efisien.
- 3) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran sebesar 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.613.000,00 atau 85,38% Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah fasilitas pelayanan kesehatan medical check up untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilaksanakan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	1,857.804.400	1.725.667.12	132.136.488	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	708.756.000	708.617.500	7.952.100	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	1 tahun



3	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	30.000.000	25.613.000	4.387.000	Terlengkapinya pelayanan medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga	1 Tahun
		2.596.560.400	2.459.898.412	136.661.988		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1). Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar 29.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.750.000 atau 100% Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tepat waktu dan digunakan untuk operasional kantor.
- 2). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 532.754.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 475.938.800,00 atau 89,34 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 unsur pimpinan DPRD, kendaraan roda 4 operasional Sekretaris DPRD, kendaraan roda 4 operasional kantor dan kendaraan roda, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 unsur pimpinan DPRD, kendaraan roda 4 operasional Sekretaris DPRD, kendaraan roda 4 operasional kantor dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 unsur pimpinan DPRD, kendaraan roda 4 operasional Sekretaris DPRD, kendaraan roda 4 operasional kantor dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 unsur pimpinan DPRD, kendaraan roda 4 operasional Sekretaris DPRD, kendaraan roda 4 operasional kantor dan kendaraan roda 2. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terpeliharanya asset sekretariat DPRD kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 meningkat .
- 3). Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 203.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 203.503.000,00 atau 99,98 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja bahan bakar minyak/gas (BBM Genset),



Pemeliharaan/perbaikan alat kantor. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor lainnya.,Pengadaan mesin pendingin ruangan, Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Pengadaan Peralatan Jaringan, Pengadaan meja Rapat, Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana & prasarana apaaratur diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- 4) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan instalasi listrik.Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana & prasarana apaaratur diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.
- 5) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 19.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.890.000,00 atau 100 %. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana & prasarana apaaratur diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	29.750.000	29.750.000	0	Jumlah pengadaan kendaraan roda dua yang diadakan	2 Unit
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	532.754.000	475.938.800	56.815.200	Jumlah kendaraan roda empat / roda dua yang dipelihara/diservice	1 tahun
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	203.550.000	203.503.000	47.000	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang dipelihara/diadakan	1 Tahun



4	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	45.000.000	45.000.000	0	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang dipelihara	1 Paket
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan)	19.890.000	19.890.000	0	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang dipelihara/diadakan	1 Paket
		830.994.000	774.081.800	56.862.200		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaiandinas , Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 184.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 184.200.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Batik / Tradisional, Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	184.200.000	184.200.000	0	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus dan pakaian olahraga bagi Pimpinan & Anggota DPRD dan pegawai Set. DPRD yang diadakan	60 Stel
		184.200.000	184.200.000	0		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran Rp. 147.047.100,00 dan terealisasi Rp. 147.047.100,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan. Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev. Bimtek Asdeski, Hasil yang



diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah pengetahuan dan wawasan peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan pelatihan formal	147.047.100	147.047.100	0	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	6 Orang
		147.047.100	147.047.100	0		

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Tapkin dan Renja SKPD. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	0		
		25.000.000	25.000.000	0		

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 14.750.000,-
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp. 10.250.000



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.750.000	14.750.000	0	Jlh dokumen perencanaan kinerja, tapkin, renstra dan lakip	3 Dokumen
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.250.000	10.250.000	0	Jlh dokumen laporan keuangan (CALK, LRA, Neraca)	1 Dokumen
		147.047.100	147.047.100	0		

g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- 1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.793.144.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.708.355.599,00 atau 98,75 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja cetak, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja makanan dan minuman tamu, Belanja perjalanan dinas luar daerah. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase ranperda usul inisiatif eksekutif dan legislative yang ditetapkan menjadi Perda meningkat.
- 1) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dengan anggaran sebesar Rp. 42.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.760.000,00 atau 99,81 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja makanan dan minuman tamu. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase permasalahan mitra kerja komisi yang ditindaklanjuti meningkat.
- 2) Kegiatan Rapat alat kelengkapan dewan dengan anggaran sebesar Rp. 2.273.651.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.273.437.466,00 atau 99,99 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan dewan, Belanja perjalanan dinas luar daerah. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang ditindaklanjuti meningkat.



- 3) Kegiatan Rapat rapat paripurna dengan anggaran sebesar Rp. 765.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 732.174.500,00 atau 95,67 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja sewa los strom, Belanja cetak, Belanja sewa sarana mobilitas darat, Belanja sewa meja/kursi, Belanja sewa tenda, Belanja sewa peralatan studio, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja makanan dan minuman tamu. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pelaksanaan rapat-rapat paripurna yang ditindaklanjuti meningkat.
- 5) Kegiatan Reses dengan anggaran sebesar Rp. 100.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Hasil 0 kegiatan
- 6) Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp. 787.280.000,00 & terealisasi sebesar Rp. 787.215.000,00 atau 99,99 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Perjalanan dinas dalam daerah. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah fungsi pengawasn terhadap pelaksanaan pembangunan dan permasalahan di daerah dapil masing – masing meningkat.
- 7) Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 1.538.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.537.977.997,00 atau 99,99 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah mengikuti bimtek peningkatan kapasitas Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatnya kapasitas anggota DPRD terhadap 3 fungsi DPRD.
- 8) Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan dengan anggaran sebesar Rp. 103.448.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.568.000,00 atau 98,18 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembayaran uang pengganti transport peserta, Belanja cetak, Belanja penggandaan. Belanja sewa sarana mobilitas. Belanja sewa meja/kursi, Belanja makanan dan minuman peserta sosialisasi, Perjalanan dinas dalam daerah. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Persentase Perda yang disosialisasikan meningkat.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.793.144.500	6.708.355.599	84.788.901	Jumlah Perda usul eksekutif dan inisiatif DPRD yang ditetapkan	7 Perda
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	42.840.000	42.760.000	80.000	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi yang dilaksanakan	36 Kali
3	Rapat rapat alat kelengkapan dewan	2.273.651.000	2.273.437.466	213.534	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	75 Kali
4	Rapat rapat paripurna	765.350.000	732.174.500	33.175.000	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan tepat waktu	25 Kali
5	Reses	100.050.000	0	100.050.000	Jumlah reses yang dilaksanakan sesuai dengan dapil masing-masing	0
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	787.280.000	787.215.000	65.000	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	6 Kali
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.538.125.000	1.537.977.997	147.003	Jumlah bimtek/seminar/workshop/pelatihan / sosialisasi yang diikuti	2 Kali
8	Sosialisasi peraturan perundang undangan	103.448.000	101.568.000	1.880.000	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perda	1 Kali
		12.403.888.500	12.183.488.562	220.399.938		

h. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public dengan anggaran sebesar Rp. 692250000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 690300000,00 atau 99,72 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun



anggaran adalah Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD melalui media cetak dan media elektronik meningkat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	692.250.000	690.300.000	1.950.000	Jumlah media cetak/elektronik yang digunakan dalam publikasi perda dan kegiatan DPRD	4 Media
		692.250.000	690.300.000	1.950.000		

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

- Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi aparatur pada sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
- Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Lemahnya sistem pengendalian intern, sehingga cenderung menimbulkan terjadinya berbagai penyimpangan.
- Masih terdapat aparatur berperilaku belum sesuai dengan Kode Etik sebagai Aparatur Pemerintah.

2) Solusi

- Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman tugas dan fungsi aparatur serta pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Antisipasi permasalahan ini dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya SPIP dan perlu dibentuknya Satgas SPIP baik ditingkat SKPD maupun ditingkat pemerintah daerah.



- c. Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

SKPD : DPPKAD

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.042.334.000,
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.738.540.000,00

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.227.920.000,00
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.441.000.000,00

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.44.750.000,00

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.29.290.000,00
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp.15.050.000,00

e. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kegiatan Standar Satuan Harga dengan anggaran sebesar Rp.159.815.000,0.0 dan realisasi sebesar Rp 159.615.000,00
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp.259.100.000,00
- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp.514.170.000,00



- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 209.520.000,00
- 5) Kegiatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.581.215.000,00
- 6) Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.512.980.000,00
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.912.116.000,00
- 8) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.727.450.000,00
- 9) Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.61.550.000,00
- 10) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan anggaran sebesar Rp.713.150.000,00

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.042.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.967.939.427,00 atau 92,8 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Alat Tulis Kantor, Telepon, Listrik, Belanja jasa perbaikan alat kantor, Belanja Cetak, Belanja Pengandaan, Belanja Makan Minum Harian Pegawai, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.738.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.738.420.829,00 atau 99,9 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai



berikut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Laporan Perjalanan Dinas yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	1.042.334.000	967.939.427	74.394.573	Jumlah administrasi pegawai yang diadakan	1 tahun
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	738.540.000	738.420.829	119.171	Jumlah koordinasi konsultasi dalam daerah luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun
		1.780.874.000	1.706.360.256	74.513.744		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.227.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.803.200,00 atau 78,4 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak/Gas Kendraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian suku cadang Kendraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendraan Roda 2 Ess. III dan Ess. IV dan Roda 4 Ess. II, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.441.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.426.892.438,00 atau 96,8 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai



berikut Pemeliharaan bangunan gedung kantor, Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Kursi Tamu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja modal peralatan dan mesin-Alat Komunikasi telepon, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah peningkatan dan kualitas terhadap fungsi penunjang kearsipan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan target yang diharapkan;

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	227.920.000	178.803.200	49.116.800	Jumlah administrasi pegawai yang diadakan	1 tahun
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	441.000.000	426.892.438	14.107.562	Jumlah koordinasi konsultasi dalam daerah luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun
		668.920.000	605.695.638	63.224.362		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.44.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.583.000,00 atau 99,6 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah



Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase pakaian dinas pegawai negeri sipil yang lengkap.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	44.750.000	44.583.000	167.000	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1 tahun
		44.750.000	44.583.000	167.000		

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.29.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.990.000,00 atau 95,5%, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Dokumen Capaian Kinerja/Laporan Kinerja SKPD yang di buat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp.15.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.050.000,00 atau 100 %, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang diterbitkan;



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.290.000	27.990.000	1.300.000	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun
2	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	15.050.000	15.050.000	-	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 tahun
		44.340.000	43.040.000	1.300.000		

e. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kegiatan Standar Satuan Harga dengan anggaran sebesar Rp.159.815.000,00 dan realisasi sebesar Rp 159.615.000,00 atau 99,8 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen ke SKPD se-Kabupaten Bone Bolango Tepat Waktu;
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp.259.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp 250.008.300,00 atau 96,4 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda APBD tahun anggaran 2017 Berkualitas dan Tepat Waktu.
- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp.514.170.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 512.767.500,00 atau 99,7 %, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Berkualitas dan Tepat Waktu
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 209.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 208.636.600,00 atau 99,5%, Hasil yang diharapkan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 Berkualitas dan Tepat Waktu
- 5) Kegiatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.581.215.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 570.364.100,00 atau 98,1 %, Hasil



yang diharapkan Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Berkualitas

- 6) Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.512.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 50.611.200,00 atau 99,5%, Hasil yang diharapkan Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.912.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 904.510.377,00 atau 99,1 %, Hasil yang diharapkan Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tersertifikasi.
- 8) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.727.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 723.340.780,00 atau 99,4 %, Hasil yang diharapkan Tersedianya Dokumen Aset Daerah Memiliki Bukti Kepemilikan
- 9) Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp.61.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp.61.390.000,00 atau 99,7 %, Hasil yang diharapkan Tersedianya Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 10) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan anggaran sebesar Rp.713.150.000,00 dan realisasi sebesar 702.526.975,00 atau 98,5 %, Hasil yang diharapkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Standar Satuan Harga	159.815.000	159.615.000	200.000	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 tahun
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	259.100.000	250.008.300	9.091.700	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 tahun
3	Penyusunan Rancangan Peraturan	514.170.000	512.767.500	1.402.500	Jumlah Dokumen Penyusunan	1 tahun



	Darah Tentang Perubahan APBD				Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	209.520.000	208.636.600	883.400	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 tahun
5	Sistem Informasi Keuangan Daerah	581.215.000,00	570.364.100	10.850.900	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 tahun
6	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	512.980.000	510.611.200	2.368.800	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	912.116.000	904.510.377	7.605.623		1 tahun
8	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	727.450.000	723.340.780	4.109.220	Jumlah Dokumen Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1 tahun
9	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	61.550.000	61.390.000	160.000	Jumlah Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	1 tahun
10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	713.150.000	702.526.975	10.623.025	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 tahun
		4.651.066.000	4.603.770.832	47.623.025		

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang ada pada DPPKAD Kabupaten saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pembayaran tagihan (penginputan nilai tagihan) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama Kantor Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *on line*. Penyebabnya, tidak semua Kantor Kecamatan dapat dilayani jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan SIMDA Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sehingga Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan dalam menyiapkan administrasi tagihan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) masih melakukan penginputan data di Kantor DPPKAD Kabupaten Bone Bolango.

- 2) Masih adanya Barang Milik Daerah pada beberapa SKPD yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, terdapat Barang Milik Daerah tidak diketahui keberadaannya, masih terdapat Aset Tetap Tanah yang berasal dari penyerahan Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Induk) tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, serta terdapat Barang Milik Daerah yang pengelolaannya belum sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari targetnya, terutama Retribusi Daerah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang masih terkendala pada aspek perizinannya.
- 6) Masih rendahnya tingkat disiplin Pejabat dan Staf DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, sehingga perlu lebih tegas dalam penerapan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

b. Solusi

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan berdasarkan kondisi saat ini dengan memperhatikan potensi yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ya jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dapat menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, diperolehnya bukti-bukti kepemilikan terhadap Aset Tetap Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan dan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.



- 3) Terwujudnya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan, serta teratasinya permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Terwujudnya peningkatan Disiplin Pejabat dan Staf DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja DPPKAD Kabupaten Bone Bolango.

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 349.380.000 dan Terealisasi sebesar Rp 334.669.391 atau sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan,Pembayaran honorarium tim pengadaan barang dan jasa,Pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap,Belanja ATK,Belanja Air, Belanja Listrik,Belanja jasa perbaikan alat kantor,Belanja cetak dan penggandaan,Belanja makan dan minuman harian pegawai, Belanja makan dan minum rapat, Belanja makan dan minum tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu /dapat dipertanggungjawabkan

- 2) Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp 293.305.150 dan Terealisasi sebesar Rp 287.456.539 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perjalanan Dinas dalam daerah, Perjalanan Dinas luar daerah Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan Perjalanan dinas yang disusun tepat waktu / dapat dipertanggungjawabkan



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	349.380.000	334.669.391	14.710.609	Jumlah dok laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu	1 tahun
2	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	293.305.150	287.456.539	5.848.611	Jumlah rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	1 tahun

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp 109.480.000 dan Terealisasi sebesar Rp 107.115.100 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bahan bakar minyak Kendaraan dinas roda empat Ess II dan kendaraan roda dua bagi Ess III dan Ess IV, Penggantian suku cadang kendaraan roda empat Ess II dan kendaraan roda dua bagi Ess III dan Ess IV
Penggantian STNK kendaraan roda empat ess II dan kendaraan roda dua Ess III dan Ess IV Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun adalah laporan kendaraan dinas yang dipelihara
- b. Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / Peralatan Gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp 135.448.000 dan Teralisasi sebesar Rp 135.448.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja Jasa pemeliharaan perbaikan alat kantor, Belanja jasa pemeliharaan/perbaikan gedung kantor, Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat kantor lainnya, Belanja modal peralatan dan mesin -



Pengadaan alat pendingin, Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya (homeuse), Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan komputer, Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan peralatan personal komputer, Hasil diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109.480.000	107.115.100	2.364.900	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 tahun
2	Pengadaan dan perlengkapan/peralatan gedung kantor	135.448.000	135.248.000	200.000	Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 tahun

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian kerja lapangan dengan anggaran sebesar Rp 27.210.000 dan Terealisasi sebesar Rp 27.190.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja Pakaian dinas harian (PDH), Belanja Pakaian khusus dan hari – hari tertentu (pakaian olahraga) Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah pegawai penerima pakaian dinas

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	27.210.000	27.190.000	20.000	Jumlah pegawai penerima pakaian dinas	45 stel



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 28.420.000 dan Terealisasi sebesar Rp 28.420.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja ATK Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp 5.336.000 dan Terealisasi sebesar Rp 5.336.000 atau sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja ATK, Belanja penggandaan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.420.000	28.420.000	0	Jumlah dok laporan capaian kinerja	1 Tahun
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5.336.000	5.336.000	0	Jumlah dok laporan keuangan	1 Tahun

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp 48.570.350 dan Terealisasi sebesar Rp 48.570.350 atau sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja Bimbingan Teknis



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang telah mengikuti Diklat/Bimtek

- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan anggaran sebesar Rp 359.639.000 dan Terealisasi sebesar Rp 291.490.493 atau 50% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja Jasa penyiaran/publikasi media elektronik/cetak, Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja sewa ruang/kamar penginapan/sertifikasi barang dan jasa, Belanja sewa mobilitas darat, Belanja sewa generator, Belanja makan dan minum rapat, Belanja makan dan minum peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah , Belanja kursus – kursus singkat/pelatihan, Belanja jasa narasumber

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran jumlah PNSD yang mengikuti diklat, teknis dan fungsi.

- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.452.434.000 dan Terealisasi sebesar Rp 3.352.448.019 atau 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja jasa kantor (paket/pengiriman), Belanja cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja sewa mobilitas darat, Belanja makan dan minuman rapat, Belanja makan dan minuman peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja pakaian olahraga, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja kursus – kursus singkat/pelatihan, Belanja jasa narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan pelatihan formal	48.570.350	48.570.350	0	Jumlah peserta diklat	5 org
2	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS	359.639.000	291.490.493	68.148.507	Jumlah pegawai negeri yang mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi	40 org
3.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	3.452.434.000	3.352.448.019	99.985.981	Jumlah peserta diklat yang mengikuti diklat prajab dan kepemimpinan	Prajab : 484 pim II : 3 org pim III : 11 org pim IV : 40 org

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS dengan anggaran sebesar Rp 203.540.000 dan Terealisasi sebesar 192.098.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja cetak, Belanja Penggandaan, Belanja sewa ruang/gedung/kantor/tempat, Belanja makan dan minuman rapat, Belanja makan dan minuman peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja Jasa narasumber Belanja jasa tenaga ahli, Hasil yang diharapkan yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah rencana pembinaan karir yang disusun berdasarkan analisa jabatan dan jumlah peserta ujian dinas serta jumlah dokumen penataan kepegawaian



- b. Kegiatan seleksi penerimaan CPNS dengan anggaran sebesar Rp 19.300.000 dan Terealisasi Rp 17.369.500 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perjalanan dinas luar daerah, Hasil yang diharapkan yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan konsultasi dalam rangka formasi CPNS
- c. Kegiatan Penempatan PNS dengan anggaran sebesar Rp 481.610.000 dan Terealisasi sebesar Rp 474.260.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja surat kabar/majalah, Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja sewa ruang/kamar/penginapan, Belanja makan dan minuman rapat, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja kursus – kursus singkat/pelatihan, Belanja jasa narasumber
Hasil yang diharapkan yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah pelaksanaan rapat tim penilai kerja berupa jumlah dokumen hasil pelaksanaan assesment PNS
- d. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan anggaran sebesar Rp 234.420.000 dan Terealisasi Rp 230.902.768 atau 98,50 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa ruang/kamar/penginapan, Belanja makan dan minum peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah pegawai negeri sipil yang naik pangkat dan pensiun
- e. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEGDA dengan anggaran sebesar Rp 244.337.500 dan Terealisasi Rp 242.043.500 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja surat kabar/majalah, Belanja kawat/faksimile/internet/tv kabel/tv satelit, Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja makan dan minuman peserta



pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa narasumber, Belanja jasa tenaga ahli, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah sistem aplikasi yang dibangun

- f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dengan anggaran sebesar Rp 16.250.000 dan Terealisasi Rp 14.215.400 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Belanja Perjalanan dinas luar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan
- g. Kegiatan Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS dengan anggaran sebesar Rp 131.320.000 dan Terealisasi Rp 109.210.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja ATK, Belanja cetak, Belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja makan dan minuman peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek, Belanja pakaian kerja lapangan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa narasumber, Hasil yang diharapkan yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah dokumen penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan rencana pembinaan karir dan PNS	203.540.000	192.098.000	11.442.000	Jumlah rencana pembinaan karir yang disusun (analisa jabatan)	50 org, 2 dok
2	Seleksi Penerimaan CPNS	19.300.000	17.369.500	1.930.500	Jumlah laporan CPNS yang lulus seleksi	1 dok



3.	Penempatan PNS	481.610.000	474.260.000	7.350.000	Jumlah pelaksanaan rapat tim penilai kerja	1 tahun
4.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	234.420.000	230.902.768	3.5117.232	Jumlah PNSD yang naik pangkat dan pensiun	606 org
5.	Pembangunan/pengembangan SIMPEGDA	244.337.500	242.043.500	2.294.000	Jumlah sistem aplikasi yang dibangun	1 tahun
6.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	16.250.000	14.215.400	2.034.600	Jumlah dok pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan	100 dok
7.	Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS	131.320.000	109.210.000	22.110.000	Jumlah dok penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS	23 dok

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1. Tidak terlaksananya diklat ESQ karena tidak fleksibelnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga tidak tercapainya target diklat teknis tugas dan fungsi

b. Solusi

1. Menetapkan target yang dapat dicapai yang disesuaikan dengan perencanaan kedepan untuk pelaksanaan kegiatan agar mendukung pencapaian target



SKPD : BAGIAN HUMAS DAN KOMINFO SETDA KABUPATEN BONE BOLANGO

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.191.390.000,-
- 2) Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 277.400.000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 150.200.000,-
- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 159.500.000,-

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,-

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp. 9.490.000,-

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 358.800.000,-

f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 1) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 125.670.000,-

g. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

- 1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.369.800.000,-



2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Kominfo pada tahun 2016 mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp 2.865.000.000,- realisasi Rp. 2.821.778.460,- (98,49%) dan sisa lebih Rp 43.221.540,-.

Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan kinerja Bagian Humas dan Kominfo Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2016 yang terdiri dari 7 program, 10 kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 191.390.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 180.440.000,- atau 94,27 % Hasil Capaian Kerja : Terlaksananya pelayanan penyediaan administrasi perkantoran, realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terdukungnya kebutuhan administrasi Bagian Humas dan Kominfo laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) Tahun, berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan plakat, pembayaran telepon, biaya cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp 191.390.000,- dan terealisasi dana sebesar Rp. 180.440.000,- (94,27 %), permasalahan yang dihadapi yaitu perubahan harga relatif cepat kadang sulit diprediksi. Dengan solusi efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 277.400.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 275.348.500,- atau 99,26 % Hasil Capaian Kerja : Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 1 (satu) Tahun untuk kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp 277.400.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 275.348.500,- (99,26 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada permasalahan di tahun 2016.



No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	191.390.000	180.440.000	10,950,000	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	277.400.000	275.348.500	2.051.500	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dinas dalam dan keluar daerah	1 tahun
Jumlah		468.790.000	455.788.500	13.001.500		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4) Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- atau 100 %
- Hasil Capaian Kerja
 - ✓ Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya kenderaan dinas/operasional Roda empat 1 (satu) unit dengan alokasi dana sebesar Rp 210.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp 210.000.000,- (100 %) permasalahan yang dihadapi tidak ada dan solusi nihil.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.200.000,-
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.652.300,- atau 95 %
- Hasil Capaian Kerja
 - ✓ Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 (satu) paket berupa 3 (tiga) unit



kendaraan dinas/operasional kantor dan Sewa sarana mobilitas darat dengan alokasi dana sebesar Rp 150.200.000,- yang terealisasi sebesar Rp 142.652.300,- (95 %) permasalahan yang dihadapi tidak ada dan solusi nihil.

6) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.500.000,-

- Realisasi anggaran sebesar Rp. 158.893.450,- atau 99,61 %

- Hasil Capaian Kerja

- ✓ Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor realisasi dari kegiatan ini yaitu perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pembelian berupa pendingin ruangan (AC) 2 unit, tripod 1 unit, harddisk eksternal 2 unit, computer PC 2 unit, notebook 1 buah, lemari 1 buah, meubelair 1 paket, kamera 1 buah, handytalky 4 unit, meja kerja 4 buah, CCTV 1 Paket. Alokasi anggaran sebesar Rp. 159.500.000,-, realisasi Rp 158.893.450,- (99,61%). Permasalahan berupa komoditi ini sulit didapat, penyedia jasa relatif jauh, persyaratan pembelian relatif rumit. Solusinya yaitu koordinasi yang semakin intensif antara pembeli dan penyedia jasa.

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional	210.000.000	210.000.000	-	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda empat	1 unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	150.200.000	142.652.300	7.547.700	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun



3.	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	159.500.000	158.893.450	606.550	Jumlah perlengkapan/ peralatan gedung kantor yang diadakan	30 Paket/ Unit /Thn
Jumlah		468.790.000	455.788.500	13.001.500		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan

- Dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,-
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- atau 100 %
- Hasil Capaian Kerja

- ✓ Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan 1 (satu) paket. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu Berupa PDH Kepala Bagian 2 Stel, Pakaian Dinas Harian Staf 19 Stel/Org, Pakaian Olahraga 25 Stel/Org dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.750.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- (100 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	12.750.000	12.750.000	-	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	46 Org/ Stel
Jumlah		12.750.000	12.750.000			



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Dengan anggaran sebesar Rp. 9.490.000,-
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.642.500,- atau 91,06 %
- Hasil Capaian Kerja
 - ✓ Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 (satu) kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur setelah mengikuti kegiatan diklat perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.490.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.642.500,- (91,06 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9.490.000	8.642.500	847.500	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Keg
Jumlah		9.490.000	8.642.500	847.500		

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 358.800.000
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 350.523.501 atau 97,69 %
- Hasil Capaian Kerja
 - ✓ Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi 1 (satu) Tahun. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu tersedianya layanan media komunikasi dan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh publik berupa Layanan Internet Cyber Dedicare, pemeliharaan peralatan telematika, listrik videotron, pengembangan cyber city (Hotspot WMS), pengadaan/pemeliharaan website pemkab Bone Bolango dengan alokasi anggaran sebesar Rp 358.800.000,- yang terealisasi



anggaran sebesar Rp. 350.523.501,- (97,69 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	358.800.000	350.523.501	8.276.499	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi	1 Tahun
Jumlah		358.800.000	350.523.501	8.276.499		

f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 125.670.000
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.688.209 atau 99,21 %
- Hasil Capaian Kerja

- ✓ Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini yaitu terfasilitasinya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.670.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 124.688.209 ,- (99,21 %), kegiatan ini berjalan dengan baik.

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	125.670.000	124.688.209	981.791	Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala	1 tahun



					Daerah/Wakil Kepala Daerah	
Jumlah	125.670.000	124.688.209	981.791			

g. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.369.800.000

- Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.357.840.000 atau 99,12 %

- Hasil Capaian Kerja

- ✓ Tersebar luasnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kerjasama Bagian Humas dan Kominfo dengan Mas media, Berupa penyiaran /publikasi yang berkerjasama dengan Perum LKBN Antara biro Gorontalo, TV Lokal, Radio Lokal, Gorontalo Post, Radar Gorontalo, dan pembuatan Tabloid Kambungu. Alokasi anggaran sebesar Rp 1.369.800.000,- yang terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.357.840.000,- (99,12 %), kegiatan ini dapat berjalan dengan baik relatif tidak ada masalah. Permasalahan dan solusi selama kurun waktu tahun 2016 pada Bagian Humas dan Kominfo seluruh program dan kegiatan dapat berjalan lancar.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.369.800.000	1.357.840.000	11.960.000	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mas media	1 Tahun
Jumlah		1.369.800.000	1.357.840.000	11.960.000		



3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- a. Jumlah PNS sangat terbatas dan kurang sehingga kinerja belum maksimal.
- b. SDM PNS sangat terbatas sehingga kinerja belum maksimal.
- c. Alokasi dana khususnya belanja langsung terbatas sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas.

Solusi :

- a. Memaksimalkan PNS yang ada, kedepan menambah jumlah pegawai.
- b. Efisiensi dana dan mengutamakan skala prioritas, menimbang jumlah dana terbatas.
- c. Mengirimkan diklat PNS untuk peningkatan SDM PNS

SKPD : BAGIAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.2.714.845.000,00
5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.501.335.000,00

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 3.458.600.000,-
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 1.329.500.000,-
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.2.052.850,-
- 3) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan anggaran Rp. 2.051.850.000,-

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 206.250.000,-

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Waki Kepala Daerah



- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 68.770.000,-

2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.714.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.375.041.751,- atau 87,45 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan
2. Pembayaran Honorirum Tim Pengadan Barang dan Jasa
3. Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
4. Belanja Alat Tulis Kantor
5. Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik
6. Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7. Pembayaran Rekening Telepon
8. Pembayaran Rekening Air
9. Pembayaran Rekening Lisktrik
10. Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah
11. Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel
12. Biaya Cetak
13. Biaya Penggandaan
14. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
15. Belanja Sewa Meja Kursi
16. Belanja Sewa Tenda
17. Belanja Sewa Peralatan Kantor
18. Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai
19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
20. Belanja Makan Dan Minu Tamu

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.



- 7) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 501.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 498.436.247,- atau 99,42 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Belanja Bimbingan Teknis.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	2,714,845,000	2,375,041,751	339,803,249	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Bagian Umum	12 bulan
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	501,335,000	498,436,247	2,898,753	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun
		3,216,180,000	2,873,447,998	342.702.002		

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dengan anggaran sebesar Rp. 3.458.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.653.490.000,- atau 76.72 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang.
- 3) Pengadaan kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.



- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 1.329.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.242.383.996,- atau 93,45 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja jasa Service
2. Belanja Penggantian Suku Cadang
3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/ dan Pelumas
4. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5. Belanja Perlengkapan/Aksesoris Kendaraan Bermotor.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.052.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.031.955.936,- atau 98,98 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2. Belanja Bahan Baku Bangunan
3. Belanja Listrik
4. Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kantor
5. Belanja Jasa Pemeliharaan//Perbaikan Gedung Kantor
6. Belanja Jasa Cleaning Service
7. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
8. Belanja Sewa Meja Kursi
9. Belanja Sewa Tenda
10. Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
11. Pengadaan Alat Kantor Lainnya
12. Pengadaan Meubelair
13. Pengadaan Alat Pembersih
14. Pengadaan Alat Pendingin
15. Pengadaan Alat Dapur
16. Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)



17. Pengadaan Personal Komputer
18. Pengadaan Mini Komputer
19. Pengadaan Meja Kerja Pejabat
20. Pengadaan Meja Rapat Pejabat
21. Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
22. Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
23. Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat
24. Pengadaan Peralatan Studio Visual
25. Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- d. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.051.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.957.188.500,- atau 95.39 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
2. Belanja sewa Rumah Jabatan/Dinas
3. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
4. Belanja Makan dan Minum Tamu
5. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
6. Pengadaan Meubelair
7. Pengadaan Alat Pendingin
8. Pengadaan Alat Dapur
9. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
10. Pengadaan Meja Rapat Pejabat
11. Pengadaan Alat Olah Raga Senam

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.



No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional	3.458.600.000	2.653.490.000	805.110.000	Terlaksananya kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 bulan
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	1.329.500.000	1.242.383.996	87.116.004	Terlaksananya kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	2.052.850.000	2.031.955.936	20.894.064	Terlaksananya kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 bulan
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	2.051.850.000	1.957.188.500	94.661.500	Terlaksananya kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan
		8.892.800.000	7.885.018.432	1.007.781.568		

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 206.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.186.000,- atau 96,58 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2. Belanja Pakaian Sipil Harian
3. Belanja Pakaian Sipil Lengkap
4. Belanja Pakaian Dinas Harian
5. Belanja Pakaian Dinas Upacara
6. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7. Belanja Pakaian Adat Daerah
8. Belanja Pakaian Batik Tradisional



9. Belanja Pakaian Olah Raga

10. Belanja Pakaian Kerawang Tradisional

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	206.250.000	199.186.000	7.064.000	Terlaksananya kegiatan Disiplin aparatur	12 bulan
		206.250.000	199.186.000	7.064.000		

4) Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Rp. 68.770.000,- dan terealisasi Rp. 68.770.000,- atau 99,23 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah koordinasi dan kerjasama antar pusat dan daerah terjalin dengan baik.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	68.770.000	68.238.450	531.550	Terjalinnnya Korrdinasi antar pemerintah daerah	1 Tahun
		68.770.000	68.238.450	531.550		

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 5) Masih Lemahnya pemahaman Tupoksi para Aparat sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 6) Mekanisme dan Pola kerja pada setiap Sub Bagian belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



- 7) Masih rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu di tingkatkan.

b. Solusi

- 7) Memberikan pemahaman kepada setiap aparat agar mengetahui dengan jelas tugas, pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas.
- 8) Adanya kejelasan tugas utama setiap sub bagian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- 9) Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada aparat yang membidangi bagian administrasi keuangan dan perencanaan.

SKPD : Bagian Hukum Dan Organisasi

A. Program Dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.130.596.000,-
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1). Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
 - 2). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.123.544.000,-
 - 3). Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (perubahan) dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,-
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.13.340.000
- 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - 1). Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.399.182.000,-
- 5) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 1). Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan public dengan anggaran sebesar Rp.154.742.000,-



- 6) Program Penataan peraturan Perundang-undangan
 - 1). Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan (perubahan) dengan anggaran sebesar Rp. 382.956.000,-
 - 2). Kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 191.640.000,-

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.130.596.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 114.651.070 atau 92.30 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

21. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan;
22. Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap;
23. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
24. Pembayaran Rekening Telepon;
25. Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah;
26. Pembayaran Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel;
27. Biaya Cetak;
28. Biaya Penggandaan;
29. Biaya Makanan dan Minuman Rapat.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	130.596.000	114.651.070	15.944.930	Kelengkapan administrasi perkantoran	12 bulan
		130.596.000	114.651.070	15.944.930		

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- a. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 28.360.000,- atau 98.20 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 2

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.123.544.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 80.833.619 atau 75,20%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja jasa service roda empat 1 dan roda dua 5;
2. Belanja penggantian suku cadang roda empat 1 dan roda dua 5;
3. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas roda empat 1 dan roda dua 5;
4. Belanja STNK.

- c. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (perubahan) dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 12 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan lemari.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	30.000.000	28.360.000	1.640.000	Kendaraan dinas penunjang operasional	1 Unit
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123.544.000	80.833.619	42.710.381	Lancarnya rutinitas operasional kendaraan dinas	12 bulan
3	Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	24.000.000	4.000.000	20.000.000	Gedung kantor terpelihara dengan baik	12 bulan
		177.544.000	113.193.619	64.350.381		



3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.13.340.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.480.000,- atau 97.75%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 14 orang;
2. Pengadaan pakaian olahraga 14 orang.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan pakaian dinas khusus dan pakaian kerja lapangan	13.340.000	11.480.000	1.860.000	Kelengkapan pakaian dinas khusus dan pakaian kerja lapangan	1 Tahun
		13.340.000	11.480.000	1.860.000		

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.399.182.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 384.150.100 atau 99%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan;
2. Honorarium narasumber/tenaga ahli;
3. Belanja alat tulis kegiatan;
4. Belanja benda pos;
5. belanja administrasi pungutan pajak/iuran;
6. belanja cetak dan penggandaan kegiatan;
7. belanja makan minum kegiatan;



8. perjalanan dinas luar dan dalam daerah kegiatan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata pengaduan kasus yang diselesaikan dilingkungan Pemerintah Daerah.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	399.182.000	384.150.100	15.031.900	3 Aduan kasus yang di tindaklanjuti	1 Tahun
		399.182.000	384.150.100	15.031.900		

5) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan public dengan anggaran sebesar Rp.154.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 152.963.300 atau 99,05%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium pelaksana kegiatan;
2. Belanja cetak dan pengadaan kegiatan;
3. Belanja makan dan minum kegiatan;
4. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah kegiatan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata dokumen SOP yang tersedia di setiap SKPD

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	penyusunan sistem informasi terhadap layanan public	154.742.000	152.963.300	1.778.700	dokumen pembuatan SOP SKPD	5 dokumen
		154.742.000	152.963.300	1.778.700		

6) Program Penataan peraturan Perundang-undangan



- a. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan (perubahan) dengan anggaran sebesar Rp. 382.956.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 292.872.172 atau 80,65%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
2. Honorarium tenaga ahli/narasumber kegiatan;
3. Belanja cetak dan penggandaan;
4. Belanja makan dan minum kegiatan;
5. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah kegiatan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

- b. kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 191.640.000,- dengan realisasi Rp. 191.640.000,- atau 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Honorarium panitia pelaksana kegiatan
- b) Honorarium tenaga ahli/narasumber kegiatan;
- c) Belanja alat tulis kegiatan;
- d) Belanja cetak dan penggandaan;
- e) Sewa gedung kegiatan;
- f) Belanja sewa mobilitas sewa kendaraan kegiatan;
- g) Belanja makan dan minum kegiatan;
- h) Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata Peraturan Daerah di sosialisasikan di kecamatan.

No.	Kegiatan	Belanja			keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	382.956.000	292.872.172	90.083.828	Peraturan daerah yang telah diundangkan	4 Perda
2	fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	191.640.000	191.640.000	0	Sosialisasi peraturan daerah	10 Kecamatan
		574.596.000	484.512.172	90.083.828		



3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1). Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas;
- 2). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum;
- 3). Database produk hukum yang tersedia belum valid; dan
- 4). Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Hukum.

b. Solusi

- 1). Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur di Bagian Hukum dan Organisasi.
- 2). Memperbanyak/membukukan Peraturan Daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
- 3). Pengadaan dan peningkatan serta pemeliharaan sistem informasi hukum untuk kelancaran database produk hukum.
- 4). Peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Hukum.

SKPD : BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 104.191.050
- b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 133.300.000

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 63.300.000
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 385.550.000



- c. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 84.960.900
- d. Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 29.500.000
- e. Pembangunan Rumah Dinas (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 18.980.000

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 46.480.000

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp. 26.000.000
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 174.845.000

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.214.000

6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

- a. Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah (Bidang Ekonomi) dengan anggaran sebesar Rp. 105.042.050
- 6. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bidang Pembangunan) dengan anggaran sebesar Rp. 268.491.500
- 7. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 155.410.000

7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- a. Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 292.681.750

8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 65.683.750



B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 104.191.050 dan terealisasi sebesar Rp. 101.366.800 atau 97,29 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan
- 2) mPembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
- 3) Pengadaan Alat Tulis Kantor
- 4) Belanja Surat Kabar/Majalah
- 5) Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak
- 6) Belanja Cetak
- 7) Belanja Penggandaan
- 8) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
- i) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
- j) Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 133.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 122.759.100 atau 92,09 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi.
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 63.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 54.827.800 atau 86,62 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2.
2. Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2.



3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2.
4. Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon III, dan kendaraan roda 2.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 385.550.000 dan terealisasi sebesar Rp. 365.550.000 atau 94,81 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa.
- b. Honorarium Pejabat Pengawasan Teknis Proyek (PPTP).
- c. Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- d. Belanja Alat Tulis Kantor.
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- g. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 84.960.900 dan terealisasi sebesar Rp. 72.995.000 atau 85,92 %.
1. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih.
 2. Belanja Bahan Baku Bangunan.
 3. Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kantor.
 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya.
 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair.
 6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer.
 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe.
 8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer.
 9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan.



10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- h. Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 29.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.500.000 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan Gedung Kantor.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- i. Pembangunan Rumah Dinas (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 18.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.980.000 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan Rumah Dinas.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 46.480.000 dan terealisasi sebesar Rp. 32.220.000 atau 64,83 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).
- 2) Belanja Pakaian Karawo.
- 3) Belanja Pakaian Olah Raga.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp. 26.000.000 dan terealisasi Rp. 25.994.200 atau 98,06 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

3. Belanja Bimbingan Teknis.



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah bimtek yang diikuti meningkat.

- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 174.845.000 dan terealisasi Rp. 174.845.000 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak.
4. Belanja Cetak.
5. Belanja Penggandaan.
6. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis.
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
9. Belanja Jasa Narasumber.
10. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.214.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.214.000 atau 100 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Cetak.
4. Belanja Penggandaan.
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.



6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

- a. Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah (Bidang Ekonomi) dengan anggaran sebesar Rp. 105.042.050 dan terealisasi sebesar Rp. 105.042.050 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan.
4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti meningkat.

8. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bidang Pembangunan) dengan anggaran sebesar Rp. 268.491.500 dan terealisasi sebesar Rp. 263.611.500 atau 98,00 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Listrik.
4. Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak.
5. Belanja Jasa Dekorasi.
6. Belanja Cetak dan Penggandaan.
7. Belanja Sewa Meja Kursi.
8. Belanja Sewa Tenda.
9. Belanja Sewa Peralatan Studio.
10. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
12. Belanja Jasa Narasumber.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti meningkat.



9. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 155.410.000 dan terealisasi sebesar Rp. 155.410.000 atau 100 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.
3. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu.
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang diadakan ditindaklanjuti meningkat.

7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- a. Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 292.681.750 dan terealisasi sebesar Rp. 291.751.750 atau 99,91 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit.
4. Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak.
5. Belanja Cetak dan Penggandaan.
6. Belanja Makanan dan Minuman.
7. Belanja Perjalanan Dinas.
8. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Jumlah peserta sosialisasi SPSE V.4 meningkat.

8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 65.683.750 dan terealisasi sebesar Rp. 63.626.300 atau 91,63 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Belanja Alat Tulis Kantor.
3. Belanja Jasa Kantor.



4. Belanja Cetak dan Penggandaan.
5. Belanja Makanan dan Minuman.
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
7. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Hasil Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti meningkat

C. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih Kurangnya layanan administrasi SKPD dalam Pelayanan Publik
- 2) Kurangnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Masih Kurangnya Disiplin Aparatur Pemerintah
- 4) Masih Kurangnya Peningkatan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Kurangnya Koordinasi Antar Pemerintah Daerah
- 6) Masih Kurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat yang masuk pada Pemerintah

b. Solusi

- 1) Terlaksananya dengan baik penyerapan anggaran Kabupaten dengan adanya Bimtek e-monev
- 2) Bertambahnya Jumlah Penyedia yang ikut Lelang dengan Menggunakan Sistem layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- 1) Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran, Anggaran Rp.173.908.000,- Realisasi Rp 166.700.000,- (95,86 %) Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembayaran honorarium Pelaksana Kegiatan, Pengadaan Alat tulis kantor, Biaya Penggandaan, Biaya makan minum rapat, Biaya makan Minum harian pegawai, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Laporan administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu dan akuntabel
- 2) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah, Anggaran Rp.151.131.000,-, Realisasi Rp.150.410.597,- (99,52%), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam Daerah, Hasil yang diharapkan



dari kegiatan ini adalah Laporan administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu dan akuntabel

- a. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran Rp 70.188.000,- Realisasi Rp.68.285.250,- (97,29 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perawatan jasa service kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Penggantian Suku cadang kendaraan roda 4 dan 2, Belanja bahan bakar kendaraan roda 4 dan 2, Belanja pajak kendaraan bermotor, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terawatnya kendaraan dinas operasional kantor
 - 2) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor, Anggaran Rp. 51.965.000,- Realisasi Rp.49.385.000,- (95,04 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan kendaraan roda 2, Pengadaan meubeleir, Pengadaan personal komputer dan kelengkapan komputer, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan, Anggaran Rp. 18.270.000,- Realisasi Rp.17.824.000,- (97,56 %) Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian dinas, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran, Rp.13.000.000,- RealisasiRp.9.488.000,- (72,98 %), Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti bimbingan teknis, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - 1) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, Anggaran Rp. 70.700.000,-, Realisasi Rp.60.700.000,- (85,86 %) Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat muspida, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat muspida yang dihadiri seluruh unsur muspida



- 2) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah (Bidang Pemerintahan), Anggaran Rp.9.000.000,-, Realisasi Rp.0,- (0,00 %), Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan
- 3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - 1) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, Anggaran Rp. 76.300.000,-, Realisasi Rp.76.080.000,- (99,71%), kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembahasan batas wilayah antar kabupaten, Pembahasan batas wilayah antar provinsi, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen batas wilayah

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih Kurangnya layanan administrasi SKPD dalam Pelayanan Publik
- 2) Masih Kurangnya Disiplin Aparatur Pemerintah
- 3) Masih Kurangnya Peningkatan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Lemahnya reward dan punishment

b. Solusi

- 1) Pemberian sanksi yang dipertegas
- 2) Antisipasi peningkatan capaian kinerja dan keuangan

Skpd : bagian kesra

A. Program dan kegiatan

- 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran sebesar Rp 32,343,000,-
- 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 25,685,500,-
- 3 Program peningkatan disiplin aparat dengan kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 5,250,000,-
- 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :



- a) Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantor dengan anggaran sebesar Rp 72,367,000,-
 - b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 161,163,000,-
- 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp 79,306,800,-
 - b) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp 42,850,000,-

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - 6 Pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran sebesar Rp 32,343,000,- dan realisasi sebesar Rp 32,343,000,- atau 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Bimbingan Teknis
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
 - i. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 25,685,500,- dan realisasi sebesar Rp 25,265,000,- atau 98,36%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 5,250,000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantor dengan kegiatan :
 - a) Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantor dengan anggaran sebesar Rp 72,367,000,- dan realisasi sebesar Rp 68,080,000,- atau 94,07%



Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan.

- b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 161,163,000,- dan realisasi sebesar Rp 161,072,700,- atau 99,94%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp 79,306,800,- dan realisasi sebesar Rp 68,165,100,- atau 85,95%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.

- b) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp 42,850,000,- dan realisasi sebesar Rp 42,850,000,- atau 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Mesin Ketik, Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat, Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat, Pengadaan Peralatan Studio Visual.

8) **Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 142.586.600,- dan terealisasi sebesar Rp.141.829.072,- atau 99,47%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada



akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik

- 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 84.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.887.800,- atau 99,90% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Meningkatnya efektifitas Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 51.768.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.130.000,- atau 98,77%, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD;
- 2) Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.000.000,- atau 96,91 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Modal Pengadaan AC, Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC, Belanja Modal Pengadaan Printer, Belanja Modal Pengadaan Alat Penampung dan Instalasi Air Bersih, Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Tersedianya dan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Yang Menunjang;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai



berikut Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Olahraga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.475.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut Penyusunan Laporan Tepat Waktu
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp Rp. 1.600.000,- atau 100 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan anggaran sebesar Rp 36.500.000,- dan terealisasi sebesar 36.428.000,- atau 99,80 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Belanja Bimbingan Teknis
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Meningkatnya kompetensi Aparatur

9) Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Jumlah Sumber Daya Manusia dibidang Akuntansi Masih Kurang
1. Sarana dan Prasarana Yang Masih Kurang Sehingga Mempengaruhi Kelancaran Pencapaian Program dan Kegiatan
2. Minimnya Anggaran Untuk Pembangunan Sarana,Prasarana dan Operasional Kegiatan Kecamatan Mempengaruhi Kinerja dan Kualitas Pekerjaan
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap aparat harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis serta



sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.

b. Solusi

1. Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah
2. Melakukan analisis ketersediaan material pendukung untuk pelaksanaan program dan kegiatan
3. Memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki serta menggalang kerja sama dengan stakeholder dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung pencapaian target dan kinerja setiap program dan kegiatan.

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.171.496.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.163.175.701,00 atau 95,15 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- k) Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan
- l) Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
- m) Pengadaan Alat Tulis Kantor
- n) Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik
- o) Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- p) Pembayaran Rekening Telepon
- q) Pembayaran Rekening Air
- r) Pembayaran Rekening Listrik
- s) Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah
- t) Biaya Cetak
- u) Biaya Penggandaan
- v) Biaya Makanan dan Minuman Rapat
- w) Biaya Makanan dan Minuman Tamu



Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.82.369.000,00 atau 99,84 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi.
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.52.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.290.000,00 atau 99,89 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- x) Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2.
- y) Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2.
- z) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon III, dan kendaraan roda 2.
- aa) Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.43.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.43.000.000,00 atau 100 %.



Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 4) Pengadaan Alat Pendingin pendingin ruangan.
- 5) Pengadaan Komputer dan Note Book.
- 6) Pengadaan Printer.
- 7) Pengadaan Meja Kerja Pejabat.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.227.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.225.052.000 atau 99,14 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Mobil Dinas
2. Pengadaan Motor Dinas

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Jumlah Kendaraan dinas yang memadai

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.14.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.350,00 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 8) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- 9) Pengadaan Pakaian Olah Raga.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

- b. Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi dengan anggran sebesar 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar 2.500.00,00 atau 100 %

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata disiplin pegawai meningkat



4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.35.603.000,00 dan terealisasi Rp.35.603.000,00 atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.
5. Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan
6. Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev
7. Bimtek Kepegawaian

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- c) Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan dan Desa yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
- d) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor Camat dan Desa
- e) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu antara lain teknik bangunan dan tehnik komputer
- f) Belum adanya fasilitasi layanan internet

b. Solusi

- 10) Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.
- 11) Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk pelaynan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
- 12) Meningkatkan kemampuan SDM berupa pemberian Bimbingan Teknis, Pelatihan dan sosialisasi terhadap ASN
- 13) Memanfaatkan keberadaan SKPD yang ada untuk pengembangan IPTEK



Kec. Bone

A. Program dan kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.147,380,000
- b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.48.153.000,00

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.57.800.000,00
- b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.18.500.000,
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000,00
- d. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.242.320.000,00.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,00

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp.47.000.000,00

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.12.396.000,00

6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dengan anggaran Sebesar Rp. 18.766.000.00

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.147,380,000 dan terealisasi sebesar Rp. 145,716,000 atau 98,87%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan,Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersi, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.48.153.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.47.933.400,00 atau 99,54 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten dan provinsi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.57.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.56.950.000,00 atau 98,52 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon III dan kendaraan roda 2. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran



adalah pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya.

- b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.18.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.118.729.850,00 atau 99,40 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pengadaan Komputer Pengadaan Printer, Pengadaan Kursi Rapat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.840.000,00 atau 99,70 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembangunan Halaman Kantor Camat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksanannya Pembangunan Halaman Kantor Camat
- e. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.242.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.232.320.000,00 atau 95,87 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda dua, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terpenuhinya Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan peruntukannya.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur.



4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran Rp.47.000.000,00 dan terealisasi Rp.35.672.000,00 atau 75,90 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidangnya.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.12.396.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.396.000,00 atau 100 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

6. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terpenuhinya Dokumen laporan keuangan dan kinerja SKPD.

6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dengan anggaran Sebesar Rp. 18.766.000.00 dan Terealisasi sebesar Rp. 18.766.000.00 atau 100 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil yang diharapkan akan dicapai adalah Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih terdapat Aparatur Kecamatan yang kurang peduli dalam menjalankan tugas yang di berikan oleh camat



2. Lemahnya pemahaman pemahaman aparatur kecamatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang menyangkut tupoksi/jabatan yang didudukinya.
3. Tidak memadainya Jumlah aparatur kecamatan yang bertugas melakukan pelayanan pada kantor Camat Bone

b. Solusi

1. Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan pembinaan dan ‘pemberian sanksi kepada aparatur kecamatan yang kurang peduli dengan tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang berprestasi oleh Pemerintah Kecamatan dengan diberikan penghargaan.
2. Melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dalam bentuk Bimbingan Teknis kepada aparatur kecamatan.
3. Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai pada kantor camat sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.172.446.620,00 dan terealisasi sebesar Rp.171.661.772.000 atau 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Biaya Penggandaan, Biaya Cetak, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.91.105.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.009.300,00 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi,



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi luar dan dalam daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 149.620.000,000 atau 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium PPTK, Honorarium PHO, Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Penggandaan, Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan, Pengadaan Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang dibangun selesai tepat waktu.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.Rp.55.733.380,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.733.345,00 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 , kendaraan roda 2 operasional, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 , kendaraanroda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 kendaraan dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor kendaraan roda 4,kendaraan roda 2 operasional dan kendaraan Roda 4 dan Kendaraan roda 2, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas kendaraan dinas/operasional.yang dipelihara
- c. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.105.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.500.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Biaya Pengadaan LCD, Biaya Pengadaan Meubelair, Biaya Pengadaan Tirai Gorden, Biaya Pengadaan Komputer, Biaya Pengadaan Printer, Biaya Pengadaan Lemari, Biaya Pengadaan Alat-alat Studio



- d. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.9.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.380.000,00 atau 100%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Mesin /Kartu Absensi dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 50 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.18.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.700.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas sarana peningkatan disiplin aparatur (pakaian dinas) yang diadakan meningkat.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan anggaran Rp.47.949.400,00 dan terealisasi Rp.49.949.400,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bimtek Perencanaan, Keuangan, Mind set Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.4.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.965.000,00 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Biaya Belanja ATK, Biaya Perjalanan Dinas Dalam



Daerah Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.

6) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desadengan anggaran sebesar Rp.16.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.875.000,00atau 100 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Biaya Honorarium PPTK, Biaya Tim Pengendali, Biaya Atk, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perlengkapan Peralatan Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas kegiatan pelatihan sistem keuangan desa yang diadakan meningkat.

B. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Tidak adanya konsistensi petugas dalam menyelesaikan pelayanan masyarakat di kecamatan
- 2) Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Lemahnya sistem pengendalian intern pada setiap SKPD, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan.

b. Solusi

- 1) konsistensi petugas dalam menyelesaikan pelayanan masyarakat di kecamatan
- 2) Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.
- 3) Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.



Kec. Suwawa tengah

A. Program Dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 202.735.900,00
 - a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 54.285.000,00
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Camat dengan anggaran sebesar Rp. 236.180.000,00,-
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 17.510.000,00,-
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.68.028.800,00
 - d. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.19.150.000,00
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.825.000,00
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.34.085.300,00
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.800.000,00
- 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00
- 7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.



- a. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,00

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 202.735.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.456.900 atau 99,95 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Bahan Baku Bangunan, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Pembayaran Internet (rasionalisasi), Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu , Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 54.285.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.046.800 atau 99,98 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Camat dengan anggaran sebesar Rp. 236.180.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 236.180.000,00,-atau 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Rumah Dinas Camat Suwawa Tengah.
- b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 17.510.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp.68.028.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.68.081.800 atau 99,89 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2., Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon II, dan kendaraan roda 2.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.19.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.150.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pengadaan mesin Absensi Sidik Jari, Pengadaan Lemari Kayu (Rasionalisasi), Pengadaan kipas angin tempel (rasionalisasi), Pengadaan PC komputer all in one, Pengadaan printer laserjet, Pengadaan internet (rasionalisasi), Pengadaan meja resepsionis (rasionalisasi), Pengadaan meja komputer, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.025.000,00 atau 79,68 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan



dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata kehadiran pegawai meningkat.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp.34.085.300,00 dan terealisasi Rp.34.085.297,00 atau 99,99 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimbingan Teknis Aparatur Perencanaan, Bimbingan Teknis Aparatur Keuangan, Bimbingan Teknis Camat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.170.000,00 atau 92 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA), Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (RENJA), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.
- 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - a. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.000.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi tentang evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase peserta kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang tindaklanjutnya meningkat.



- 7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat akan taat peraturan hukum dan perundang-undang.

C. Permasalahan Dan Solusi

- a. Permasalahan
 - 1) Masih Lemahnya pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Suwawa Tengah.
 - 2) Lemahnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.
 - 3) Belum Optimalnya keberdayaan masyarakat pedesaan.
 - 4) Belum Optimalnya sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai di Kecamatan Suwawa Tengah.
 - 5) Belum Optimalnya Pembenahan dan peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Suwawa Tengah.
- b. Solusi
 - 1) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Suwawa Tengah.
 - 2) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin
 - 3) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu)
 - 4) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
 - 5) Antisipasi permasalahan ini dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya SPIP dan perlu dibentuknya Satgas SPIP baik ditingkat SKPD maupun ditingkat pemerintah daerah.



- 6) Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

Kecamatan Kabila Bone

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.107.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.855.000 atau 94 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembayaran Rekening Air, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Biaya Makanan dan Minuman Tamu Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 71.908.055,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.886.200,00 atau 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi luar dan dalam daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 110.646.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.336.000,000 atau 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Penggandaan, Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan, Pengadaan Modal Gedung dan



- Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana aparatur yang dibangun selesai tepat waktu.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. Rp.79.742.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.76.423.200,00 atau 96 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 eselon III, kendaraan roda 4 operasional dan kendaraan roda 2. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas kendaraan dinas/operasional.yang dipelihara
- 5) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.39.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.650.202,00 atau 80 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Biaya Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Biaya Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pengadaan Alat Pendingin, Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan meja kerja, Pengadaan Personal Komputer, Pengadaan Peralatan Mini Komputer, Pengadaan Peralatan Studio Visual,Pengadaan Peralatan Cetak Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.15.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.400.000,00 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan



adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas sarana peningkatan disiplin aparatur (pakaian dinas) yang diadakan meningkat.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan anggaran Rp.44.356.045,00 dan terealisasi Rp.35.151.045,00 atau 79 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monev, Bimtek Jabatan Fungsional Tertentu
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.8.704.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.296.000,00 atau 95 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja yang diterbitkan.
- 6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - a. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan anggaran sebesar Rp.16.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.790.000,- atau 99,9% Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelatihan Sistem Keuangan Desa
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektivitas kegiatan pelatihan sistem keuangan desa yang diadakan meningkat.



B. Permasalahan Dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a. Tidak adanya konsistensi petugas dalam menyelesaikan pelayanan masyarakat di kecamatan
 - b. Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Lemahnya sistem pengendalian intern pada setiap SKPD, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan.
- 2) Solusi
 - a. konsistensi petugas dalam menyelesaikan pelayanan masyarakat di kecamatan
 - b. Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

Kec. Suwawa selatan

10) Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 160.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.259.400,00 atau 99,99 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan : Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembelian PulsaTelepon, Pembayaran Rekening Listrik, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Makanan dan Minuman Rapat, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.



- b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 83.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 83.046.897, atau 99,94 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 30.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.565.000,00 atau 99,98 %.

- 2) Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Perawatan jasa service kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Kondisi Kendaraan dinas Operasional yang dalam Kondisi Baik.

- 3) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 50.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.700.000,00 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pemeliharaan/perbaikan alat kantor, Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor, Pengadaan alat dan Perlengkapan Kantor.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

- 4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 250.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.249.120.000,00 atau 99,41 %.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah : pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (1 Unit) dan Pengadaan Kendaran Dinas Roda 2 (2 Unit), Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya Sarana Kendaraan Operasional demi menunjang efektifitas Pelaksanaan Tugas ASN.

- d) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100 %.

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah efektifitas sarana dan prasarana apaaratur yang diadakan/diperbaiki/dipelihara meningkat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 13.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.425.000,00 atau 100 % Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pengadaan Pakaian Olah Raga. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase rata-rata Kedisiplinan berpakaian pegawai meningkat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Kegiatan Bimbingan Teknis dengan anggaran Rp. 26.004.700,00 dan terealisasi Rp. 26.004.700,00 0 atau 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Bimtek Peningkatan kapasitas Aparat Perencanaan, Bimtek Penerapan Aplikasi e-monep, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah jumlah peserta yang mengikuti bimtek meningkat.

1) **Permasalahan Dan Solusi**

1. Permasalahan

- a) Masih terdapat Pelaksana Kegiatan SKPD yang cenderung kurang Disiplin sebagai akibat dari lemahnya reward (penghargaan) atas pejabat yang berprestasi dan punishment (hukuman) terhadap pejabat yang tidak Disiplin.



- b) Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap Tupoksi masing masing.
- c) Kurangnya Aparat Perencanaan dan Keuangan yang mengikuti Bimtek Keuangan dan Perencanaan
- d) Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik
- e) Lemahnya Kapasitas Aparatur Desa dalam hal pemahaman Tata Kelola Pemerintahan Desa.
- f) Kurangnya Pejabat SKPD yang telah mengikuti Diklat PIM

b. Solusi

- 1) Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan pembinaan dan ‘pemberian sanksi kepada pejabat yang Kurang Disiplin, dan yang berprestasi oleh Pemerintah daerah dengan diberikan penghargaan.
- 2) Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman akan Tupoksinya.
- 3) Memberikan Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Peran serta mereka dalam penentuan arah kebijakan pemerintah.
- 4) Intens melakukan pembinaan dan Fasilitasi terhadap Aparatur Desa dalam hal pengelolaan Tata Pemerintahan.

Mengikut Sertakan Para Pejabat SKPD dalam Kegiatan Diklat PIM



B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dengan kegiatan

- 1) Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 93.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp 93.140.000,- atau 100% Hasil yang di harapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Produksi Perikanan yang di Imbangi dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan.
 - Peningkatan Tingkat Komsumsi Masyarakat perkapita per tahun
 - Pengelolaan Lingkungan yang ditindaklanjuti melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan Pencegahan Illegal Fishing
 - Peningkatan SDM baik Aparatur maupun SDM Pembudidaya, Nelayan maupun pengolah ikan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	93.140.000	92.890.000	99,7%	Tersedianya Dokumen	7 Dokumen
		93.140.000	92.890.000	99,7%		



b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, dengan kegiatan :

- 1) Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan dengan anggaran sebesar Rp.12.475.000,- dan realisasi sebesar Rp.12.475.000,- atau 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah MONEV Program Konservasi, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penguatan POKMASWAS

**Tabel IV.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	12.475.000	12.475.000	100%	Terbentuknya Kelompok PKMAS WAS	1 Kelompok
		12.475.000	12.475.000	100%		

c. Program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 2.054.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.779.030.000,- atau 86% dengan rincian sbb:

- Pengadaan Perahu Pelang < 3 GT dan mesin katinting 13 PK sebanyak 5 unit Rp. 230.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.000.000,- atau fisik 100 % .keu 90%
- Pengadaan mesin katinting 6 PK sebanyak 92 unit Rp. 585.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 571.274.000,- atau fisik 100 % keu 97%.
- Pengadaan mesin katinting 9 pk sebanyak 68 unit Rp. 508.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 495.550.000,- atau fisik 100 % keu 98%



- Pengadaan alat tangkap purseine 1 unit Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 239.525.000,- atau fisik 100 % .keu 30%
- Pengadaan Rumpon 5 unit Rp. 340.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 312.543.000,- atau fisik 100 % keu 92%.
- Pembangunan Portal dan pos jaga Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.910.000,- atau fisik 100 % keu 99%.
- Pengadaan fasilitas kantor pelabuhan perikanan Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.786.000,- atau fisik 100 % .keu 99%

Tabel IV.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	37.435.000	37.405.000	99,9%	Terlaksananya Pendampingan Pada Kelompok Nelayan	6 Dokumen
2	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	71.800.000	56.279.000	78,4%	Terlaksananya Pemeliharaan TPI secara Berkala	12 Bulan
3	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	45.660.000	45.660.000	100%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	108 Unit

d. Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 872.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp 678.467.000,- atau 78% dengan rincian sbb:



- Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.400.000,- atau 100 %.
 - Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Rumah jaga dan pagar bbi pantai tongo Rp. 23.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau fisik 100 % .keu 0%
 - Pembangunan Rumah jaga BBI pantai tongo Rp. 199.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.240.000,- atau 100 %.
 - Pembangunan Pagar BBI Pantai tongo Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0- atau keu 0% Fisik 100 %.
 - Pengadaan Fasilitas Rumah BBI Pantai tongo Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau fisik 100% keu 0%
 - Pengadaan alkon 7 unit Rp 29.953.000,- dengan realisasi Rp 29.953.000,- atau 100%.
- 2) Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.005.000 atau 37,56%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan bibit ikan unggul	8.000.000	3.005.000	38%	Tersediannya Benih Ikan Unggul	3.000 ekor
2	Pembinaan dan pengembangan perikanan	516.500.000	451.769.800	87,5%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	1 Paket

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- a. Tingkat Produksi Perikanan masih belum maksimal, belum sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango.



- b. Belum termanfaatkannya Pengembangan kawasan budidaya perikanan laut, dan air tawar
- c. SDM aparatur, Pembudidaya/Nelayan/Pengolah/Pedagang Ikan belum mampu menyesuaikan dengan teknologi yang ada.

2. Solusi

- a. Perlu adanya pengembangan kawasan budidaya udang vaname, kja laut dan budidaya air tawar
- b. Melakukan pembangunan, rehabilitasi, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan perikanan
- c. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 10 GT dan alat tangkapnya
- d. Pengadaan alat bantu penangkap ikan
- e. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan kapal
- f. Mengadakan induk ikan ber varietas unggul agar menghasilkan benih-benih ikan yang unggul
- g. Melakukan perbaikan lingkungan budidaya melalui pengelolaan lingkungan perikanan budidaya yang berkelanjutan, rehabilitasi perairan budidaya, perbaikan kualitas lingkungan dan pembinaan kesehatan ikan
- h. Meningkatkan tingkat konsumsi ikan/kapita/tahun pada masyarakat melalui pendekatan arah kebijakan pengembangan dan penguatan pemasaran hasil perikanan di kabupaten Bone Bolango
- i. Penambahan sarana dan prasarana pemasaran
- j. Pembinaan, pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan, nelayan, pedagang/pengolah hasil perikanan serta aparatur dinas.

Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 709,034,000 dan terealisasi sebesar Rp. 708,414,000 atau 99,91%, Kegiatan yang dilaksanakan Gebyar HUT Bone Bolango, Kegiatan Nou dan Uti Tingkat kabupaten, Kegiatan Nou dan Uti Tingkat Provinsi, Kegiatan



Walima, Kegiatan Festival Dangdut, Kegiatan Festival Lombongo, Putri Pariwisata, Festival Tumbilatohe, Pameran Apkasi, Kemilau Sulawesi, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Persentase meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri	709,304,000	708,414,000	434,000	Jumlah promosi pariwisata yang buat dn diikuti	10 Kegiatan

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan dengan anggaran sebesar Rp. 1,011,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 1,009,410,000 atau 99,84%, Kegiatan yang dilaksanakan Pengembangan Objek Wisata Lombongo, Pengembangan Objek Wisata Botutonuo, Pengembangan Objek Wisata Molotabu, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Peresentase Peningkatan Pembangunan dan Kelengkapan Fasilitas Saran dan Prasarana Objek Wisata;
- 2) Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Swera Standarisasi dengan anggaran sebesar Rp. 15,500,000 dengan realisasi sebesar Rp. 15,500,000 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Peresentase Peningkatan Pembangunan dan Kelengkapan Fasilitas Saran dan Prasarana Objek Wisata;

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	1,011,000,000	1,009,410,000	1,590,000	Jumlah objek pariwisata unggulan yang dikembangkan	2 Owista



2	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Standarisasi	15,500,000	15,500,000	0	Jumlah peserta sosialisasi dn penerapan swera standarisasi	40 Orang

c. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi Database dengan anggaran Rp. 76,750,000 dan terealisasi sebesar Rp. 76,325,000 atau 99,45%, Kegiatan yang dilaksanakan Pembuatan Website Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Peresentase Jumlah Pengembangan kemitraan yang dibuat;
- 2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan dengan anggaran sebesar Rp. 34,180,000 dan terealisasi sebesar Rp. 33,875,000 atau 99,11%, Kegiatan yang dilaksanakan, Pelatihan Pembuatan Cinderamata, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran Peresentase Jumlah Pengembangan kemitraan yang dibuat;

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan dan Penguatan Informasi Database	76,750,000	76,325,000	425,000	Jumlah Pengembangan dn penguatan informasi database	1 Web
2	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	17,650,000	17,325,000	325,000	Jumlah Peserta dalam kegiatan pengembangan kemitraan	30 Orang
		94,400,000	93,650,000	750,000		

4. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten baik di Bidang Perhubungan maupun Pariwisata



- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang ASN dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya
- 3) Masih belum meratanya pembangunan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan di sepanjang jalan di Kabupaten Bone Bolango
- 4) Masih Terbatasnya Pagu anggaran yang diberikan sehingga belum dapat mengkomodir kegiatan tambahan yang lain
- 5) Terhentinya kegiatan pemungutan retribusi di Pos-pos perhubungan dikarenakan dapat terindikasi pungutan liar
- 6) Belum adanya perda atau perbub yang menjadi payung hukum dalam pemungutan retribusi baik dibidang Perhubungan Maupun Pariwisata
- 7) masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian dari setiap Objek Wisata yang ada di Kabupten Boen Bolango

b. Solusi

- 7) Lebih memaksimalkan pelatihan ataupun bimbingan bagi ASN
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tepat agar dapat memaksimalkan kinerja ASN
- 9) Pemerataan pembangunan Rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan guna menekan dan meurunkan jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Bone Bolango
- 10) Pemberian Alokasi Dana tepat sehingga dapat mengkomdir kegiatan-kegiatan penunjang yang lain
- 11) pengaktifan kembli pos-pos pemungutan retribusi
- 12) adanya payung huku yang jelas mengenai retribusi baik di bidang Perhubungan maupun di bidng Pariwisata
- 13) Meingkatkan kegiatan sosialisasi sadar keselamatan berlalu lintas serta memaksimalkan pembinaan kelompok sadar wisata



Pertanian

- a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :
- 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan anggaran sebesar Rp.25.902.700,- dan realisasi sebesar Rp.25.902.700,- atau 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Belanja Alat Tulis Kantor

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	25.902.700	25.902.700	100%		

- b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :
- 1) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.726.117.200,- dan realisasi sebesar Rp.663.164.200,- atau 91%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
 - 2) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.5.092.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.827.038.600,- atau 95%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi



- 3) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK Tambahan P3K2/UD Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp.2.066.261.600,- dan realisasi sebesar Rp.1.920.085.000,- atau 93%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	726.117.200	663.164.200	91%		
2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	5.092.000.000	4.827.038.600	95%		
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK Tambahan P3K2/UD Lanjutan)	2.066.261.600	1.920.085.000	93%		

- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan

:

- 1) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan anggaran sebesar Rp.16.777.200,- dan realisasi sebesar Rp.16.760.000,- atau 99,9% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Bahan Pameran Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Kontribusi Kegiatan Pameran/Eksibisi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat



Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	16.777.200	16.760.000	99,9%	Promosi atas hasil produksi	1 Paket

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), dengan kegiatan :

- 1) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan daerah dengan anggaran sebesar Rp.57.680.350,- dan realisasi sebesar Rp.55.408.000,- atau 96%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak, Belanja Jasa Kontribusi Kegiatan Pameran/Eksibisi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Peralatan Studio, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Narasumber dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat

- 2) Pengembangan desa mandiri pangan dengan anggaran sebesar Rp.31.100.000,- dan realisasi sebesar Rp.31.090.000,- atau 99,9%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Belanja Alat Tulis Kantor

- 3) Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan anggaran sebesar Rp.55.051.350,- dan realisasi sebesar Rp.43.051.300,- atau 78%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 4) Pengembangan lumbung pangan desa dengan anggaran sebesar Rp.37.119.000,- dan realisasi sebesar Rp.27.550.000,- atau 74%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Belanja Alat Tulis Kantor



- 5) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan anggaran sebesar Rp.327.227.500,- dan realisasi sebesar Rp.319.237.500,- atau 98%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, Belanja Cetak, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan desa mandiri panga	31.100.000	31.090.000	99,9%		
2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK Tambahan 3P3K2/UD Lanjutan)	2.066.261.600	1.920.085.000	93%	Honor Petugas Lapangan	12 Bulan
3	Pengembangan pertanian pada lahan kering	55.051.350	43.051.300	78%	Honor Petugas Lapangan	12 Bulan
4	Pengembangan lumbung pangan desa	37.119.000	27.550.000	74%	Belanja Bibit dan Pupuk	2 Paket
5	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	327.227.500	319.237.500	98%		

- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :

- 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan anggaran sebesar Rp.10.187.500,- dan realisasi sebesar Rp.10.187.500,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Peserta



Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Belanja Jasa Narasumber

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	10.187.500	10.187.500	100%		

f. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.177.527.500,- dan realisasi sebesar Rp.177.238.600,- atau 99,8%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat

- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.440.420.000,- dan realisasi sebesar Rp.440.315.000,- atau 99,9% Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Tenaga Ahli



Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	177.527.500	177.238.600	99,8%		
2	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	440.420.000	440.315.000	99,9%		

g. Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan anggaran sebesar Rp.1.332.508.800,- dan realisasi sebesar Rp.1.236.135.300,- atau 93%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Obat-Obatan, Belanja Bahan Pakan Ternak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

- 2) Pembibitan dan perawatan ternak dengan anggaran sebesar Rp.1.216.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.211.845.000,- atau 99,63%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan kegiatan :

- 1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan anggaran sebesar Rp.683.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.678.604.097,- atau 99%



Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Bahan Obat-Obatan, Belanja Cetak, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- i. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, dengan kegiatan :
 - 1) Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah dengan anggaran sebesar Rp.313.818.000,- dan realisasi sebesar Rp.312.858.000,- atau 99,7% Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , Honorarium Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Piala/Plakat/Medali/Penghargaan Lain, Belanja Bahan Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Bahan Pakan Ternak, Belanja Listrik, Belanja Jasa Penyiaran/Publikasi Media Elektronik/Cetak, Belanja Jasa Dekorasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Peralatan Studio, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Narasumber dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.192.860.000,- dan realisasi sebesar Rp.192.860.000,- atau 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap



PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - ✓ Untuk kegiatan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2016 banyak mengalami perubahan karena adanya Program dan kegiatan di Revisi dengan adanya mengganti dana di tahun 2015.
 - ✓ Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ Lemahnya sistem pengendalian intern pada setiap SKPD, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan.
2. Solusi Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - ✓ Langkah pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada pejabat yang ditemukan melakukan tindakan KKN, dan yang berprestasi oleh Pemerintah daerah dengan diberikan penghargaan.
 - ✓ Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Antisipasi permasalahan ini dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya SPIP dan perlu dibentuknya Satgas SPIP baik ditingkat SKPD maupun ditingkat pemerintah daerah.
 - ✓ Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan.

Kehutanan

- a. **Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan**
 - 1). Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dengan anggaran Rp. 114.040.000 dan terealisasi sebesar Rp. 113.864.000,- atau 99,74% Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Bahan baku Bangunan (Pembuatan Papan Peringatan), Belanja Makan



minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- 2) Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Pengawasan peredaran dan produksi hasil hutan , Pengaman dan pengendalian kebakaran hutan dan Mengangkut barang bukti/ sitaan

Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	114.040.000	113.864.000	99,74%		
		114.040.000	113.864.000	99,74%		

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Rp. 1.644.469.170, Teralisasi 1.643.495.600,- atau 99,92%, Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak dan Tanaman, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan, Belanja Modal Pengadaan Printer, Belanja Perjalanan Kamera Digital, Belanja Modal Pengadaan GPS, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat
2. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Rehabilitasi hutan dan lahan, Tersedia sarana dan prasarana pendukung kegiatan, Pembuatan bangunan dam penahan, Pemberian barang yang diserahkan pada masyarakat (stup madu)



Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan	1.644.469.170	1.643.495.600	99,92%		
		1.644.469.170	1.643.495.600	99,92%		

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1). Degradasi hutan dan lahan
- 1) Praktek Pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal masih terjadi
- 2) Tidak tersedianya alat angkutan barang bukti sitaan
- 3) Masih terdapat wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan
- 4) Masih luas lahan kritis/lahan tidur didalam dan diluar kawasan hutan
- 5) Ketersediaan Tanaman Untuk Keperluan Adat cenderung berkurang
- 6) Debit air Sungai cenderung Menurun
- 7) Partisipasi masyarakat tentang kegiatan RHL masih kurang
- 8) Masih terdapat wilayah rawan bencana banjir dan kekeringan

b. Solusi

- 1). Melakukan pencegahan, pengendalian kerusakan hutan dan operasi illegal logging
- 2). Pengawasan peredaran dan produksi hasil hutan
- 3). Pengaman dan pengendalian kebakaran hutan
- 4). Pengadaan alat angkutan barang bukti/ sitaan
- 5). Inventarisasi perambahan hutan
- 6). Pembuatan hutan tanaman adat
- 7). Pengembangan informasi aturan perundangan bidang kehutanan
- 8). Rehabilitasi hutan dan lahan



- 9). Penyediaan bibit tanaman kehutanan dan MPTS
- 10). Pembuatan penghijauan kota
- 11). Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- 1) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Rp 5.750.330.000,- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Modal pengadaan dan pemasangan lampu jalan mercury, Belanja rekening listrik lampu mercury, Belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- 2) Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan Rp 741.453.000,- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja ATK Belanja Penggandaan, Belanja Modal pengadaan instalasi listrik, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja jasa konsultasi
- 3) Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan (DAK) Rp 531.625.000,- Belanja instalasi Listrik
- 4) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenaga listrikan (lanjutan) Rp 173.952.650,- Belanja Modal pengadaan lampu hias jalan dan Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
- 5) Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan (DAK Lanjutan 2015) Rp 114.173.450,- Belanja modal pengadaan instalasi listrik

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Tersedianya jaringan listrik untuk kebutuhan masyarakat, Terpasangnya jaringan listrik sambungan rumah, PLTS Terpusat, Reaktor Biogas dan PLTS Tersebar dan Terpasangnya lampu jalan mercury dan lampu lapangan



Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	5.750.330.000				
2	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan	741.453.000				
3	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan (DAK)	531.625.000				
4	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenaga listrikan (lanjutan)	173.952.650				
5	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan (DAK Lanjutan 2015)	114.173.450				

b) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Regulasi Mengenai kegiatan Penambangan Bahan Galian C Rp 122.030.000 dengan realisasi sebesar Rp.121.650.107, atau (99.65%). Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja ATK Belanja Penggandaan, Belanja Modal pengadaan instalasi listrik, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Berkurangnya masyarakat yang merusak lingkungan



Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Penyusunan Regulasi Mengenai kegiatan Penambangan Bahan Galian C	122.030.000	121.650.107	99.65%		
		122.030.000	121.650.107	99,92%		

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1. Maraknya Pertambangan Tanpa Izin dan berpotensi merusak lingkungan
2. Masih rendahnya elektrifikasi Kabupaten Bone Bolango 75 % dibawah rata-rata elektrifikasi nasional

b. Solusi

1. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pertambangan tanpa izin dan berpotensi merusak lingkungan
2. Peningkatan layanan energi dan jaringan listrik

Perdagangan

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 275,388,250,-
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat KSoordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 223,596,425,-



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	275,388,250	270,477,816	4,910,434	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
2	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	223,596,425	223,205,755	390,670	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
TOTAL		498,984,675	493,683,571	5,301,104		

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 94,732,000,-
- 2) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7,951,825,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	94,732,000	93,455,200	1,276,800	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung dan Kantor	7,951,825	7,884,300	67,525	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung dan Kantor	12 Bulan
TOTAL		102,683,825	101,339,500	1,344,325		

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 28,600,000



Realisasi Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	28,600,000	28,597,800	2,200	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan	98 Buah
T O T A L		28,600,000	28,597,800	2,200		

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 74.673.000,-

Realisasi Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan undang-undangan	74,673,000	74,672,960	40	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan undang-undangan	7 Orang
T O T A L		74,673,000	74,672,960	40		

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 3.817.500,-
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp. 572,500,-
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 572,500,-



Realisasi Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3,817,500	3,817,500	0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dok
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	572,500	572,500	0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	572,500	572,500	0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok
TOTAL		4,962,500	4,962,500	0		

f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- 1) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp.118,650,000,-
- 2) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian dengan anggaran sebesar Rp.15,120,000,-

Realisasi Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	118,650,000	117,650,000	1,000,000	Terlaksananya Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	10 Dok
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian	15,120,000	15,120,000	0	Terlaksananya Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian	1 Dok
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	572,500	572,500	0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok
TOTAL		134,342,500	133,342,500	1,000,000		

g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk dengan anggaran sebesar Rp. 273,574,250,-



- 2) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2,411,489,750,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	273,574,250	267,458,150	6,116,100	Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	4 Paket
2	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK)	2,411,489,750	2,394,615,650	16,874,100	Terlaksananya Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK)	2 Paket
T O T A L		2,685,064,000	2,662,073,800	22,990,200		

h. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

- 1) Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan dengan anggaran sebesar Rp. 32,950,000,-

Realisasi Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	32,950,000	32,950,000	0	Terlaksananya Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan	2 Keg
T O T A L		32,950,000	32,950,000	0		

Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 1) Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan anggaran sebesar Rp. 249,523,750,- sudah termasuk dana lanjutan dan terealisasi sebesar Rp. 248,615,350,- atau 99,64 %., Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap, Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber, Pengadaan ATK, Biaya Jasa Service, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perjalanan Dinas, Pengadaan Tanah untuk bangunan Industri, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Industri Kecil dan Menengah yang berkategori berkembang berdasarkan criteria yang telah ditetapkan di bidang industry lebih meningkat.

- 2) Kegiatan Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah dengan anggaran sebesar Rp. 35,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35,000,000,- atau 100 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan ATK, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Sewa Gedung, Biaya Sewa Peralatan Studio, Pengadaan Makan Minum Peserta Sosialisasi, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Jasa Narasumber, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah IKM yang memenuhi standar keamanan pangan untuk memperoleh Sertifikat Izin Pangan IRT meningkat.
- 3) Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 19,404,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18,354,700,- atau 94,59 %., Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Biaya Dokumentasi / Administrasi Tender, Biaya Perjalanan Dinas, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah kegiatan Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan meningkat.
- 4) Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Sentra Industri Aren (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1,250,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,097,293,950,- atau 96,57 %, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengadaan Alat Panen / Pengolahan, Pembangunan Pagar Keliling, Pembangunan Lansekap, Pembangunan UPT, Pembuatan Papan Nama Sentra, Biaya Perencanaan dan Pengawasan, Rehabilitasi UPH Aren, Instalasi Pengolahan Air Bersih, Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah prosentase jumlah Sentra Aren yang dibangun dan jumlah alat panen yang diadakan meningkat.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA		
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	249,523,750	248,615,350	908,400	Terlaksananya Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	5 Keg
2	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	35,000,000	35,000,000	0	Terlaksananya Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	1 Keg
3	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (DAK)	19,404,000	18,354,700	1,049,300	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (DAK)	1 Keg
4	Revitalisasi Pembangunan Sentra Industri Aren (DAK)	1,250,000,000	1,136,326,000	113,674,000	Terlaksananya Revitalisasi Pembangunan Sentra Industri Aren (DAK)	3 Keg
TOTAL		1,553,927,750	1,438,296,050	115,631,700		

Ketransmigrasian

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Kegiatan Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan dengan anggaran sebesar Rp.70.270.200,- dan terealisasi sebesar Rp.65.309.000,- atau 92,94 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan ekonomi melalui kelompok ternak sapi bali, Hasil yang diharapkan terlaksana pengembangan sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi;
- 2) Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 479.672.000,- dan terealisasi sebesar Rp.408.375.150,- atau 85,14 %, Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana bagi transmigran Hasil yang diharapkan jumlah sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat transmigrasi yang dibangun meningkat;



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah, selaras dengan tindak lanjut implementasi tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam pasal yang sama pada ayat (4) yang pada intinya dinyatakan bahwa kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan gubernur, bupati atau walikota. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang



sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan meliputi:

1. Pelimpahan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Tata cara pelimpahan;
 - b. Tata cara penyelenggaraan; dan
 - c. Tata cara penarikan pelimpahan.
2. Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam meliputi:
 - a. Prinsip pendanaan;
 - b. Perencanaan dan penganggaran;
 - c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
 - d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.
3. Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
 - b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi:
 - a. Penugasan urusan pemerintahan;
 - b. Tata cara penugasan;
 - c. Tata cara penyelenggaraan; dan
 - d. Penghentian tugas pembantuan.
5. Pengelolaan dana tugas pembantuan meliputi:
 - a. Prinsip pendanaan;
 - b. Perencanaan dan penganggaran;
 - c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
 - d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
6. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi:



- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada :(a) instansi vertikal; (b) pejabat pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah. Secara tegas pedoman pengelolaan dana dekonstrasi dan dana tugas pembantuan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.
2. Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
3. Pemeriksaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh BPK dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima tugas pembantuan dari beberapa kementerian/pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Adapun SKPD yang melaksanakan adalah sebagai berikut :



Bappeda

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c) Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA. 2016

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Intansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pebangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango diantaranya:

Program :

Bina Pembangunan Daerah

Kegiatan :

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan untuk Pengelolaan Lahan Kritis dan Sumber Daya Alam (PLKSDA)

Tabel V.1
Capaian Output
Program Pembangunan Bina Pembangunan Daerah

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan untuk Pengelolaan Lahan Kritis dan Sumber Daya Alam (PLKSDA) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit, Mangga, Rambutan, Sukun, Durian	4 Desa 1. Bulotalangi Timur 2. Bulatalangi Barat 3. Bulatalangi 4. Tunas Jaya	Bibit	1.470	1.470	683.909.000



5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran dengan program bina pembangunan daerah dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan dan pembangunan APBN sebesar Rp . 683.909.000

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kurangnya Kesadaran Masyarakat Petani dalam membangun kemandirian serta memperkuat keberlanjutan program yang telah dilakukan.

Solusi :

Butuh Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Keluarga Tani untuk memperkuat kemandirian Petani.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Dasar Hukum

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. UU No 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No 14 tahun 2015 tentang APBN tahun 2016

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bone bolango diantaranya :

Program :

Penataan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Kegiatan :

Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu



Tabel V.2
Capaian Output
Penataan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu	Kabupaten Bone Bolango Dinas Catatan Sipil	Paket	18 Kecamatan	18 Kecamatan	702.159.000

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Pembiayaan program Penataan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil Dengan kegiatan Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu APBN sebesar Rp 702.159.000

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kurangnya animo masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Solusi :

- Sosialisasi ke 18 kecamatan tentang tata cara pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil, serta sosialisasi kebijakan kependudukan.
- Pelayanan dilakukan ditingkat desa guna membantu masyarakat yang ekonomi lemah.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan Program yang diberikan oleh pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang secara hirarki melalui Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango



(319071) Tahun Anggaran 2016

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kabupaten Bone Bolango diantaranya :

Program :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
- c. Dukungan Menejemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

Tabel V.3
Capaian Output
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kabupaten Bone Bolango	Paket	Paket	Paket	5.630.473.000
2	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Kabupaten Bone Bolango	Paket	Paket	Paket	
3	Dukungan Menejemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Kabupaten Bone Bolango	Paket	Paket	Paket	

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

Total Anggaran Rp. 7.270.963.000 Realisasi Sebesar Rp. 5.630.473.000

6. Permasalahan dan Solusi

Untuk permasalahan yang ada untuk kegiatan Tugas Pembantuan adalah adanya beberapa revisi anggaran yang ada sehingga kegiatan harus menunggu revisi. Karena revisi itu bukan dari Satker yang bersangkutan akan tetapi revisi itu berkaitan dengan pemotongan anggaran. Dari sisi pelaksanaan tidak ada masalah sehingga bisa dilihat untuk realisasi anggaran



sebesar Rp. 5.630.473.000,- atau 77,44 % sisa anggaran di beri tanda bintang oleh Kementerian Keuangan sehingga sisanya tidak bisa dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 032.06.4.400693/2016

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementrian Kelautan dan Perikanan Jakarta

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

3. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolongo diantaranya:

Program :

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan :

Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Lanjutan Pembangunan Cold Storage)

Tabel V.4
Capaian Output
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Lanjutan Pembangunan Cold Storage)	Kabupaten Bone Bolango	Paket	-	-	2.534.794.000

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

TP-APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jumlah anggaran Rp. 2.534.794.000,- (**Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah**).



5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Bahan baku dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan cold storage yang masih minim.

Solusi :

Perlunya pengadaan peralatan untuk coldstorage sehingga dapat beroperasi secara lancar dan maksimal.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-/DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, DIPA Nomor : SP. DIPA – 090. 02. 4. 352470 / 2015 Tanggal 4 Agustus 2015 pada satker Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI DIPA Nomor : SP. DIPA – 090. 02. 4. 352470 / 2016 Tanggal 25 April 2016 pada satker Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkatn daerah yang melaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Keporasi, UMKM Kabupaten Bone Bolango

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Keporasi, UMKM Kabupaten Bone Bolango diantaranya :

Program :



- a. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan.

Kegiatan :

- a. Pasar Rakyat Type B (Pasar Selasa) lokasi Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- b. Pasar Rakyat Type B (Pasar Kamis) lokasi Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;

Tabel V.5

Capaian Output Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Sarana Dsitribusi Perdagangan dan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pasar Rakyat Type B (Pasar Selasa) lokasi Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;	Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila	1 Unit Pasar Rakyat Tipe B	1 Unit Pasar	1 Unit Pasar	7.500.000.000
2	Pasar Rakyat Type B (Pasar Kamis) lokasi Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	Desa Talimopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	1 Unit Pasar Rakyat Tipe B	1 Unit Pasar	1 Unit Pasar	6.000.000.000

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a. Pasar Rakyat Type B (Pasar Selasa) lokasi Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- b. Pasar Rakyat Type B (Pasar Kamis) lokasi Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 6.000.000.000,-



c. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelesaian kedua kegiatan tersebut tidak mengalami permasalahan

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan bahwa Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota

1. Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

2. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Pembantuankan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dapat dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, adapun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan yang lainnya.

Berikut daftar Desa penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana dalam table dibawah ini :

Tabel V.6
Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016

N O	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN ADD TRIWULAN I-IV TA.2016	REALISASI ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN I TA.2016	REALISASI ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN I-II TA.2016	REALISASI ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN I-II-III TA.2016	REALISASI ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN IV TA.2016	SISA ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN I-IV TA.2016
I.KECAMATAN KABILA							
1	DUTOHE	Rp 313.971.000	Rp 51.347.750		Rp 184.130.500	Rp 78.492.750	Rp -
2	TANGGIL INGO	Rp 326.739.000	Rp 51.784.750		Rp 193.269.500	Rp 81.684.750	Rp -
3	TOTO SELATAN	Rp 322.838.000	Rp 49.109.500		Rp 193.019.000	Rp 80.709.500	Rp -



4	POOWO	Rp 323.174.000	Rp 47.168.500		Rp 195.212.000	Rp 80.793.500	Rp -
5	TALANG O	Rp 314.097.000	Rp 46.010.000		Rp 189.562.750	Rp 78.524.250	Rp -
6	POOWO BARAT	Rp 318.080.000	Rp 45.570.000		Rp 192.990.000	Rp 79.520.000	Rp -
7	DUTOHE BARAT	Rp 325.305.000	Rp 49.345.000	Rp 113.257.500	Rp 86.801.250	Rp 75.901.250	Rp -
JUMLAH		Rp 2.244.204.000	Rp 340.335.500	Rp 113.257.500	Rp 1.234.985.000	Rp 555.626.000	Rp -
II.KECAMATAN TAPA							
1	TALUMO PATU	Rp 319.793.000	Rp 52.873.000		Rp 186.971.750	Rp 79.948.250	Rp -
2	TALULO BUTU	Rp 317.164.000	Rp 49.975.000		Rp 187.523.000	Rp 79.666.000	Rp -
3	DUNGG ALA	Rp 329.357.000	Rp 50.289.200		Rp 196.728.550	Rp 82.339.250	Rp -
4	LANGGE	Rp 332.785.000	Rp 49.246.250		Rp 200.342.500	Rp 83.196.250	Rp -
5	TALULO BUTU SELATA N	Rp 308.955.000	Rp 47.738.750		Rp 183.977.500	Rp 77.238.750	Rp -
6	KERAMA T	Rp 314.806.000	Rp 53.151.500		Rp 182.953.000	Rp 78.701.500	Rp -
7	MERANT I	Rp 322.969.000	Rp 52.192.250		Rp 190.034.500	Rp 80.742.250	Rp -
JUMLAH		Rp 2.245.829.000	Rp 355.465.950	Rp -	Rp 1.328.530.800	Rp 561.832.250	Rp -
III.KECAMATAN SUWAWA							
1	TINGKO HUBU	Rp 323.420.000	Rp 52.710.000	Rp 109.000.000	Rp 80.855.000	Rp 80.855.000	Rp -
2	BOLUDA WA	Rp 346.549.000	Rp 43.470.400	Rp 129.804.100	Rp 86.637.250	Rp 86.637.250	Rp -
3	BUBE	Rp 307.866.000	Rp 41.866.500	Rp 112.066.500	Rp 76.966.500	Rp 76.966.500	Rp -
4	HULUDU OTAMO	Rp 312.697.000	Rp 51.090.000	Rp 105.258.500	Rp 78.174.250	Rp 78.174.250	Rp -
5	ULANTH A	Rp 323.804.000	Rp 42.450.000	Rp 119.452.000	Rp 80.951.000	Rp 80.951.000	Rp -
6	TINELO	Rp 330.243.000	Rp 56.940.750	Rp 108.180.750	Rp 82.560.750	Rp 82.560.750	Rp -



7	BUBEYA	Rp 319.544.000	Rp 56.127.355	Rp 103.644.645	Rp 79.886.000	Rp 79.886.000	Rp -
8	BUBE BARU	Rp 321.739.000	Rp 54.834.750		Rp 186.469.500	Rp 80.434.750	Rp -
9	TINGKO HUBU TIMUR	Rp 312.591.000	Rp 49.300.000	Rp 106.995.500	Rp 78.147.750	Rp 78.147.750	Rp -
10	HELUM O	Rp 312.179.000	Rp 49.300.000	Rp 106.789.500	Rp 78.044.750	Rp 78.044.750	Rp -
JUMLAH		Rp 3.210.632.000	Rp 498.089.755	Rp 1.001.191.495	Rp 908.692.750	Rp 802.658.000	Rp -
IV. BONE PANTAI							
1	TAMBO O	Rp 316.786.000		Rp 162.425.000		Rp 154.361.000	Rp -
2	BILUNG ALA	Rp 334.528.000		Rp 167.564.500	Rp 82.781.750	Rp 84.181.750	Rp -
3	UABANG A	Rp 335.151.000		Rp 167.575.500	Rp 83.787.750	Rp 83.787.750	Rp -
4	TOLOTIO	Rp 315.144.000		Rp 157.544.700	Rp 78.778.500	Rp 78.820.800	Rp -
5	TONGO	Rp 325.946.000		Rp 162.973.000	Rp 81.486.500	Rp 81.486.500	Rp -
6	BILUNG ALA UTARA	Rp 326.563.000		Rp 163.733.500	Rp 81.675.750	Rp 81.153.750	Rp -
7	TIHU	Rp 327.530.000		Rp 163.765.000	Rp 81.882.500	Rp 81.882.500	Rp -
8	TUNAS JAYA	Rp 317.887.000		Rp 158.943.500	Rp 79.471.750	Rp 79.471.750	Rp -
9	LEMBAH HIJAU	Rp 335.402.000		Rp 167.701.000	Rp 83.850.500	Rp 83.850.500	Rp -
10	BATU HIJAU	Rp 319.756.000		Rp 181.134.800	Rp 81.564.200	Rp 57.057.000	Rp -
11	OMBUL O HIJAU	Rp 319.568.000		Rp 159.784.000	Rp 79.892.000	Rp 79.892.000	Rp -
12	KAMIRI	Rp 321.620.000		Rp 177.320.000	Rp 87.425.000	Rp 56.875.000	Rp -
13	PELITA HIJAU	Rp 332.774.000		Rp 165.092.000	Rp 84.191.000	Rp 83.491.000	Rp -
JUMLAH		Rp 4.228.655.000	Rp -	Rp 2.155.556.500	Rp 986.787.200	Rp 1.086.311.300	Rp -



V.BULANGO UTARA							
1	BOIDU	Rp 316.464.000	Rp 51.226.000	Rp 107.006.000	Rp 79.116.000	Rp 79.116.000	Rp -
2	BANDU NGAN	Rp 321.634.000	Rp 46.650.500	Rp 114.166.500	Rp 80.408.500	Rp 80.408.500	Rp -
3	TUPA	Rp 324.951.000	Rp 50.537.750	Rp 111.937.750	Rp 81.237.750	Rp 81.237.750	Rp -
4	LONGAL O	Rp 323.837.000	Rp 54.324.250		Rp 188.553.500	Rp 80.959.250	Rp -
5	TULOA	Rp 327.897.000	Rp 53.225.000	Rp 110.723.500	Rp 81.974.250	Rp 81.974.250	Rp -
6	KOPI	Rp 313.572.000	Rp 52.090.000	Rp 104.696.000	Rp 78.393.000	Rp 78.393.000	Rp -
7	LOMAYA	Rp 323.640.000	Rp 45.170.000	Rp 116.650.000	Rp 80.910.000	Rp 80.910.000	Rp -
8	SUKA DAMAI	Rp 325.273.000	Rp 47.318.250	Rp 115.305.000	Rp 81.331.500	Rp 81.318.250	Rp -
9	BUNUO	Rp 317.572.000	Rp 49.518.000	Rp 109.268.000	Rp 79.393.000	Rp 79.393.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 2.894.840.000	Rp 450.059.750	Rp 889.752.750	Rp 831.317.500	Rp 723.710.000	Rp -
VI.TILONGKABILA							
1	BONGOI ME	Rp 334.547.000	Rp 50.861.750	Rp 116.411.750	Rp 83.636.750	Rp 83.636.750	Rp -
2	BONGOP INI	Rp 332.643.000	Rp 40.998.250	Rp 125.323.250	Rp 83.160.750	Rp 83.160.750	Rp -
3	TOTO UTARA	Rp 326.935.000	Rp 45.533.750	Rp 117.933.750	Rp 81.733.750	Rp 81.733.750	Rp -
4	MOUTO NG	Rp 319.768.000	Rp 41.110.000	Rp 118.774.000	Rp 79.942.000	Rp 79.942.000	Rp -
5	TUNGGU LO	Rp 332.464.000	Rp 50.566.000	Rp 115.666.000	Rp 83.116.000	Rp 83.116.000	Rp -
6	LONUO	Rp 326.177.000	Rp 44.234.250	Rp 118.854.250	Rp 81.544.250	Rp 81.544.250	Rp -
7	TAMBO O	Rp 315.742.000	Rp 45.660.500	Rp 112.210.500	Rp 78.935.500	Rp 78.935.500	Rp -
8	ILOHELU MA	Rp 316.528.000	Rp 48.832.000	Rp 109.432.000	Rp 79.132.000	Rp 79.132.000	Rp -
9	MOTILA NGO	Rp 332.846.000	Rp 45.511.500	Rp 120.911.500	Rp 83.211.500	Rp 83.211.500	Rp -



10	BUTU	Rp 321.013.000	Rp 44.153.000	Rp 116.353.500	Rp 80.253.250	Rp 80.253.250	Rp -
11	PERMATA	Rp 323.301.000	Rp 48.845.750	Rp 112.804.750	Rp 80.825.250	Rp 80.825.250	Rp -
12	TUNGGUL SELATAN	Rp 310.047.000	Rp 38.074.250	Rp 116.949.250	Rp 77.511.750	Rp 77.511.750	Rp -
13	BONGOHULAWA	Rp 328.142.000	Rp 54.592.000	Rp 109.479.000	Rp 82.035.500	Rp 82.035.500	Rp -
14	BERLIAN	Rp 310.238.000	Rp 46.727.500	Rp 108.391.500	Rp 77.559.500	Rp 77.559.500	Rp -
JUMLAH		Rp 4.530.391.000	Rp 645.700.500	Rp 1.619.495.000	Rp 1.132.597.750	Rp 1.132.597.750	Rp -
VII.BOTUPINGGE							
1	TIMBUOLO	Rp 313.014.000	Rp 56.210.000	Rp 100.297.000	Rp 78.253.500	Rp 78.253.500	Rp -
2	PANGGULO	Rp 314.822.000	Rp 49.488.000	Rp 107.923.000	Rp 78.705.500	Rp 78.705.500	Rp -
3	LUWOHU	Rp 304.291.000	Rp 37.050.000	Rp 115.095.500	Rp 76.072.750	Rp 76.072.750	Rp -
4	BUATA	Rp 310.084.000	Rp 56.171.000	Rp 98.871.000	Rp 77.521.000	Rp 77.521.000	Rp -
5	TIMBUOLO TIMUR	Rp 314.162.000	Rp 54.015.500	Rp 103.065.500	Rp 78.540.500	Rp 78.540.500	Rp -
6	TANAH PUTIH	Rp 312.511.000	Rp 56.552.750	Rp 99.702.750	Rp 78.127.750	Rp 78.127.750	Rp -
7	PANGGULO BARAT	Rp 305.764.000	Rp 55.436.381	Rp 97.445.619	Rp 76.441.000	Rp 76.441.000	Rp -
8	TIMBUOLO TENGAH	Rp 314.103.000	Rp 57.925.750	Rp 99.125.750	Rp 78.525.750	Rp 78.525.750	Rp -
9	SUKMA	Rp 306.558.000	Rp 55.884.500	Rp 97.394.500	Rp 76.639.500	Rp 76.639.500	Rp -
JUMLAH		Rp 2.795.309.000	Rp 478.733.881	Rp 918.920.619	Rp 698.827.250	Rp 698.827.250	Rp -
VIII.KABILA BONE							
1	HUANG OBOTU	Rp 321.968.000	Rp 52.242.000		Rp 189.234.000	Rp 80.492.000	Rp -
2	MOLOT ABU	Rp 347.797.000	Rp 48.700.000		Rp 212.147.750	Rp 86.949.250	Rp -
3	OLUHUTA	Rp 366.311.000	Rp 51.402.750	Rp 131.752.750	Rp 91.577.750	Rp 91.577.750	Rp -



4	OLELE	Rp 353.144.000	Rp 51.555.000		Rp 213.303.000	Rp 88.286.000	Rp -
5	BOTUTO NUO	Rp 335.057.000	Rp 49.700.000		Rp 201.592.750	Rp 83.764.250	Rp -
6	MODEL OMO	Rp 332.651.000	Rp 43.925.000		Rp 205.563.250	Rp 83.162.750	Rp -
7	BILUAN GO	Rp 324.593.000	Rp 50.755.000		Rp 192.689.750	Rp 81.148.250	Rp -
8	BOTUBA RANI	Rp 322.635.000	Rp 53.883.750		Rp 188.092.500	Rp 80.658.750	Rp -
9	BINTALA HE	Rp 322.253.000	Rp 50.650.000		Rp 191.039.750	Rp 80.563.250	Rp -
JUMLAH		Rp 3.026.409.000	Rp 452.813.500	Rp 131.752.750	Rp 1.685.240.500	Rp 756.602.250	Rp -
IX. BONE							
1	TALUDA A	Rp 337.664.000	Rp 48.316.000		Rp 204.932.000	Rp 84.416.000	Rp -
2	SOGITIA	Rp 354.882.000	Rp 47.750.000		Rp 218.411.500	Rp 88.720.500	Rp -
3	MOODU LIO	Rp 331.109.000	Rp 54.250.000		Rp 194.081.750	Rp 82.777.250	Rp -
4	BILONLA NTUNGA	Rp 324.917.000	Rp 48.079.250		Rp 195.608.500	Rp 81.229.250	Rp -
5	INOGAL UMA	Rp 319.771.000	Rp 45.727.000		Rp 194.101.250	Rp 79.942.750	Rp -
6	MONAN O	Rp 321.769.000			Rp 241.326.750	Rp 80.442.250	Rp -
7	TUMBU H MEKAR	Rp 316.690.000	Rp 52.860.000		Rp 184.657.500	Rp 79.172.500	Rp -
8	MOLAM AHU	Rp 330.970.000	Rp 50.050.000		Rp 198.177.500	Rp 82.742.500	Rp -
9	MASIAG A	Rp 318.503.000	Rp 50.575.750		Rp 188.301.500	Rp 79.625.750	Rp -
10	ILOHUU WA	Rp 326.254.000	Rp 45.928.500		Rp 198.762.000	Rp 81.563.500	Rp -
11	MUARA BONE	Rp 316.664.000	Rp 50.166.000	Rp 108.166.000	Rp 79.166.000	Rp 79.166.000	Rp -
12	CENDAN A PUTIH	Rp 316.267.000	Rp 46.041.750		Rp 191.158.500	Rp 79.066.750	Rp -
13	WALUH U	Rp 312.156.000	Rp 45.414.000		Rp 185.103.000	Rp 81.639.000	Rp -



14	PERMAT A	Rp 313.747.000	Rp 50.181.750		Rp 185.128.500	Rp 78.436.750	Rp -
JUMLAH		Rp 4.541.363.000	Rp 635.340.000	Rp 108.166.000	Rp 2.658.916.250	Rp 1.138.940.750	Rp -
X.BONE RAYA							
1	INOMAT A	Rp 326.514.000	Rp 37.825.000		Rp 207.060.500	Rp 81.628.500	Rp -
2	TOMBUL ILATO	Rp 311.233.000	Rp 39.283.250		Rp 194.141.500	Rp 77.808.250	Rp -
3	MOOTA YU	Rp 312.704.000	Rp 41.100.000		Rp 193.428.000	Rp 78.176.000	Rp -
4	MOOTIN ELO	Rp 314.793.000	Rp 42.473.250		Rp 193.621.500	Rp 78.698.250	Rp -
5	PELITA JAYA	Rp 326.086.000				Rp 326.086.000	Rp -
6	MOOPIY A	Rp 315.249.000	Rp 44.112.250		Rp 192.324.500	Rp 78.812.250	Rp -
7	ALO	Rp 322.874.000	Rp 45.909.750		Rp 196.245.750	Rp 80.718.500	Rp -
8	LAUT BIRU	Rp 317.486.000			Rp 238.114.500	Rp 79.371.500	Rp -
9	BUNGA	Rp 315.785.000			Rp 236.838.750	Rp 78.946.250	Rp -
10	MOOTA WA	Rp 314.937.000		Rp 157.468.500		Rp 157.468.500	Rp -
JUMLAH		Rp 3.177.661.000	Rp 250.703.500	Rp 157.468.500	Rp 1.651.775.000	Rp 1.117.714.000	Rp -
XI.SUWAWA TIMUR							
1	TULABO LO	Rp 320.270.000	Rp 41.967.500	Rp 118.167.500	Rp 80.067.500	Rp 80.067.500	Rp -
2	DUMBA YA BULAN	Rp 328.198.000	Rp 40.347.500	Rp 123.751.500	Rp 82.049.500	Rp 82.049.500	Rp -
3	TULABO LO TIMUR	Rp 340.143.000	Rp 42.549.750	Rp 127.521.750	Rp 85.035.750	Rp 85.035.750	Rp -
4	TILANG OBULA	Rp 325.605.000	Rp 49.603.000	Rp 113.199.500	Rp 81.401.250	Rp 81.401.250	Rp -
5	PODUW OMA	Rp 312.342.000	Rp 50.285.500	Rp 105.885.500	Rp 78.085.500	Rp 78.085.500	Rp -
6	PANGGU LO	Rp 308.916.000	Rp 50.929.000	Rp 103.529.000	Rp 77.229.000	Rp 77.229.000	Rp -



7	TULABO LO BARAT	Rp 313.455.000	Rp 50.998.750	Rp 105.723.750	Rp 78.361.250	Rp 78.361.250	Rp 10.000
8	PANGI	Rp 313.016.000	Rp 53.491.500	Rp 103.016.500	Rp 78.254.000	Rp 78.254.000	Rp -
9	TINEMB A	Rp 309.445.000	Rp 53.061.250	Rp 101.661.250	Rp 77.361.250	Rp 77.361.250	Rp -
JUMLAH		Rp 2.871.390.000	Rp 433.233.750	Rp 1.002.456.250	Rp 717.845.000	Rp 717.845.000	Rp 10.000
XII.SUWAWA SELATAN							
1	BULONT ALA	Rp 321.421.000	Rp 50.955.250		Rp 190.110.500	Rp 80.355.250	Rp -
2	LIBUNG O	Rp 321.605.000	Rp 47.976.250		Rp 193.227.500	Rp 80.401.250	Rp -
3	MOLINT OGUPO	Rp 339.677.000	Rp 46.469.250		Rp 208.288.500	Rp 84.919.250	Rp -
4	BONEDA A	Rp 325.312.000	Rp 52.850.000		Rp 191.134.000	Rp 81.328.000	Rp -
5	BONDA WUNA	Rp 329.609.000	Rp 50.572.250		Rp 196.634.500	Rp 82.402.250	Rp -
6	BULONT ALA TIMUR	Rp 328.209.000	Rp 52.882.250		Rp 193.274.500	Rp 82.052.250	Rp -
7	PANCUR AN	Rp 318.838.000	Rp 49.634.500		Rp 189.494.000	Rp 79.709.500	Rp -
8	BONDAR AYA	Rp 320.001.000	Rp 49.850.000		Rp 190.150.750	Rp 80.000.250	Rp -
JUMLAH		Rp 2.604.672.000	Rp 401.189.750	Rp -	Rp 1.552.314.250	Rp 651.168.000	Rp -
XIII.SUWAWA TENGAH							
1	LOMPOT OO	Rp 315.874.000	Rp 41.250.000		Rp 195.655.500	Rp 78.968.500	Rp -
2	LOMBO NGO	Rp 322.444.000	Rp 51.361.000	Rp 109.861.000	Rp 80.611.000	Rp 80.611.000	Rp -
3	DUANO	Rp 330.147.000	Rp 49.226.750	Rp 115.846.750	Rp 82.536.750	Rp 82.536.750	Rp -
4	TOLOM ATO	Rp 306.384.000	Rp 50.746.000		Rp 179.042.000	Rp 76.596.000	Rp -
5	ALALE	Rp 317.589.000	Rp 50.972.250	Rp 107.822.250	Rp 79.397.250	Rp 79.397.250	Rp -
6	TAPADA A	Rp 319.917.000	Rp 51.129.250		Rp 188.808.500	Rp 79.979.250	Rp -



JUMLAH		Rp 1.912.355.000	Rp 294.685.250	Rp 333.530.000	Rp 806.051.000	Rp 478.088.750	Rp -
XIV.BULANGO ULU							
1	MONGII LO	Rp 328.769.000	Rp 46.675.000	Rp 117.709.500	Rp 82.192.250	Rp 82.192.250	Rp -
2	OWATA	Rp 344.774.000	Rp 41.667.500		Rp 216.913.000	Rp 86.193.500	Rp -
3	MONGII LO UTARA	Rp 328.341.000	Rp 43.135.250	Rp 121.035.250	Rp 82.085.250	Rp 82.085.250	Rp -
4	PILOLAH EYA	Rp 325.672.000	Rp 47.425.000	Rp 115.411.000	Rp 81.418.000	Rp 81.418.000	Rp -
5	ILOMAT A	Rp 319.509.000	Rp 51.502.250	Rp 108.252.250	Rp 79.877.250	Rp 79.877.250	Rp -
6	SUKA MAKMU R	Rp 318.779.000	Rp 44.372.000	Rp 115.017.750	Rp 79.694.750	Rp 79.694.500	Rp -
JUMLAH		Rp 1.965.844.000	Rp 274.777.000	Rp 577.425.750	Rp 622.180.500	Rp 491.460.750	Rp -
XV.BULANGO SELATAN							
1	AYULA SELATA N	Rp 319.272.000	Rp 47.880.000	Rp 111.756.000	Rp 79.818.000	Rp 79.818.000	Rp -
2	HUNTU BARAT	Rp 343.227.000	Rp 44.920.000	Rp 126.693.500	Rp 85.806.750	Rp 85.806.750	Rp -
3	AYULA UTARA	Rp 330.407.000	Rp 41.926.750	Rp 123.276.750	Rp 82.601.750	Rp 82.601.750	Rp -
4	HUNTU SELATA N	Rp 328.404.000	Rp 38.801.000	Rp 125.401.000	Rp 82.101.000	Rp 82.101.000	Rp -
5	AYULA TILANG O	Rp 338.649.000	Rp 45.287.250	Rp 124.037.250	Rp 84.662.250	Rp 84.662.250	Rp -
6	AYULA TIMUR	Rp 314.165.000	Rp 40.541.250	Rp 116.541.250	Rp 78.541.250	Rp 78.541.250	Rp -
7	LAMAH U	Rp 342.148.000	Rp 49.791.250	Rp 121.282.750	Rp 86.537.000	Rp 84.537.000	Rp -
8	TINELO AYULA	Rp 318.266.000	Rp 53.006.500	Rp 106.126.500	Rp 79.566.500	Rp 79.566.500	Rp -
9	SEJAHTE RA	Rp 326.431.000	Rp 45.159.750	Rp 118.055.750	Rp 81.607.750	Rp 81.607.750	Rp -
10	HUNTU UTARA	Rp 325.841.000	Rp 45.930.250	Rp 116.990.250	Rp 81.460.250	Rp 81.460.250	Rp -
JUMLAH		Rp 3.286.810.000	Rp 453.244.000	Rp 1.190.161.000	Rp 822.702.500	Rp 820.702.500	Rp -



XVI.BULANGO TIMUR							
1	BULOTA LANGI	Rp 320.499.000	Rp 56.124.750	Rp 104.124.750	Rp 80.124.750	Rp 80.124.750	Rp -
2	TOLUW AYA	Rp 311.178.000	Rp 46.110.000		Rp 187.273.500	Rp 77.794.500	Rp -
3	POPODU	Rp 324.615.000	Rp 56.086.000	Rp 106.221.500	Rp 81.153.750	Rp 81.153.750	Rp -
4	BULONT ALANGI TIMUR	Rp 317.376.000	Rp 53.075.000		Rp 184.957.000	Rp 79.344.000	Rp -
5	BULONT ALAGI BARAT	Rp 316.860.000	Rp 59.935.000		Rp 177.710.000	Rp 79.215.000	Rp -
JUMLAH		Rp 1.590.528.000	Rp 271.330.750	Rp 210.346.250	Rp 711.219.000	Rp 397.632.000	Rp -
XVII.BULAWA							
1	MAMUN GAA	Rp 315.393.000	Rp 52.918.250		Rp 183.626.500	Rp 78.848.250	Rp -
2	KAUDUN DU BARAT	Rp 318.800.000	Rp 49.910.000		Rp 189.190.000	Rp 79.700.000	Rp -
3	MOPUY A	Rp 311.366.000	Rp 55.094.500		Rp 178.430.000	Rp 77.841.500	Rp -
4	KAUDUN DU	Rp 316.947.000	Rp 57.711.750		Rp 179.998.500	Rp 79.236.750	Rp -
5	BUKIT HIJAU	Rp 323.734.000	Rp 57.660.000		Rp 185.140.500	Rp 80.933.500	Rp -
6	MAMUN GAA TIMUR	Rp 326.340.000	Rp 52.835.000		Rp 191.920.000	Rp 81.585.000	Rp -
7	DUNGGI LATA	Rp 314.334.000	Rp 53.758.500		Rp 181.992.000	Rp 78.583.500	Rp -
8	PINOMONTIGA	Rp 321.636.000	Rp 48.423.000		Rp 192.804.000	Rp 80.409.000	Rp -
9	PATOA	Rp 315.547.000	Rp 55.174.750		Rp 181.485.500	Rp 78.886.750	Rp -
JUMLAH		Rp 2.864.097.000	Rp 483.485.750	Rp -	Rp 1.664.587.000	Rp 716.024.250	Rp -
XVIII.PINOBU							
1	PINOBU	Rp 321.374.000	Rp 52.329.300		Rp 188.701.200	Rp 80.343.500	Rp -
2	BANGIO	Rp 346.926.000	Rp 45.735.000		Rp 214.459.500	Rp 86.731.500	Rp -



3	DATARAN HIJAU	Rp 338.748.000	Rp 52.585.000		Rp 201.476.000	Rp 84.687.000	Rp -
4	PINOGU PERMAI	Rp 336.498.000	Rp 52.345.000		Rp 200.028.500	Rp 84.124.500	Rp -
5	TILONG GIBILA	Rp 322.870.000	Rp 52.212.500		Rp 189.940.000	Rp 80.717.500	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.666.416.000	Rp 255.206.800	Rp -	Rp 994.605.200	Rp 416.604.000	Rp -
	JUMLAH	Rp51.657.405.000	Rp6.974.395.386	Rp 10.409.480.364	Rp 21.009.174.450	Rp13.264.344.800	Rp 10.000

b. Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah untuk pembangunan Desa, dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk pembangunan di desa supaya terciptanya desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa terbatu dalam meningkatkan perekonomiannya

Berikut dapat disampaikan realisasi alokasi dana desa sebagaimana dibawah ini :

Tabel V.7
Realisasi Dana Desa Tahun 2016

NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (DANA DESA) APBN T.A 2016	REALISASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (DANA DESA) TAHAP I-60% T.A 2016	REALISASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (DANA DESA) TAHAP II-40% T.A 2016	SISA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (DANA DESA) TAHAP I-60% & II-40% T.A 2016
I.KECAMATAN KABILA					
1	DUTOHE	Rp 590.058.000	Rp 354.034.800	Rp 236.023.200	Rp -
2	TANGGILINGO	Rp 603.382.000	Rp 362.029.200	Rp 241.352.800	Rp -
3	TOTO SELATAN	Rp 599.310.000	Rp 359.586.000	Rp 239.724.000	Rp -
4	POOWO	Rp 599.662.000	Rp 359.797.200	Rp 239.864.800	Rp -



5	TALANGO	Rp 590.189.000	Rp 354.113.400	Rp 236.075.600	Rp -
6	POOWO BARAT	Rp 594.346.000	Rp 356.607.600	Rp 237.738.400	Rp -
7	DUTOHE BARAT	Rp 601.886.000	Rp 361.131.600	Rp 240.754.400	Rp -
JUMLAH		Rp 4.178.833.000	Rp 2.507.299.800	Rp 1.671.533.200	Rp -
II.KECAMATAN TAPA					
1	TALUMOPATU	Rp 596.131.000	Rp 357.678.600	Rp 238.452.400	Rp -
2	TALULOBUTU	Rp 593.390.000	Rp 356.034.000	Rp 237.356.000	Rp -
3	DUNGGALA	Rp 606.114.000	Rp 363.668.400	Rp 242.445.600	Rp -
4	LANGGE	Rp 609.691.000	Rp 365.814.600	Rp 243.876.400	Rp -
5	TALULOBUTU SELATAN	Rp 584.823.000	Rp 350.893.800	Rp 233.929.200	Rp -
6	KERAMAT	Rp 590.928.000	Rp 354.556.800	Rp 236.371.200	Rp -
7	MERANTI	Rp 599.448.000	Rp 359.668.800	Rp 239.779.200	Rp -
JUMLAH		Rp 4.180.525.000	Rp 2.508.315.000	Rp 1.672.210.000	Rp -
III.KECAMATAN SUWAWA					
1	TINGKOHUBU	Rp 599.919.000	Rp 359.951.400	Rp 239.967.600	Rp -
2	BOLUDAWA	Rp 624.055.000	Rp 374.433.000	Rp 249.622.000	Rp -
3	BUBE	Rp 583.686.000	Rp 350.211.600	Rp 233.474.400	Rp -
4	HULUDUOTAMO	Rp 588.728.000	Rp 353.236.800	Rp 235.491.200	Rp -
5	ULANTHA	Rp 600.319.000	Rp 360.191.400	Rp 240.127.600	Rp -
6	TINELO	Rp 607.039.000	Rp 364.223.400	Rp 242.815.600	Rp -
7	BUBEYA	Rp 595.873.000	Rp 357.523.800	Rp 238.349.200	Rp -



8	BUBE BARU	Rp 598.164.000	Rp 358.898.400	Rp 239.265.600	Rp -
9	TINGKOHUBU TIMUR	Rp 588.617.000	Rp 353.170.200	Rp 235.446.800	Rp -
10	HELUMO	Rp 588.187.000	Rp 352.912.200	Rp 235.274.800	Rp -
JUMLAH		Rp 5.974.587.000	Rp 3.584.752.200	Rp 2.389.834.800	Rp -
IV.BONE PANTAI					
1	TAMBOO	Rp 592.995.000	Rp 355.797.000	Rp 237.198.000	Rp -
2	BILUNGALA	Rp 611.511.000	Rp 366.906.600	Rp 244.604.400	Rp -
3	UABANGA	Rp 612.161.000	Rp 367.296.600	Rp 244.864.400	Rp -
4	TOLOTIO	Rp 591.282.000	Rp 354.769.200	Rp 236.512.800	Rp -
5	TONGO	Rp 602.554.000	Rp 361.532.400	Rp 241.021.600	Rp -
6	BILUNGALA UTARA	Rp 603.198.000	Rp 361.918.800	Rp 241.279.200	Rp -
7	TIHU	Rp 604.207.000	Rp 362.524.200	Rp 241.682.800	Rp -
8	TUNAS JAYA	Rp 594.144.000	Rp 356.486.400	Rp 237.657.600	Rp -
9	LEMBAH HIJAU	Rp 612.422.000	Rp 367.453.200	Rp 244.968.800	Rp -
10	BATU HIJAU	Rp 596.095.000	Rp 357.657.000	Rp 238.438.000	Rp -
	OMBULO HIJAU	Rp 595.898.000	Rp 357.538.800	Rp 238.359.200	Rp -
12	KEMIRI	Rp 598.039.000	Rp 358.823.400	Rp 239.215.600	Rp -
13	PELITA HIJAU	Rp 609.680.000	Rp 365.808.000	Rp 243.872.000	Rp -
JUMLAH		Rp 7.824.186.000	Rp 4.694.511.600	Rp 3.129.674.400	Rp -
V.BULANGO UTARA					
1	BOIDU	Rp 592.659.000	Rp 355.595.400	Rp 237.063.600	Rp -



2	BANDUNGAN	Rp 598.055.000	Rp 358.833.000	Rp 239.222.000	Rp -
3	TUPA	Rp 601.516.000	Rp 360.909.600	Rp 240.606.400	Rp -
4	LONGALO	Rp 600.353.000	Rp 360.211.800	Rp 240.141.200	Rp -
5	TULOA	Rp 604.591.000	Rp 362.754.600	Rp 241.836.400	Rp -
6	KOPI	Rp 589.641.000	Rp 353.784.600	Rp 235.856.400	Rp -
7	LOMAYA	Rp 600.147.000	Rp 360.088.200	Rp 240.058.800	Rp -
8	SUKA DAMAI	Rp 601.852.000	Rp 361.111.200	Rp 240.740.800	Rp -
9	BUNUO	Rp 593.815.000	Rp 356.289.000	Rp 237.526.000	Rp -
JUMLAH		Rp 5.382.629.000	Rp 3.229.577.400	Rp 2.153.051.600	Rp -
VI.TILONGKABILA					
1	BONGOIME	Rp 611.530.000	Rp 366.918.000	Rp 244.612.000	Rp -
2	BONGOPINI	Rp 609.544.000	Rp 365.726.400	Rp 243.817.600	Rp -
3	TOTO UTARA	Rp 603.586.000	Rp 362.151.600	Rp 241.434.400	Rp -
4	MOUTONG	Rp 596.107.000	Rp 357.664.200	Rp 238.442.800	Rp -
5	TUNGGULO	Rp 609.356.000	Rp 365.613.600	Rp 243.742.400	Rp -
6	LONUO	Rp 602.795.000	Rp 361.677.000	Rp 241.118.000	Rp -
7	TAMBOO	Rp 591.905.000	Rp 355.143.000	Rp 236.762.000	Rp -
8	ILOHELUMA	Rp 592.726.000	Rp 355.635.600	Rp 237.090.400	Rp -
9	MOTILANGO	Rp 609.755.000	Rp 365.853.000	Rp 243.902.000	Rp -
10	BUTU	Rp 597.407.000	Rp 358.444.200	Rp 238.962.800	Rp -
11	PERMATA	Rp 599.794.000	Rp 359.876.400	Rp 239.917.600	Rp -



12	TUNGGULO SELATAN	Rp 585.963.000	Rp 351.577.800	Rp 234.385.200	Rp -
13	BONGOHULAWA	Rp 604.846.000	Rp 362.907.600	Rp 241.938.400	Rp -
14	BERLIAN	Rp 586.162.000	Rp 351.697.200	Rp 234.464.800	Rp -
JUMLAH		Rp 8.401.476.000	Rp 5.040.885.600	Rp 3.360.590.400	Rp -
VII.BOTUPINGGE					
1	TIMBUOLO	Rp 589.059.000	Rp 353.435.400	Rp 235.623.600	Rp -
2	PANGGULO	Rp 590.945.000	Rp 354.567.000	Rp 236.378.000	Rp -
3	LUWOHU	Rp 579.956.000	Rp 347.973.600	Rp 231.982.400	Rp -
4	BUATA	Rp 586.001.000	Rp 351.600.600	Rp 234.400.400	Rp -
5	TIMBUOLO TIMUR	Rp 590.257.000	Rp 354.154.200	Rp 236.102.800	Rp -
6	TANAH PUTIH	Rp 588.534.000	Rp 353.120.400	Rp 235.413.600	Rp -
7	PANGGULO BARAT	Rp 581.493.000	Rp 348.895.800	Rp 232.597.200	Rp -
8	TIMBUOLO TENGAH	Rp 590.195.000	Rp 354.117.000	Rp 236.078.000	Rp -
9	SUKMA	Rp 582.322.000	Rp 349.393.200	Rp 232.928.800	Rp -
JUMLAH		Rp 5.278.762.000	Rp 3.167.257.200	Rp 2.111.504.800	Rp -
VIII.KABILA BONE					
1	HUANGOBOTU	Rp 598.403.000	Rp 359.041.800	Rp 239.361.200	Rp -
2	MOLOTABU	Rp 625.357.000	Rp 375.214.200	Rp 250.142.800	Rp -
3	OLUHUTA	Rp 644.678.000	Rp 386.806.800	Rp 257.871.200	Rp -
4	OLELE	Rp 630.938.000	Rp 378.562.800	Rp 252.375.200	Rp -
5	BOTUTONUO	Rp 612.062.000	Rp 367.237.200	Rp 244.824.800	Rp -



6	MODELOMO	Rp 609.552.000	Rp 365.731.200	Rp 243.820.800	Rp -
7	BILUANGO	Rp 601.143.000	Rp 360.685.800	Rp 240.457.200	Rp -
8	BOTUBARANI	Rp 599.099.000	Rp 359.459.400	Rp 239.639.600	Rp -
9	BINTALAHE	Rp 598.700.000	Rp 359.220.000	Rp 239.480.000	Rp -
JUMLAH		Rp 5.519.932.000	Rp 3.311.959.200	Rp 2.207.972.800	Rp -
IX.BONE					
1	TALUDAA	Rp 614.782.000	Rp 368.869.200	Rp 245.912.800	Rp -
2	SOGITIA	Rp 632.751.000	Rp 379.650.600	Rp 253.100.400	Rp -
3	MOODULIO	Rp 607.942.000	Rp 364.765.200	Rp 243.176.800	Rp -
4	BILONLANTUNGA	Rp 601.481.000	Rp 360.888.600	Rp 240.592.400	Rp -
5	INO GALUMA	Rp 596.110.000	Rp 357.666.000	Rp 238.444.000	Rp -
6	MONANO	Rp 598.196.000	Rp 358.917.600	Rp 239.278.400	Rp -
7	TUMBUH MEKAR	Rp 592.895.000	Rp 355.737.000	Rp 237.158.000	Rp -
8	MOLAMAHU	Rp 607.798.000	Rp 364.678.800	Rp 243.119.200	Rp -
9	MASIAGA	Rp 594.787.000	Rp 356.872.200	Rp 237.914.800	Rp -
10	ILOHUUWA	Rp 602.875.000	Rp 361.725.000	Rp 241.150.000	Rp -
11	MUARA BONE	Rp 592.867.000	Rp 355.720.200	Rp 237.146.800	Rp -
12	CENDANA PUTIH	Rp 592.454.000	Rp 355.472.400	Rp 236.981.600	Rp -
13	WALUHU	Rp 588.164.000	Rp 352.898.400	Rp 235.265.600	Rp -
14	PERMATA	Rp 589.824.000	Rp 353.894.400	Rp 235.929.600	Rp -
JUMLAH		Rp 8.412.926.000	Rp 5.047.755.600	Rp 3.365.170.400	Rp -



X.BONE RAYA					
1	INOMATA	Rp 603.147.000	Rp 361.888.200	Rp 241.258.800	Rp -
2	TOMBULILATO	Rp 587.201.000	Rp 352.320.600	Rp 234.880.400	Rp -
3	MOOTAYU	Rp 588.735.000			Rp 588.735.000
4	MOOTINELO	Rp 590.916.000	Rp 354.549.600	Rp 236.366.400	Rp -
5	PELITA JAYA	Rp 602.700.000			Rp 602.700.000
6	MOOPIYA	Rp 591.391.000	Rp 354.834.600	Rp 236.556.400	Rp -
7	ALO	Rp 599.349.000	Rp 359.609.400	Rp 239.739.600	Rp -
8	LAUT BIRU	Rp 593.726.000	Rp 356.235.600	Rp 237.490.400	Rp -
9	BUNGA	Rp 591.951.000	Rp 355.170.600	Rp 236.780.400	Rp -
10	MOOTAWA	Rp 591.065.000	Rp 354.639.000	Rp 236.426.000	Rp -
JUMLAH		Rp 5.940.181.000	Rp 2.849.247.600	Rp 1.899.498.400	Rp 1.191.435.000
XI.SUWAWA TIMUR					
1	TULABOLO	Rp 596.631.000	Rp 357.978.600	Rp 238.652.400	Rp -
2	DUMBAYA BULAN	Rp 604.905.000	Rp 362.943.000	Rp 241.962.000	Rp -
3	TULABOLO TIMUR	Rp 617.370.000	Rp 370.422.000	Rp 246.948.000	Rp -
4	TILANGOBULA	Rp 602.198.000	Rp 362.818.800	Rp 240.879.200	Rp (1.500.000)
5	PODUWOMA	Rp 588.358.000	Rp 353.014.800	Rp 235.343.200	Rp -
6	PANGGULO	Rp 584.783.000	Rp 350.869.800	Rp 233.913.200	Rp -
7	TULABOLO BARAT	Rp 589.519.000	Rp 353.711.400	Rp 235.807.600	Rp -
8	PANGI	Rp 589.061.000	Rp 353.436.600	Rp 235.624.400	Rp -



9	TINEMBA	Rp 585.334.000	Rp 351.200.400	Rp 234.133.600	Rp -
JUMLAH		Rp 5.358.159.000	Rp 3.216.395.400	Rp 2.143.263.600	Rp (1.500.000)
XII.SUWAWA SELATAN					
1	BULONTALA	Rp 597.832.000	Rp 358.699.200	Rp 239.132.800	Rp -
2	LIBUNGO	Rp 598.024.000	Rp 358.814.400	Rp 239.209.600	Rp -
3	MOLINTOGUPO	Rp 616.884.000	Rp 370.130.400	Rp 246.753.600	Rp -
4	BONEDAA	Rp 601.893.000	Rp 361.135.800	Rp 240.757.200	Rp -
5	BONDAWUNA	Rp 606.377.000	Rp 363.826.200	Rp 242.550.800	Rp -
6	BULONTALA TIMUR	Rp 604.916.000	Rp 362.949.600	Rp 241.966.400	Rp -
7	PANCURAN	Rp 595.137.000	Rp 357.082.200	Rp 238.054.800	Rp -
8	BONDARAYA	Rp 596.350.000	Rp 357.810.000	Rp 238.540.000	Rp -
JUMLAH		Rp 4.817.413.000	Rp 2.890.447.800	Rp 1.926.965.200	Rp -
XIII.SUWAWA TENGAH					
1	LOMPOTOO	Rp 592.044.000	Rp 355.226.400	Rp 236.817.600	Rp -
2	LOMBONGO	Rp 598.900.000	Rp 359.340.000	Rp 239.560.000	Rp -
3	DUANO	Rp 606.939.000	Rp 364.163.400	Rp 242.775.600	Rp -
4	TOLOMATO	Rp 582.140.000	Rp 349.284.000	Rp 232.856.000	Rp -
5	ALALE	Rp 593.833.000	Rp 356.299.800	Rp 237.533.200	Rp -
6	TAPADAA	Rp 596.263.000	Rp 357.757.800	Rp 238.505.200	Rp -
JUMLAH		Rp 3.570.119.000	Rp 2.142.071.400	Rp 1.428.047.600	Rp -
XIV.BULANGO ULU					



1	MONGILO	Rp 605.500.000	Rp 363.300.000	Rp 242.200.000	Rp -
2	OWATA	Rp 622.202.000	Rp 373.321.200	Rp 248.880.800	Rp -
3	MONGILO UTARA	Rp 605.054.000	Rp 363.032.400	Rp 242.021.600	Rp -
4	PILOLAHEYA	Rp 602.268.000	Rp 361.360.800	Rp 240.907.200	Rp -
5	ILOMATA	Rp 595.837.000	Rp 357.502.200	Rp 238.334.800	Rp -
6	SUKA MAKMUR	Rp 595.075.000	Rp 357.045.000	Rp 238.030.000	Rp -
JUMLAH		Rp 3.625.936.000	Rp 2.175.561.600	Rp 1.450.374.400	Rp -
XV.BULANGO SELATAN					
1	AYULA SELATAN	Rp 595.590.000	Rp 357.354.000	Rp 238.236.000	Rp -
2	HUNTU BARAT	Rp 620.588.000	Rp 372.352.800	Rp 248.235.200	Rp -
3	AYULA UTARA	Rp 607.209.000	Rp 364.325.400	Rp 242.883.600	Rp -
4	HUNTU SELATAN	Rp 605.119.000	Rp 363.071.400	Rp 242.047.600	Rp -
5	AYULA TILANGO	Rp 615.811.000	Rp 369.486.600	Rp 246.324.400	Rp -
6	AYULA TIMUR	Rp 590.260.000	Rp 354.156.000	Rp 236.104.000	Rp -
7	LAMAHU	Rp 619.462.000	Rp 371.677.200	Rp 247.784.800	Rp -
8	TINELO AYULA	Rp 594.539.000	Rp 356.723.400	Rp 237.815.600	Rp -
9	SEJAHTERA	Rp 603.061.000	Rp 361.836.600	Rp 241.224.400	Rp -
10	HUNTU UTARA	Rp 602.444.000	Rp 361.466.400	Rp 240.977.600	Rp -
JUMLAH		Rp 6.054.083.000	Rp 3.632.449.800	Rp 2.421.633.200	Rp -
XVI.BULANGO TIMUR					
1	BULOTALANGI	Rp 596.870.000	Rp 358.122.000	Rp 238.748.000	Rp -



2	TOLUWAYA	Rp 587.142.000	Rp 352.285.200	Rp 234.856.800	Rp -
3	POPODU	Rp 601.165.000	Rp 360.699.000	Rp 240.466.000	Rp -
4	BULONTALANGI TIMUR	Rp 593.611.000	Rp 356.166.600	Rp 237.444.400	Rp -
5	BULONTALAGI BARAT	Rp 593.072.000	Rp 355.843.200	Rp 237.228.800	Rp -
JUMLAH		Rp 2.971.860.000	Rp 1.783.116.000	Rp 1.188.744.000	Rp -
XVII.BULAWA					
1	MAMUNGAA	Rp 591.542.000	Rp 354.925.200	Rp 236.616.800	Rp -
2	K Aidundu Barat	Rp 595.097.000	Rp 357.058.200	Rp 238.038.800	Rp -
3	MOPUYA	Rp 587.339.000	Rp 352.403.400	Rp 234.935.600	Rp -
4	K Aidundu	Rp 593.163.000	Rp 355.897.800	Rp 237.265.200	Rp -
5	BUKIT HIJAU	Rp 600.246.000	Rp 360.147.600	Rp 240.098.400	Rp -
6	MAMUNGAA TIMUR	Rp 602.966.000	Rp 361.779.600	Rp 241.186.400	Rp -
7	DUNGGILATA	Rp 590.436.000	Rp 354.261.600	Rp 236.174.400	Rp -
8	PINOMONTIGA	Rp 598.057.000	Rp 358.834.200	Rp 239.222.800	Rp -
9	PATOA	Rp 591.702.000	Rp 355.021.200	Rp 236.680.800	Rp -
JUMLAH		Rp 5.350.548.000	Rp 3.210.328.800	Rp 2.140.219.200	Rp -
XVIII.PINOGU					
1	PINOGU	Rp 597.784.000	Rp 358.670.400	Rp 239.113.600	Rp -
2	BANGIO	Rp 624.449.000	Rp 374.669.400	Rp 249.779.600	Rp -
3	DATARAN HIJAU	Rp 615.914.000	Rp 369.548.400	Rp 246.365.600	Rp -
4	PINOGU PERMAI	Rp 613.566.000	Rp 368.139.600	Rp 245.426.400	Rp -



5	TILONGGIBILA	Rp 599.345.000	Rp 359.607.000	Rp 239.738.000	Rp -
JUMLAH		Rp 3.051.058.000	Rp 1.830.634.800	Rp 1.220.423.200	Rp -
JUMLAH		Rp 95.893.213.000	Rp 56.822.566.800	Rp 37.880.711.200	Rp 1.189.935.000

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di 150 Desa Tahun 2016 yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango secara umum sudah cukup bejalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu diambil langka-langka strategis sebagai berikut diantaranya Memberikan pembinaan kepada seluruh desa dimasing masing wilayah kecamatan dalam pengelolaan bantuan keuangan yang diterima langsung oleh desa, baik secara administrasi maupun teknis terkait pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis yang berlaku, serta melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala sebagai bentuk langka pengendalian pemanfaatan anggaran agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan kota selama tahun 2008 juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dikelola. Beberapa tugas umum pemerintahan antara lain :

- Kerjasama antar daerah
- Kerjasama daerah dengan pihak ketiga
- Kerjasama Luar Negeri
- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain
- Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
- Pembinaan Batas Wilayah
- Pencegahan dan penanggulangan bencana
- Pengelolaan kawasan khusus, dan
- Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

6.1. Kerjasama Antar Daerah

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Ada berbagai keharusan daerah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah bahwa daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan Permendagri Nomor 22 tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya -sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya- yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021, arah kebijakan kerjasama pembangunan termaktub pada Misi ke 3 “*Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan*”, yang bertujuan meningkatkan peluang investasi dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi, strateginya adalah peningkatan iklim investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi, maka arah kebijakan kerjasamanya adalah pengembangan kerjasama pembangunan baik kerjasama antar daerah, antar level pemerintahan, kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan penelitian serta stakeholder lainnya. Sedangkan pada Misi ke 4: “*Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya*”, yang mempunyai Tujuan Meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi publik dengan sasaran : terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintah dan atau pemangku kepentingan, dengan menggunakan strategi melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, dunia usaha dan perguruan tinggi
2. Pelaksanaan riset secara komprehensif dan sistematis yang mengacu pada akar permasalahan daerah, sehingga diperlukan sebuah koordinasi dan kerjasama yang nyata dan sistematis dari berbagai pihak untuk menjalankannya

Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2016 sebagai berikut;

6.1.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus berpartisipasi dan mengembangkan koordinasi antar daerah melalui beberapa wadah kerja sama, antara lain Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).

Selain itu pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan kerjasama dengan kabupaten Sidendrang Rappang dan Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dalam usaha pengembangan peternakan selain itu dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kerja sama tentang sinergitas





pengendalian pembangunan kabupaten/ kota melalui sistem monitoring evaluasi dan pelaporan secara elektronik dengan nomor : 99/HKM-ORG/KB/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

6.1.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Memang secara langsung, pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Bone Bolango tidak ada permasalahan mendasar, namun ada beberapa hal permasalahan dasar sehingga menyebabkan kutang terbangunnya kerjasama antar daerah khususnya antar Provinsi Gorontalo maupun dalam regional Sulawesi, permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Terlebih lagi, tidak jarang pelayanan publik yang diusahakan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) lebih banyak merugi dan disubsidi APBD sehingga kurang menarik dikerjasamakan. Pemerintah Daerah kemudian lebih memilih bekerjasama dengan pihak swasta karena menganggap kerjasama dengan daerah lain justru lebih rumit dan rawan terjadi konflik. Selain itu, belum ada mekanisme insentif untuk daerah-daerah yang bekerja sama dalam peningkatan efektivitas/efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik
2. KAD belum menjadi satu inovasi prioritas untuk di-diseminasikan ke daerah. Selama ini KAD biasanya terbentuk atas inisiatif daerah sendiri. Masih sangat kurang fasilitasi atau inisiasi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.
3. Belum optimalnya peran kelembagaan kerjasama antar daerah seperti Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).dalam memfasilitasi terbentuknya kerjasama antar daerah maupun upaya pemecahan permasalahan secara bersama.

b. Solusi

Dari beberapa permasalahan mendasar di atas, maka ada beberapa solusi yang bisa menjadi pijakan Kabupaten Bone Bolango untuk membangun kerjasama



yang dapat saling menguntungkan dengan beberapa daerah disekitar maupun antar regional Sulawesi bahkan bisa dikembangkan pada kerjasama yang dijalin antara kota-kota di luar negeri dikenal dengan nama *sister city* atau *state/ province*. Melalui hubungan kerjasama antar kota *sister city* atau *state/ province* tersebut diharapkan masyarakat kedua kota akan dapat saling mengenal dan saling membantu tanpa membedakan sistem sosial dan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Beberapa solusi tersebut diantaranya adalah:

1. Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan KAD biasanya karena daerah tidak tahu atau tidak menyadari potensi yang bisa dikerjakamkan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensi-potensi kerjasama tersebut. Database “potensi kerjasama” dapat menjadi instrumen yang penting dalam mendorong kerjasama daerah.
2. Penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi khususnya Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dapat dilakukan dalam hal inisiasi, penyusunan sistem/mechanisme insentif, dan diseminasi best practices untuk mendorong peningkatan KAD.
3. Untuk tahun tahun mendatang, Kabupaten Bone Bolango dapat mengembangkan KAD berbasis potensi ekonomi yang memang cukup melimpah. Selama ini sudah banyak model pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada KAD. Misalnya KAPET, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi, dan sebagainya. Model-model ini dapat dimodifikasi untuk sektor-sektor lainnya.

6.2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga

6.2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Pada prinsipnya pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan kerjasama antara kepala daerah dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak ketiga pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui



bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, dan teknologi pengolahan pangan. Manfaat dari adanya kerjasama daerah, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha;
2. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
3. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumberdaya, dan memperoleh manfaat dari sumberdaya yang tersedia.

6.2.2 Aloksi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan menata kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 118.703.496.

Beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2016 antara lain:

1. Kerjasama dengan PT. Telkom Gorontalo, Tbk tentang kerjasama Smart City Nusantara yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2016.
2. Nota kesepakatan antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone Bolango dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gorontalo Nomor: 102/BPMPTSP-BB/ /VII/2016 tentang optimalisasi penyelenggaraan ijin pelayanan publik bagi badan usaha di Kabupaten Bone Bolango.
3. Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Universitas Negeri Gorontalo tentang pembangunan Kampus UNG tanggal 23 Juni.
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolang dengan PT. Bank Sulut Gorontalo dan BPKP Perwakilan Gorontalo tentang Sistem Layanan Kasda Online berupa pemanfaatan aplikasi Kas Daerah secara Online system yang terintegrasi dengan aplikasi simda keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.



5. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga sudah menjajaki kerjasama dengan investor Korea tentang Pembangunan Solar Energy Power Plant.
6. Kerjasama RS. Toto Kabila dengan PT. Sido Muncul, Kodim 1304 dan Perdami Cabang Manado dalam rangka kegiatan bakti sosial operasi katarak.

6.2.3. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak ketiga pada umumnya berjalan lancar. Beberapa hal yang perlu perhatian adalah ketersediaan database penyelenggaraan kerjasama daerah serta pengendalian dokumen kerjasama daerah baik kepesakatan maupun perjanjian kerjasama.

6.3. Kerjasama Luar Negeri

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa Daerah diberi kesempatan untuk melakukan hubungan luar negeri diantaranya kerjasama luar negeri dimana pelaksanaannya harus melalui koordinasi pemerintah. Sebagai landasan operasional, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non-Pemerintah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan

pengawasan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkannya kepada Gubernur.

6.3.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak luar negeri pada tahun 2016 adalah Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Ehime University Universitas Negeri Gorontalo pelaksanaan riset dan kajian tentang dibidang pertanian organik, peternakan, pariwisata dan industri yang berbasis sumber daya local. Penandatanganan MoU tersebut dihadiri langsung oleh Prof Yuichi Ohashi, Presiden Ehime University Japan. Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyerahkan pakaian adat Gorontalo kepada Ohashi saat penandatanganan kerja sama dengan Pemda Bone Bolango. Kegiatan ini merupakan kerjasama lanjutan yang telah terjalin sebelumnya selama 2 tahun yang fokusnya adalah kegiatan riset perlindungan dan pengelolaan lingkungan, khususnya pada wilayah beresiko tercemar akibat aktivitas pertambangan.



6.3.3. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak luar negeri pada umumnya berjalan lancar atau tidak permasalahan mendasar yang bias berpengaruh terhadap keberlanjutan kerjasama ini.

6.4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bone Bolango dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- (LKPP) tentang kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan teknologi serta informasi pada system pengadaan secara elektronik
2. Kerjasama Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bone Bolango dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang di dukung oleh Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) tentang tentang pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan.
 3. Memorandum of Understanding (MoU) antara BNNK Bone Bolango dengan pihak RSUD Toto Kabila, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Bolango dan Kantor Kemenag Bone Bolango tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk mewujudkan Kabupaten Bone Bolango bebas narkoba tahun 2020 sebagai bagian strategi mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2020.
 4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang peningkatan kualitas data untuk program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.
 5. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BKPPD Provinsi tentang pelaksanaan Diklat PIM IV.
 6. Memorandum Of Understanding (MOU) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Kantor Wilayah (kanwil) Perbendaharaan Gorontalo tentang sistem informasi kredit program (skip).



6.5. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah

6.5.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 6 urusan pemerintahan absolute yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat



menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau dapat menugaskan kepada gubernur, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Sebagaimana dimaklumi bahwa koordinasi pemerintahan pada awalnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut pendekatan uniteritorial dan unipersonal. Kepala Daerah karena jabatannya adalah Kepala Wilayah, dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah maka Kepala Wilayah menjalankan fungsi koordinasi terhadap semua instansi vertikal yang ada di wilayahnya.

Dalam rejim Undang-Undang 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tidak lagi merangkap jabatan sebagai Kepala Wilayah, sehingga fungsi koordinasi dengan instansi vertikal sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat digunakan, namun lebih melekat pada fungsi Kepala Daerah sebagai Koordinator Pemerintahan di Daerah, yang perlu diperkuat dengan kepastian tugas dan kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi pemerintahan.

6.5.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui: (a) rapat koordinasi, (b) permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat, dan (c) konsultasi.

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, utamanya menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan Pemerintah Pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain :

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 1304 Gorontalo dan Polres Bone Bolango dalam bidang pertahanan dan keamanan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Polres Bone Bolango tentang peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 1304 tentang pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton di Kecamatan Pinogu.
5. Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Kepolisian Resort (Polres) Bone Bolango tentang pembentukan kawasan aman gangguan kamtibmas.

b. Bidang Yustisi

Upaya Pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Kejaksaan Negeri Suwawa melalui Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan guna mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Bone Bolango agar supaya penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum

2. Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara tanggal 29 September 2016.



- c. Lainnya

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan instansi vertical lainnya adalah kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Bolango tentang penyajian dan validasi data makro dan data sektoral daerah.

6.6. Pembinaan Batas Wilayah

6.6.1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan



diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis di lapangan.

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah, kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.

6.6.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang bertujuan untuk lebih mengukuhkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pembinaan dan koordinasi tentang batas wilayah antara wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan daerah-daerah tetangga yang berbatasan antara lain: pengesahan Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Goontalo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam rangka



penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) dokumen RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tapal batas.

6.6.3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan laporan dari beberapa orang masyarakat yang berada di Kecamatan Pinogu, bahwa telah terjadi pemindahan tapal batas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan tapal batas antar daerah yang bertetangga, maka di rasa perlu untuk membahas kembali penentuan tapal batas khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau ke Kementerian Dalam Negeri yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

6.7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.7.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki kerawanan terhadap bencana, berdasarkan data yang ada dibencana yang sering terjadi sepanjang tahun 2016 telah terjadi beberapa kejadian bencana diantaranya Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Kebakaran yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango,

- a) Bencana banjir melanda 4 Kecamatan 14 Desa dengan jumlah KK sebanyak 456 sedangkan jumlah jiwanya mencakup 1.684;
- b) Bencana Banjir Bandang melanda 1 Kecamatan yang terdiri dari 5 desa dengan jumlah KK sebanyak 189 jiwa;
- c) Bencana Tanah Longsor mencakup 3 Kecamatan 3 desa dengan jumlah KK sebanyak 62 sedangkan jumlah jiwanya sebanyak 123,
- d) Bencana Angin Puting Beliung melanda 1 Kecamatan 1 Desa dengan jumlah KK sebanyak 1 sedangkan jumlah jiwanya 4, untuk



- e) Bencana Kebakaran berskala kecil melanda 7 Kecamatan 7 Desa dengan jenis Kebakaran rumah warga dan Kebakaran gilingan padi Yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Rekapitulasi Kejadian Bencana yang terjadi
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Tgl Kejadian	Kecamatan / desa	Jenis Bencana	Jumlah	Korban mengungsi	Upaya Penanganan
09 mei 2016	Kec. Tilongkabila - Desa Berlian Kec. Tapa	Banjir Banjir	52 kk dan 182 jiwa	150	- Memberikan bantuan logistik (makanan siap saji) - Pembersiah rumah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor - Pemasangan tenda pengungsian
	- Desa bongoime	Banjir	72 kk dan 320 jiwa	250	
	- Desa Motilango	Banjir			
	- Desa Totoutara	Banjir			
	- Desa Tamboo	Banjir			
	Kec. Tapa				



	- Desa Talulobutu				
22 Juni 2016	Kec. Bulango Utara				
	- Desa Tupa	Banjir	110 kk dan 350 jiwa	350	
	- Desa Kopi	Banjir	33 kk dan 129 jiwa	129	
	- Desa Bunuo	Banjir	6 kk dan 18 jiwa	18	
	- Desa Lomayo	Banjir	7 kk dan 25 jiwa	25	
	- Desa Boidu	Banjir			
	- Desa Suka Damai	Banjir			
	- Desa Bendungan	Banjir			
4 juli 2016	Kec. Kabila Bone				
	- Desa Oluhuta	Banjir dan Tanah Longsor	30 kk dan 120 jiwa	120	
	Kec. Bonepantai				
	- Desa Tolotio	Tanah Longsor			
	Kec. Bulawa				
	- Desa Kaidundu Barat	Tanah Longsor	1 kk dan 3 jiwa		
	Kec. Bone				
	- Desa Taludaa	Banjir Bandang	100 kk dan 400 jiwa	393	
	- Desa masiaga	Banjir Bandang	18 kk dan 72 jiwa	74	
	- Desa Moodulio	Banjir Bandang	20 kk dan 67 jiwa	67	
	- Desa Bilolantunga	Angin Kencang	1 kk dan 4 jiwa	4	
	- Desa	Banjir	9 kk dan 28	28	



	Segitia	Bandang	jiwa		
	- Desa Muara Bone	Banjir Bandang	42 kk dan 186 jiwa	186	
13 januari 2016	Kec. Kabila - Desa Padengo	Kebakaran rumah warga			
26 februari 2016	Kec. Kabila - Desa Tanggilingo	Kebakaran rumah warga			
13 maret 2016	Kec. Suwawa - Desa Bube	Kebakaran gilingan padi			
19 maret 2016	Kec. Tilongkabila - Desa Moutong	Kebakaran rumah warga			
20 maret 2016	Kec. Tapa - Desa ayula	Kebakaran rumah warga			
22 maret 2016	Kec. Kabila Bone - Desa biluango	Kebakaran rumah warga			
23 Maret 2016	Kec. Suwawa - Desa Ulantha	Kebakaran rumah warga			

6.7.2 Status Bencana (Nasional Regional / Provinsi atau lokasi / Kab / kota)

Walaupun secara geografi kabupaten bone bolango merupakan wilayah rawan bencana akan tetapi pada umumnya bencana alam yang terjadi dikabupaten bone bolango berstatus lokal;

6.7.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kabupaten Bone Bolango memiliki sumberdaya yang setiap saat diharapkan dapat dioperasikan dalam penanggulangan bencana baik itu pada kegiatan kesiapsiagaan, pada kondisi tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggran untuk



penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2016 dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel VI.1
Kegiatan dan Anggaran Kebencanaan

No	Kegiatan	APBD	APBN
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam dengan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana evakuasi untuk korban bencana alam	281.831.000	
2	penyaluran bfferstock untuk korban bencana alam. Bencana Alam yang terjadi pada tahun 2016 meliputi : Bencana alam tanah longsor, bencana alam kekeringan, Bencana alam angin puting beliung, dan Bencana alam banjir		
3	Dana Siap Pakai (DSP) APBN bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir		190.865.000
4	Hibah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi		7.000.000.000

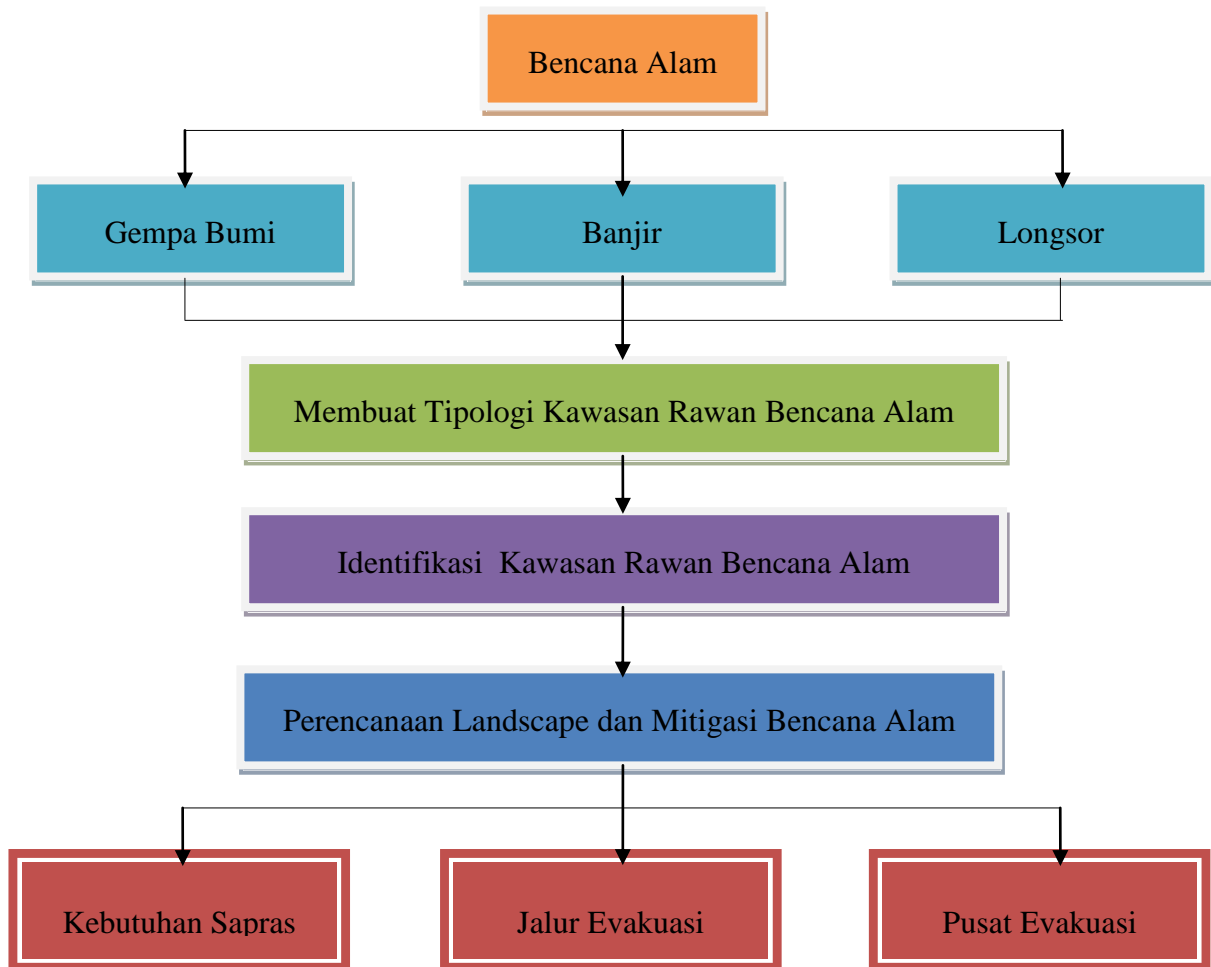
. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir – akhir ini turut mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadi bencana alam beberapa tahun terakhir ini. Keadaan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah maupun masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut perlu tindakan antisipasi dan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi bencana yang bertujuan



untuk meningkatkan kewaspadaan serta keterlibatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana sekaligus menghindarkan dan atau meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan bencana, untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk antisipasi bencana alam dengan kegiatan :

- a. Pembentukan 3 (tiga) Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kab. Bone Bolango. diantaranya Kecamatan Bulango Utara Desa Tupa dan Kecamatan Suwawa Selatan Desa Libungo dan Kecamatan Bone Desa Sogitia;
- b. Mengidentifikasi kawasan rawan bencana alam di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yaitu Kecamatan Bone, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bulango Utara dan Kecamatan Botupingge;
- c. Mengidentifikasi tipe jalur evakuasi dan mitigasi bencana alam di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yaitu Kecamatan Bone, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bulango Utara dan Kecamatan Botupingge. Selanjutnya untuk kegiatan mitigasi bencana maka perlu adanya suatu rancangan pola permukiman, jalur evakuasi, dan pusat – pusat evakuasi seperti dibawah ini :



Kajian kebutuhan pra bencana alam terdiri dari :

- Konsep mitigasi bencana alam dalam penataan ruang
- Penetapan kawasan rawan bencana alam
- Permukiman
- Bencana tanah longsor
- Bencana gempa bumi

6.7.5. Potensi Bencana Yang Dihadapi dan Solusi



Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- a) Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
- b) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana.
- c) Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat

Dari analisis rencana kontigensi Kabupaten Bone Bolango pada Tahun sebelumnya bahwa sudah bisa dipastikan bahwa potensi bencana yang diperkirakan terjadi diantaranya :

a) Banjir

Banjir adalah kondisi suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Arti lainnya, banjir adalah aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Banjir merupakan bencana yang selalu menimpa beberapa wilayah kecamatan, terutama pada musim hujan. berbagai faktor penyebab berdasarkan data yang ada pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bone bolango mencatat bencana banjir ini cukup luar biasa kejadiannya, mengapa dapat dikatakan cukup luar biasa kejadiannya, karena hampir dalam kurung waktu satu tahun kejadian bencana banjir sering terjadi di wilayah kabupaten bone bolango, sehingga mengakibatkan fungsi-fungsi sosial masyarakat terganggu.

b) Tanah Longsor

Tanah Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut



menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Tanah longsor salah bencana yang sering melanda wilayah bone bolango, karena sebaaian besar wilayah dan pemukiman penduduk berada pada daerah lereng sepanjang pengunungan dan menurut hasil penelitian bahwa kentuk tanah di wilayah ini cukup rawan untuk terjadinya longsor.

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis Wilayah Kabupaten Bone Bolango mempunyai berbagai macam potensi bencana alam yang tingkat kerawannya sangat tinggi. Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan upaya-upaya Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
2. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam mengembangkan upaya Penanggulangan Bencana
3. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap Penanggulangan Bencana
4. Meningkatkan upaya-upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

6.8. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya kawasan khusus, melainkan kawasan strategis. Namun demikian, apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan definisi



kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030 meliputi:

1. Pengembangan LANTAMAL Angkatan Laut; dan
2. Kepolisian Air di Kecamatan Kabila Bone

Kedua hal diatas merupakan Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pandang Kepentingan Pertahanan dan Keamanan meliputi lahan-lahan yang digunakan dan dikuasai oleh institusi pertahanan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango, terdiri atas :

1. Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya di Kecamatan Tapa;
2. Kawasan blok tambang emas Bone Bolango yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
3. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
4. Kawasan Pendidikan Kabila dan Suwawa.

Kawasan Strategis Kabupaten ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten, yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango antara lain ialah :

- a) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu :
- 1) Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Suwawa;
 - 2) Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila;



- 3) Kawasan Industri, di Kecamatan Tapa dan kawasan industri agropolitan di Kecamatan Suwawa
 - 4) Kawasan Strategis Sungai Bone sebagai kawasan jasa dan pariwisata; dan
 - 5) Kawasan Strategis Bone Pesisir sebagai kawasan minapolitan, pariwisata dan industri pengolahan perikanan.
- b) Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan yaitu ;
- 1) Kawasan Air Panas Lombongo, Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah;
 - 2) Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan;
 - 3) Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kecamatan Bone;
 - 4) Kawasan Danau Perintis, Kecamatan Suwawa;
 - 5) Kawasan Taman Laut Olele, Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone;
 - 6) Kawasan Pantai Botutonuo – Molotabu – Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone; dan
 - 7) Kawasan Pantai Bulawa, Kecamatan Bulawa.
- c) Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, yaitu ;
1. Cagar Budaya/Sejarah dan Makam Nani Wartabone yang terletak di Kecamatan Suwawa, Desa Bube Baru;
 2. Kawasan Pendidikan, Kecamatan Tilongkabila – Suwawa;
 3. Kawasan Siap Bangun (KASIBA), di Kecamatan Tilongkabila Desa Moutong, Desa Iloheluma, Desa Butu dan Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo;
 4. Kawasan Desa Adat, di Kecamatan Pinogu; dan
 5. Kawasan Strategis “*Integrated Eduecotourism*” di Kecamatan Tapa.

6.9. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6.9.1. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja, maka



dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah,

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango adalah:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Bone Bolango, Komando Distrik Militer 1304 Gorontalo serta instansi vertikal terkait lainnya.

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketentraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; hewan lepas, peredaran minuman keras, penertiban balap liar dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi.

Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya:

6.9.2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango memiliki jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan



golongan ruang sebagaimana dalam table dibawah ini :

Tabel VI.2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Ruang Kantor Satpol dan PP

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Pangkat dan Golongan Ruang		
			II	III	IV
1	S2	2		1	1
2	S1	9		4	
3	SMA	105	20		
4	SMP	2	2		

6.9.3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan dan kendala Penanggulangan yang dilaksanakan Satpol dan PP

a) Penanggulangan

- Melakukan penyuluhan dan pemantauan terhadap stabilitas kantibmas di daerah.
- Melakukan penertiban berupa patroli,razia,atau tindakan lainnya yang bersifat nonyustisional.
- Melakukan koordinasi dan evaluasi secara kontinu bersama instansi dan/atau Lembaga terkait dalam penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

b) Kendala

- Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan.
- Kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait/lintas SKPD dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah.
- Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP.



- Kurangnya dukungan lembaga sosial – politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

6.9.4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangannya

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango senantiasa melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dan mengikutsertakan dari Kepolisian Resort Bone Bolango dan Komando Distrik Militer (KODIM) 1304 Gorontalo, terutama dalam masalah-masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penanganan unjuk rasa dalam penanganan penanggulangan bencana..



BAB II

PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing yang disukung oleh APBD dan Sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil- hasil pencapaian dari sudut seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama waktu satu tahun anggaran. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya saing daerah dengan mengandalkan sektor industri, perdagangan , pariwisata sebagai lokomotif percepatan.

Pada tahun 2016 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang di capai Kabupaten Bone Bolango, walaupun dapat kekuarang harus akui juga banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat, permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi, untuk itu patut kiranmya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2017 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Bone



Bolango secara keseluruhan serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan kerjasama, melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan di Tahun 2016.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Amin ya robbal alamin..

Bone Bolango, Maret 2017

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU